



Profil Penduduk Lanjut Usia

Jawa Timur

2015



Katalog BPS: 4104001.35



Profil Penduduk Lanjut Usia
Jawa Timur
2015



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR

Profil Penduduk Lanjut Usia Jawa Timur, 2015

No. Publikasi : 35521.1605

Katalog BPS : 4104001.35

ISSN : 2407-3202

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Naskah:

Seksi Statistik Kependudukan

Gambar Kulit dan Foto:

Muhamad Suharsa, SST., M.Si.

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya



Organisasi Penulisan

Penanggung Jawab:

Teguh Pramono, MA.

Editor:

Ir. Zulkipli, M.Si.

Sapto Wintardi, S.Si., M.Si.

Penulis:

Muhamad Suharsa, SST., M.Si.

Pengolah Data:

Muhamad Suharsa, SST., M.Si.



Kata Pengantar

Salah satu keberhasilan pembangunan bidang kesehatan suatu daerah dapat dilihat dari semakin tingginya angka harapan hidup penduduknya. Peningkatan angka harapan hidup tersebut tercermin dari semakin banyaknya penduduk yang tergolong lanjut usia atau dikenal dengan lansia. Penduduk lansia di Jawa Timur pada tahun 2015 telah mencapai 11,46 persen yang dengan demikian menandakan bahwa struktur penduduk Jawa Timur tergolong penduduk tua. Penduduk lansia mempunyai karakter sosial ekonomi yang berbeda dibanding dengan penduduk muda, sehingga membutuhkan perhatian khusus bagi para pengambil kebijakan agar arah pembangunan dapat bermanfaat maksimal bagi penduduk lansia.

Publikasi ini diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan sosial ekonomi penduduk lansia di Jawa Timur. Data yang disajikan dalam publikasi Profil Penduduk Lanjut Usia Jawa Timur, 2015 diantaranya adalah ciri-ciri demografi, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kegiatan ekonomi dari para penduduk lansia di Jawa Timur. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2015.

Kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih. Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang ditujukan untuk pengembangan serta penyempurnaan publikasi ini di kemudian hari. Semoga publikasi ini memberi manfaat bagi para pengguna data dan khususnya para pengambil kebijakan dalam menentukan arah pembangunan yang memperhatikan kepentingan penduduk lansia di Jawa Timur

Surabaya, September 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Timur

Teguh Pramono, MA.

Halaman ini sengaja dikosongkan...

<http://jatim.bps.go.id>

Daftar Isi

	Uraian	Halaman
	Kata Pengantar	<i>iii</i>
	Daftar Isi	<i>v</i>
	Daftar Tabel	<i>vii</i>
	Daftar Gambar	<i>ix</i>
Bab I.	Pendahuluan	<i>1</i>
	1.1. Latar Belakang	<i>1</i>
	1.2. Maksud dan Tujuan	<i>2</i>
	1.3. Sistematika Penyajian	<i>3</i>
Bab II.	Metodologi	<i>5</i>
	2.1. Sumber Data	<i>5</i>
	2.2. Ruang Lingkup	<i>5</i>
	2.3. Konsep dan Definisi	<i>6</i>
	2.4. Keterbatasan Data	<i>10</i>
	2.5. Metode Analisis	<i>10</i>
Bab III.	Struktur Demografis Penduduk Lansia	<i>11</i>
	3.1. Struktur Penduduk Jawa Timur	<i>12</i>
	3.2. Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia	<i>14</i>
	3.3. Distribusi dan Komposisi Penduduk Lansia	<i>15</i>
	3.4. Peranan Penduduk Lansia di dalam Rumah Tangga	<i>17</i>
Bab IV.	Pendidikan Penduduk Lansia	<i>21</i>
	4.1. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	<i>22</i>
	4.2. Kemampuan Membaca dan Menulis	<i>25</i>
Bab V.	Kesehatan Penduduk Lansia	<i>29</i>
	5.1. Keluhan Kesehatan	<i>31</i>
	5.2. Angka Kesakitan	<i>32</i>
	5.3. Lama Sakit	<i>34</i>
	5.4. Cara berobat	<i>36</i>

	Uraian	Halaman
Bab VI.	Kegiatan Ekonomi Penduduk Lansia	41
6.1.	Partisipasi Angkatan Kerja	42
6.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	45
6.3.	Lapangan Usaha	46
6.4.	Status Pekerjaan	48
6.5.	Jumlah Jam Kerja	50
Lampiran	L-1

<http://jatim.bps.go.id>

Daftar Tabel

No.	Judul	Halaman
3.1.	Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur Lansia, 2015	13
3.2.	Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah dan, 2015..	14
3.3.	Jumlah dan Proporsi Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2015	16
3.4.	Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2015	17
3.5.	Persentase Penduduk 10-59 tahun dan Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Peran Keanggotaan dalam Rumah Tangga, 2015	19
4.1.	Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013 – 2015	23
4.2.	Persentase Penduduk 15-59 Tahun, Lansia, dan 15 Tahun ke Atas yang Buta Aksara Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2015	26
5.1.	Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah, 2015	34
5.2.	Proporsi Penduduk Lansia yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Tipe Daerah, 2015	37
5.3.	Persentase Penduduk Lansia yang Tidak Berobat Jalan Menurut Alasannya, 2015	38
6.1.	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas dan Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenis Kegiatan Utama Seminggu Terakhir, 2015	43
6.2.	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas dan Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2015	47
6.3.	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas dan Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan dan Kelompok Lapangan Usaha, 2015	48

No.	Judul	Halaman
6.4.	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan, 2015	49
6.5.	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas dan Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin, 2015	51

<http://jatim.bps.go.id>

Daftar Gambar

No.	Judul	Halaman
3.1.	Persentase Penduduk Lansia Menurut Hubungan dengan Kepala rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2015	18
4.1.	Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015	24
4.2.	Persentase Penduduk Lansia yang Buta Aksara Menurut Jenis Kelamin, 2013-2015	27
5.1.	Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kelompok Lansia dan Jenis Kelamin, 2015	31
5.2.	Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, 2013-2015	33
5.3.	Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Gangguan Kesehatan Parah Selama Sebulan Terakhir Menurut Kelompok Lansia dan Jenis Kelamin, 2015	35
5.4.	Proporsi Penduduk Lansia yang Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015	36
6.1.	TPAK Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2015	45
6.2.	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tipe Daerah dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, 2015	50

Halaman ini sengaja dikosongkan...

<http://jatim.bps.go.id>

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan di Indonesia termasuk di Jawa Timur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang tidak terkecuali pada kelompok lanjut usia (lansia). Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup pada kelompok lansia tercermin dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk yang tak lepas dari keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan. Bertambahnya sarana kesehatan yang dibarengi oleh peningkatan pelayanan dan ketersediaan obat-obatan secara signifikan akan meningkatkan peluang masyarakat untuk senantiasa dalam kondisi sehat sehingga peluang untuk hidup lebih lama pun akan semakin meningkat. Di sisi lain, pendidikan juga sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk hidup lebih sehat dan menambah wawasan masyarakat akan pilihan-pilihan baik untuk hidup sehat ataupun pilihan-pilihan pengobatan atas penyakit yang diderita sehingga akan memperpanjang peluang mereka untuk hidup, atau dengan kata lain akan meningkatkan angka harapan hidup masyarakat secara umum.

Namun demikian, peningkatan jumlah penduduk lansia akan membawa dampak terhadap sosial ekonomi baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam negara. Implikasi ekonomis yang penting dari peningkatan jumlah penduduk lansia adalah peningkatan dalam rasio ketergantungan lanjut usia (*old age dependency ratio*). Setiap penduduk usia produktif akan menanggung semakin banyak penduduk usia lanjut. Ketergantungan lansia disebabkan kondisi mereka banyak mengalami kemunduran baik fisik maupun psikis. Sejalan dengan itu, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat menunjang derajat kesehatan dan mutu kehidupan lansia agar tetap sehat, mandiri, dan berdaya guna sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat.

Menjadi tua merupakan fase kehidupan yang dialami oleh setiap manusia. Secara fisik, orang lanjut usia mengalami kemunduran fungsi alat tubuh, atau disebut juga dengan proses *degenerative* sehingga diperlukan perhatian dan penanganan yang lebih baik. Pemerintah memberikan perhatian terhadap lansia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Selain itu, perhatian terhadap lansia diberikan oleh Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dengan menjadikan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Lansia Sedunia yang

tertuang dalam resolusi PBB No. 045/206 tahun 1991. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti resolusi PBB tersebut dengan menetapkan Hari Lansia di Indonesia pada tanggal 29 Mei. Diharapkan dengan memperingati Hari Lansia tersebut, pemerintah dan masyarakat lebih peduli terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup lansia.

Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup lansia, perlu upaya pemberdayaan guna menunjang derajat kesehatan dan peningkatan mutu kehidupan lansia. Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Arah pemberdayaan dilakukan dengan cara lansia aktif berpartisipasi dalam pembangunan guna mengurangi kemiskinan, memperoleh kesehatan yang lebih baik, dan mendukung kehidupan sosial kemasyarakatan. Pemberdayaan tidak hanya dilakukan terhadap para lansia dan keluarganya, namun juga dilakukan terhadap seluruh komponen bangsa. Untuk itu, arah dan strategi pembangunan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduk lansia sebaiknya dilakukan secara terpadu dan lintas sektor.

Sejalan dengan itu, tersedianya data statistik dan berbagai indikator yang dapat memberikan gambaran makro kondisi dan potensi penduduk lansia pada berbagai aspek penting, seperti demografis, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan pada level nasional maupun provinsi, diharapkan dapat membantu mempertajam arah dan sasaran pembangunan serta pemberdayaan penduduk lansia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan publikasi ini adalah menyajikan gambaran makro situasi dan kondisi penduduk lansia di Jawa Timur dilihat dari berbagai aspek, antara lain demografis, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Gambaran situasi dan kondisi penduduk lansia Jawa Timur dalam publikasi ini disajikan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dibedakan menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Diharapkan penyajian publikasi ini berguna terutama bagi peneliti, perencana, dan pengambil keputusan di bidang sosial dan kependudukan, khususnya yang berorientasi pada penduduk lansia.

13. Sistematika Penyajian

Publikasi Profil Penduduk Lanjut Usia Jawa Timur 2015 ini disajikan dalam tujuh bagian. Pada bagian pertama (Bab I) disajikan fenomena yang melatarbelakangi penyusunan publikasi ini; maksud dan tujuan; serta sistematika penyajian. Kemudian pada bagian kedua (Bab II) disajikan metodologi berupa sumber data; ruang lingkup; konsep dan definisi; keterbatasan data; serta metode analisis.

Lima bagian berikutnya menyajikan gambaran situasi dan kondisi penduduk lansia di Jawa Timur, diawali pada bagian ketiga (Bab III) berupa kajian mengenai struktur demografis penduduk lansia, bagian keempat (Bab IV) mengenai kemampuan baca tulis, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan kemampuan berbahasa Indonesia penduduk lansia, bagian kelima (Bab V) mengenai kondisi kesehatan penduduk lansia, dan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan; bagian keenam (Bab VI) mengenai kegiatan lansia yang bekerja, lapangan usaha, dan status pekerjaan penduduk lansia yang bekerja.

Halaman ini sengaja dikosongkan...

<http://jatim.bps.go.id>

Metodologi

2.1. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Jawa Timur 2015 adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data Kor Susenas tahun 2015, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai kondisi dan potensi penduduk lansia dari sisi demografi, kesehatan, pendidikan dan perumahan.
- b. Data Sakernas tahun 2015, yang digunakan untuk melihat gambaran ketenagakerjaan penduduk lansia.

Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. BPS-RI melaksanakan Susenas sejak tahun 1963. Dalam dua dekade terakhir, sampai dengan tahun 2010, Susenas dilaksanakan setiap tahun. Mulai tahun 2011, Susenas dilaksanakan secara Triwulan (Triwulan I-IV) yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Sedangkan mulai tahun 2015 pelaksanaan Susenas menjadi 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September.

2.2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Susenas 2015 mencakup 29.960 rumah tangga sampel yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Data hasil pencacahan tersebut dapat disajikan baik untuk tingkat nasional, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota. Susenas tahun 2015 tidak mencakup rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa.

2.3. Konsep dan Definisi

- a. **Penduduk lanjut usia** adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas.
- b. **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.
- c. **Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.

Rumah Tangga Lansia adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya berumur 60 tahun ke atas.

- d. **Kepala Rumah Tangga (KRT)** adalah salah seorang dari anggota rumah tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.
- e. **Anggota Rumah Tangga (ART)** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

- f. **Rasio Jenis Kelamin** adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan.
- g. **Kawin** adalah mempunyai isteri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat disekelilingnya dianggap sebagai suami-isteri.
- h. **Cerai Hidup** adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap sebagai cerai hidup.
- i. **Cerai Mati** adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.
- j. **Pendidikan:**
- Pendidikan Formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat dan Perguruan Tinggi.
- Pendidikan Non-formal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- k. **Tidak/Belum Pernah Sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- l. **Bersekolah** adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, pendidikan menengah yaitu SMA/ sederajat dan pendidikan tinggi yaitu PT/ sederajat) maupun non-formal (Paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang

berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dan instansi lainnya.

- m. **Angka Partisipasi Sekolah** adalah nilai perbandingan (dalam persen) banyaknya penduduk yang bersekolah terhadap total penduduk, menurut batasan umur sekolah pada setiap jenjang pendidikan formal dan nonformal (Paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA).
- n. **Tamat Sekolah** adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.
- o. **Jenjang Pendidikan Tertinggiyang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.

Belum Tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

SD meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.

SM meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

Diploma/Sarjana adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademik/ perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

- p. **Dapat Membaca dan Menulis** adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.

Buta Aksara/Huruf adalah tidak bisa membaca dan menulis kalimat sederhana dengan suatu aksara, termasuk huruf *Braille*. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

- q. **Keluhan Kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal, dan lain-lain.

- r. **Sakit** adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.
- s. **Angkatan Kerja Penduduk Lansia** adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

Menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja.

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan Suatu Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya.

- t. **Bukan Angkatan Kerja Lansia** adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan.
- u. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lansia** adalah persentase angkatan kerja penduduk lansia terhadap penduduk lansia. TPAK dihitung dengan rumus:

$$TPAK_{Lansia} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Lansia}}{\text{Jumlah Penduduk Lansia}} \times 100\%$$

- v. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.
- w. **Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap, atau buruh/karyawan.
- x. **Jam Kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.

2.4. Keterbatasan Data

Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan BPS, termasuk Susenas hanya mencakup populasi yang tinggal di suatu rumah tangga biasa. Penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus tidak dicakup dalam survei.

2.5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar atau grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan serta antar wilayah kabupaten/kota. Selain itu disertakan juga analisis tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai lansia selama beberapa periode waktu. Pada bagian akhir publikasi ini dilengkapi dengan Lampiran Tabel untuk melihat data pada tingkat kabupaten/kota.

Struktur Demografis Penduduk Lansia

Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Jawa Barat. Jumlah penduduk yang besar ini jika dikelola dengan baik akan menjadikan modal dasar dan aset yang berharga dalam proses pembangunan. Penempatan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menjadi sangat penting karena selain sebagai sasaran dari pembangunan, penduduk juga sebagai pelaku dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan suatu wilayah sangat bergantung kepada penduduknya. Jika penduduk wilayah tersebut berkualitas, maka akan menjadi sumber daya dan potensi yang sangat kuat dalam pembangunan. Salah satu indikator kualitas penduduk sekaligus indikator keberhasilan dari pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk di wilayah tersebut.

Agar tujuan pembangunan dapat tercapai tentunya dibutuhkan perencanaan yang tepat, terutama ketika memposisikan penduduk sebagai sasaran maupun pelaku pembangunan. Oleh karena itu, data dasar kependudukan sangat diperlukan ketika melakukan kegiatan perencanaan pembangunan serta menetapkan prioritas pembangunan dalam bidang kependudukan. Data kependudukan tersebut antara lain berkaitan dengan jumlah dan struktur penduduk. Data jumlah dan struktur penduduk pada kegiatan perencanaan, sebagai input pembangunan digunakan sebagai rujukan untuk memperkirakan jumlah sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dapat diserap dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, kegiatan perencanaan, sebagai output pembangunan, data jumlah dan struktur penduduk digunakan untuk menentukan kelompok sasaran (*target groups*) pembangunan, misalnya balita, penduduk usia sekolah, penduduk miskin, dan penduduk lanjut usia (lansia).

Pada kegiatan perencanaan pembangunan, salah satu jenis data dasar kependudukan yang sangat penting adalah data mengenai struktur demografis penduduk atau dikenal dengan komposisi penduduk menurut karakteristik demografi. Data penduduk menurut umur atau kelompok umur antara lain digunakan untuk menentukan kelompok sasaran pembangunan yang ditetapkan berdasarkan umur tertentu. Misalnya, penduduk usia 0-4 tahun atau anak

balita merupakan kelompok sasaran untuk program imunisasi yang merupakan salah satu program pembangunan di bidang kesehatan. Pada penduduk usia sekolah yang mencakup penduduk usia 7-12, 13-15 dan 16-18 tahun merupakan kelompok sasaran untuk pembangunan bidang pendidikan.

Kelompok sasaran pembangunan yang juga menjadi perhatian adalah penduduk usia 60 tahun ke atas atau lansia. Pada abad millennium ini terjadi salah satu fenomena kependudukan, yaitu peningkatan jumlah lansia. Sebagai bagian dari proses transisi demografi, kemajuan pembangunan diyakini sebagai faktor signifikan terjadinya perubahan struktur penduduk. Dua faktor kependudukan yang saling melengkapi adalah penurunan tingkat mortalitas yang diiringi dengan semakin rendahnya angka fertilitas. Hal ini merupakan dampak dari perubahan nilai pada masyarakat yang semakin anti-mortalitas, kesadaran pentingnya hidup sehat dan perlunya sedikit anak, serta kemajuan teknologi kedokteran merupakan bukti semakin majunya peradaban manusia. Sejalan dengan itu, maka perumusan dan arah kebijakan pembangunan salah satunya ditujukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk lansia. Untuk itu dibutuhkan data atau informasi dasar yang berkaitan dengan jumlah dan struktur demografi penduduk lansia. Tersedianya data dasar tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas dan sasaran serta target pembangunan. Uraian berikut difokuskan untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai jumlah dan komposisi penduduk lansia serta perkembangannya menurut karakteristik demografis antara lain umur, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan struktur penduduk dalam rumah tangga.

3.1 Struktur Penduduk Jawa Timur

Suatu negara dikatakan memiliki struktur penduduk tua jika mempunyai populasi lansia di atas tujuh persen. Menganalogikan pada batasan tersebut, maka Jawa Timur termasuk provinsi dengan penduduk berstruktur tua. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk lansia yang telah mencapai 11,46 persen dari keseluruhan penduduk, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1. Struktur penduduk yang menua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan manusia secara regional. Hal itu berkaitan dengan adanya perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat yang meningkat. Keadaan ini telah memberikan peningkatan pada usia harapan hidup. Dengan demikian, peningkatan jumlah lansia menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan.

Secara umum persentase lansia perempuan (12,30 persen) lebih besar dari persentase lansia laki-laki (10,60 persen). Sedangkan menurut sebarannya, penduduk lansia tercatat lebih banyak tinggal di daerah perdesaan (12,30 persen) dibandingkan dengan daerah perkotaan (10,56 persen). Jika dilihat menurut kelompok umur, penduduk lansia terbagi menjadi lansia muda (60-69 tahun) sebesar 6,92 persen, lansia menengah atau madya (70-79 tahun) sebesar 3,39 persen, dan lansia tua (80 tahun ke atas) sebesar 1,16 persen. Sementara itu penduduk pra lansia yaitu kelompok umur 45-54 tahun dan 55-59 tahun masing-masing sebesar 14,11 persen dan 5,28 persen.

Keberadaan lansia tidak bisa dikesampingkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kepedulian akan kesejahteraan lansia tertuang dalam Undang-undang No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Amanat dari undang-undang tersebut adalah pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lansia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar atau bahkan lebih baik lagi.

Tabel 3.1.
Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur Lansia, 2015

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Kelompok Umur Lansia					60+
	45-54	55-59	60-69	70-79	80+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	13,41	5,18	6,37	2,62	0,81	9,81
Perempuan (P)	14,26	4,93	6,52	3,54	1,25	11,31
L + P	13,84	5,05	6,45	3,09	1,03	10,56
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	14,22	5,68	7,24	3,12	0,98	11,35
Perempuan (P)	14,51	5,32	7,45	4,19	1,57	13,21
L + P	14,37	5,49	7,35	3,67	1,28	12,30
K + D						
Laki-laki (L)	13,83	5,44	6,82	2,88	0,90	10,60
Perempuan (P)	14,39	5,13	7,00	3,88	1,42	12,30
L + P	14,11	5,28	6,92	3,39	1,16	11,46

Sumber: Susenas, 2015

Keterangan : 45-54 dan 55-59 : Pra Lansia
60-69 : Lansia Muda
70-79 : Lansia Menengah/Madya
80+ : Lansia Tua
60+ : Lansia

Pada Lampiran Tabel 3.1.3 tersaji persentase penduduk lansia menurut kabupaten/kota tahun 2015. Hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki penduduk lansia di atas 7 persen kecuali Kabupaten Sidoarjo (6,79 persen). Hal ini dimungkinkan karena sebagai daerah penyangga Kota Surabaya yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo menjadi sangat terbuka untuk menjadi lahan investasi yang menyerap banyak tenaga kerja yang didominasi kaum muda dan pilihan yang menarik bagi kaum migran untuk bertempat tinggal di perbatasan kota besar yang biasanya memiliki biaya hidup relatif lebih murah dibanding tinggal di kawasan tengah kota. Tingginya kaum migran yang biasanya kelompok muda inilah yang memiliki pengaruh besar dalam komposisi penduduk di Kabupaten Sidoarjo.

3.2. Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, turunnya angka kelahiran dan semakin tingginya angka harapan hidup penduduk Jawa Timur membuat jumlah penduduk lansia di Jawa Timur terus bertambah dari tahun ke tahun. Salah satu implikasi dari adanya perubahan struktur penduduk tersebut adalah bertambahnya angka beban ketergantungan penduduk lansia atau (*old dependency ratio*) di mana angka ini menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk lansia terhadap penduduk usia produktif. Angka tersebut merupakan perbandingan antara jumlah penduduk lansia (60 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun) yang mencerminkan besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk lansia.

Tabel 3.2.
Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia
Menurut Tipe Daerah, 2015

Tipe Daerah	L + P
(1)	(2)
Perkotaan (K)	16,35
Perdesaan (D)	19,02
K + D	17,70

Sumber: Susenas, 2015

Hasil dari data Susenas pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa angka rasio ketergantungan penduduk lansia secara umum pada tahun 2015 adalah 17,70 poin, yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 17-18 orang penduduk lansia. Sedangkan jika dilihat berdasarkan tipe daerah, 100 penduduk produktif di daerah perdesaan memiliki beban menanggung penduduk lansia yang sedikit lebih banyak yaitu sekitar 19-20

orang dibanding 100 penduduk produktif yang bertempat tinggal di daerah perkotaan yang hanya menanggung sekitar 16-17 orang lansia.

Sementara itu, rasio ketergantungan penduduk lansia berdasarkan kabupaten/kota pada tahun 2015 sebagaimana disajikan pada Lampiran Tabel 3.2 berkisar antara 9,94-28,68 poin. Kabupaten/kota yang memiliki rasio ketergantungan penduduk lansia tertinggi adalah Kabupaten Magetan sebesar 28,68 poin, diikuti oleh Kabupaten Pacitan sebesar 28,33 poin, dan Kabupaten Ponorogo sebesar 26,59 poin. Sedangkan kabupaten/kota yang mempunyai rasio ketergantungan penduduk lansia paling rendah adalah Kabupaten Sidoarjo sebesar 9,94 poin, Kota Surabaya sebesar 10,99 poin, dan Kota Pasuruan sebesar 12,19 poin.

3.3. Distribusi dan Komposisi Penduduk Lansia

Menurut hasil Susenas pada tahun 2015 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.3, jumlah lansia di Jawa Timur telah mencapai 4,45 juta orang atau sekitar 11,46 persen dari penduduk Jawa Timur. Secara agregat, jumlah lansia perempuan tercatat jauh lebih banyak mencapai 2,42 juta orang dibanding lansia laki-laki yang pada periode tahun 2015 hanya mencapai 2,03 juta orang. Begitu pula halnya dengan proporsi penduduk lansia perempuan terhadap total penduduk perempuan di Jawa Timur menunjukkan proporsi yang jauh lebih besar dibanding proporsi penduduk lansia laki-laki terhadap total penduduk laki-laki di Jawa Timur, yaitu 12,30 persen berbanding 10,60 persen. Hal ini semakin memperkuat hasil Sensus Penduduk pada tahun 2010 (SP2010) yang mencatat bahwa secara rata-rata angka harapan hidup perempuan empat tahun lebih lama dibanding laki-laki, yaitu 73,0 tahun untuk perempuan dan 69,1 tahun untuk laki-laki.

Tabel 3.3.
Jumlah dan Proporsi Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2015

Jenis Kelamin	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K + D	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki (L)	905 877	9,81	1 125 086	11,35	2 030 963	10,60
Perempuan (P)	1 062 330	11,31	1 356 509	13,21	2 418 839	12,30
L + P	1 968 207	10,56	2 481 595	12,30	4 449 802	11,46

Sumber: Susenas, 2015

Tabel 3.3 juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia yang tinggal di daerah pedesaan tercatat sebanyak 2,48 juta orang atau sekitar 12,30 persen dari keseluruhan penduduk Jawa Timur yang tinggal di daerah pedesaan. Sedangkan penduduk lansia yang tinggal di wilayah perkotaan tercatat sebesar 10,56 persen dari keseluruhan penduduk yang tinggal di perkotaan atau sekitar 1,97 juta orang.

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Timur, proporsi penduduk lansia tahun 2015 terlihat cukup bervariasi. Sebagaimana ditunjukkan pada lampiran Tabel 3.3 terlihat bahwa proporsi penduduk lansia berkisar antara 6,79 persen sampai dengan 17,58 persen. Kabupaten/kota yang mempunyai penduduk lansia dengan proporsi paling tinggi adalah wilayah yang relatif masih berkarakter pedesaan seperti Kabupaten Magetan (17,58 persen), kemudian Kabupaten Pacitan (17,50 persen), dan Kabupaten Ponorogo (16,58 persen). Sedangkan kabupaten/kota yang proporsi penduduk lansianya paling rendah adalah wilayah yang cenderung memiliki karakter perkotaan seperti Kabupaten Sidoarjo (6,79 persen), kemudian Kota Surabaya (7,63 persen) dan Kota Pasuruan (7,91 persen).

Salah satu komposisi penduduk yang menarik untuk diamati adalah komposisi penduduk lansia menurut status perkawinan. Sebagian besar penduduk lansia di Jawa Timur berstatus kawin yaitu 57,12 persen, diikuti dengan lansia berstatus cerai mati sebesar 39,71 persen. Sedangkan penduduk lansia yang berstatus cerai hidup sebesar 2,46 persen dan yang belum kawin sebesar 0,71 persen (Tabel 3.4). Bila status perkawinan ini dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan pola status perkawinan antara penduduk lansia laki-laki dengan penduduk lansia perempuan. Sebagian besar lansia laki-laki memiliki status kawin, yaitu 82,56 persen dan lansia laki-laki yang berstatus cerai mati sebanyak 15,59 persen. Sedangkan pada kelompok lansia perempuan tercatat hanya sekitar 35,76 persen lansia perempuan yang berstatus kawin. Proporsi terbesar justru adalah para lansia yang berstatus cerai mati, yaitu 59,96 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan relatif memiliki umur panjang, sehingga ketika suatu pasangan menapaki usia tua cenderung si istri/perempuan akan lebih dahulu ditinggal mati oleh pasangannya. Di satu sisi, hal ini juga memberikan gambaran yang menarik dari sisi pola perkawinan. Untuk perempuan, terutama pada usia tua cenderung untuk tidak bersegera menikah lagi manakala ditinggal mati oleh pasangannya yang terdahulu atau bahkan memilih untuk tetap menjanda hingga akhir hayatnya. Hal ini sangat berbeda dengan laki-laki yang biasanya akan segera menikah kembali manakala dirinya ditinggal oleh sang istri/pasangannya, sehingga lansia laki-laki yang berstatus cerai mati atau duda relatif sangat sedikit.

Tabel 3.4.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin,
dan Status Perkawinan, 2015

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
Laki-laki (L)	0,68	81,53	1,12	16,67	100,00
Perempuan (P)	0,99	35,80	3,39	59,82	100,00
L + P	0,85	56,85	2,35	39,96	100,00
Perdesaan (D)					
Laki-laki (L)	0,43	83,40	1,45	14,73	100,00
Perempuan (P)	0,74	35,73	3,47	60,06	100,00
L + P	0,60	57,34	2,55	39,51	100,00
K + D					
Laki-laki (L)	0,54	82,56	1,30	15,59	100,00
Perempuan (P)	0,85	35,76	3,44	59,96	100,00
L + P	0,71	57,12	2,46	39,71	100,00

Sumber: Susenas, 2015

Pola yang sama juga terjadi jika kita melihat struktur dan pola status perkawinan penduduk lansia di setiap kabupaten/kota. Data pada Lampiran Tabel 3.4.1-3.4.3 menunjukkan fenomena yang sama di mana penduduk lansia laki-laki lebih banyak berstatus kawin, sedangkan penduduk lansia perempuan lebih banyak yang berstatus cerai mati.

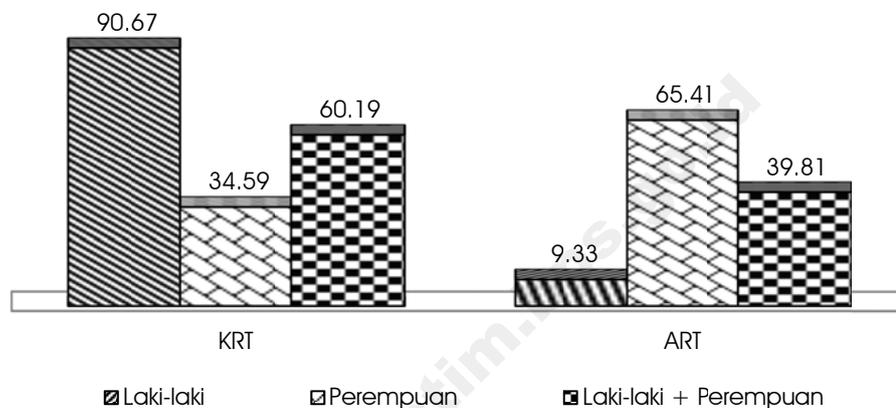
3.4. Peranan Penduduk Lansia di dalam Rumah Tangga

Setiap orang yang tinggal di dalam suatu rumah tangga biasanya memiliki peran khusus yang mungkin berbeda antara satu dengan lainnya. Salah satu peran terpenting dalam suatu rumah tangga adalah kepala rumah tangga (KRT), di mana seseorang yang berperan sebagai KRT adalah orang yang memiliki tanggung jawab besar sebagai pemimpin dan orang yang bertanggung jawab dalam menentukan kelangsungan dan keberadaan rumah tangga. Selain harus bertanggung jawab secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya, kepala rumah tangga juga harus mengatur dan memimpin anggota rumah tangganya, serta berperan sebagai pengambil keputusan.

Tanggung jawab seorang kepala rumah tangga sangat besar baik dilihat dari segi psikologis maupun ekonomi, dan ternyata masih banyak peran tersebut dipegang oleh

penduduk lansia yang seharusnya dapat menikmati hari tuanya tanpa beban yang berat. Hasil studi lansia tahun 2012 menyatakan bahwa tingginya lansia sebagai kepala rumah tangga karena: 1) lansia masih menjadi tulang punggung keluarga dan 2) rumah yang ditempati milik lansia. Berdasarkan Gambar 3.1, pada tahun 2015 sebagian besar penduduk lansia khususnya laki-laki masih memegang peranan terpenting di dalam lingkungan rumah tangga atau berstatus sebagai KRT (90,67 persen), dan tercatat sebanyak 34,59 persen lansia perempuan juga memiliki status sebagai kepala rumah tangga.

Gambar 3.1.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2015



Sumber: Susenas, 2015

Tingginya persentase lansia sebagai kepala rumah tangga sejalan dengan tingginya lansia bekerja dengan jam kerja penuh (lebih dari 35 jam per minggu) yang akan dibahas lebih lanjut pada Bab 6 dari publikasi ini. Besarnya persentase penduduk lansia yang menjadi kepala rumah tangga perlu mendapat perhatian khusus karena mereka dituntut dan dibebani tanggung jawab yang cukup besar secara ekonomi terhadap anggota rumah tangganya, terlebih lagi pada rumah tangga yang memiliki KRT perempuan yang biasanya memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi.

Berbeda dengan pola peran lansia di rumah tangga, peran penduduk berumur 10-59 tahun di rumah tangga lebih banyak sebagai anggota rumah tangga (71,10 persen). Pola ini relatif sama bagi penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan di mana tercatat sebanyak 71,30 persen penduduk berumur 10-59 tahun berstatus sebagai anggota rumah tangga maupun penduduk berumur 10-59 tahun yang tinggal di perdesaan dengan 70,91 persen di antaranya berstatus sebagai anggota rumah tangga.

Apabila kita perhatikan Tabel 3.5. berikut, terlihat bahwa laki-laki sangat mendominasi peran KRT baik pada kelompok penduduk berumur 10-59 tahun maupun kelompok penduduk lansia. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa 90,67 persen penduduk lansia laki-laki memiliki peran sebagai KRT. Hal ini semakin mempertegas bahwa budaya di masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya di Jawa Timur sangat mengedepankan laki-laki untuk menjadi pemimpin keluarga terlebih lagi jika si laki-laki tersebut sebagai orang yang dituakan di rumah tangganya.

Tabel 3.5.
Persentase Penduduk 10-59 tahun dan Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Peran Keanggotaan dalam Rumah Tangga, 2015

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Penduduk 10-59 Tahun		Penduduk Lansia	
	KRT	ART	KRT	ART
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan (K)				
Laki-laki (L)	50,15	49,85	91,04	8,96
Perempuan (P)	7,49	92,51	35,19	64,81
L + P	28,70	71,30	60,89	39,11
Perdesaan (D)				
Laki-laki (L)	51,82	48,18	90,38	9,62
Perempuan (P)	6,93	93,07	34,13	65,87
L + P	29,09	70,91	59,63	40,37
K + D				
Laki-laki (L)	51,01	48,99	90,67	9,33
Perempuan (P)	7,20	92,80	34,59	65,41
L + P	28,90	71,10	60,19	39,81

Sumber: Susenas, 2015

Halaman ini sengaja dikosongkan...

<http://jatim.bps.go.id>

Pendidikan Penduduk Lansia

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu, di Pasal 31 Ayat (1) juga disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Baik usia muda maupun tua mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Bagi penduduk usia muda, pendidikan merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup di masa depan. Sedangkan penduduk yang berusia tua pun juga perlu mendapatkan pendidikan, seperti yang tertuang dalam UU Lansia No. 13 Tahun 1998 Bab III Pasal 5 Ayat (2) poin d tentang hak dan kewajiban lansia, bahwa lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial salah satunya dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang memadai diharapkan timbul rasa kemandirian pada lansia sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat.

Sejalan dengan itu, dalam UU tersebut Bab VI Pasal 16 Ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah memberikan pelayanan dan pelatihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berkaitan dengan UU tersebut, pemerintah telah berupaya menyelenggarakan berbagai program yang ditujukan dalam meningkatkan pendidikan sekaligus kesejahteraan penduduk lansia, antara lain program Pemberantasan Buta Aksara (keaksaraan dasar) dan dilanjutkan dengan program keaksaraan (keaksaraan fungsional). Keseluruhan program yang diselenggarakan pemerintah tersebut pada dasarnya mencerminkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan tujuan nasional yaitu mencerdaskan bangsa.

Program pembangunan pendidikan serta pengembangan dan peningkatan keterampilan bagi penduduk lansia memerlukan penanganan yang lebih khusus dan terfokus. Hal ini sesuai dengan karakteristik penduduk lansia yang berbeda dibandingkan dengan kelompok penduduk lainnya seperti balita, remaja, dan pemuda. Jika kelompok penduduk lainnya seperti balita, remaja dan pemuda memiliki kemampuan fisik dan non fisik yang makin berkembang dan meningkat, sebaliknya penduduk lansia memiliki kemampuan fisik dan non fisik yang semakin menurun karena proses penuaan yang terjadi pada mereka secara alamiah.

4.1 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan yang tinggi serta ditunjang dengan kondisi kesehatan yang baik pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Walaupun pendidikan dan kesejahteraan tidak memiliki hubungan yang bersifat langsung, akan tetapi melalui proses panjang dimana pendidikan yang baik akan memberi peluang pada anggota masyarakat untuk dapat terlibat di dalam proses pembangunan ekonomi. Kondisi pendidikan dan kesehatan yang baik merupakan prasyarat terbentuknya SDM yang berkualitas. Melalui SDM yang berkualitas maka masyarakat akan memiliki produktivitas tinggi yang pada gilirannya akan berkontribusi sangat signifikan pada upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu upaya peningkatan bidang pendidikan adalah dengan penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan yang semakin baik. Semakin tinggi akses terhadap fasilitas pendidikan, diharapkan semakin banyak pula penduduk yang dapat bersekolah, sehingga pemerataan pendidikan dapat terwujud. Kemudahan fasilitas pendidikan dapat dirasakan oleh generasi muda saat ini, namun tidak dirasakan oleh generasi tua di jamannya seperti pada masa kemerdekaan.

Dari hasil Susenas 2015 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1, terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk lansia relatif masih sangat rendah di mana yang berpendidikan SD ke bawah masih tercatat sebanyak 92,13 persen. Mereka yang berpendidikan tamat SD pun hanya sebesar 29,69 persen, selebihnya adalah mereka yang tidak menamatkan SD dan yang tidak atau belum pernah sekolah mencapai 62,44 persen. Sedangkan persentase penduduk lansia yang menamatkan pendidikan sampai jenjang sekolah menengah pertama (SMP) hanya sebesar 5,31 persen dan sekolah menengah (SM) ke atas hanya sebesar 8,11 persen. Rendahnya pendidikan penduduk lansia tersebut memperlihatkan kualitas SDM lansia secara umum masih tergolong sangat rendah. Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan

akibat sisa-sisa penjajahan pada masa kemerdekaan menjadi salah satu faktor penyebab sangat rendahnya tingkat pendidikan lansia.

Tabel 4.1.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013-2015

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2013			2014			2015		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak/belum pernah sekolah	18,95	46,21	34,23	17,35	45,07	32,56	19,93	43,52	32,75
Tidak tamat SD	34,10	30,05	31,83	33,21	30,45	31,70	30,58	28,95	29,69
SD	29,65	15,99	21,99	31,05	16,36	22,99	31,11	18,29	24,14
SMP	6,72	3,80	5,09	6,49	3,67	4,94	7,20	3,72	5,31
SM+	10,58	3,94	6,86	11,90	4,45	7,81	11,19	5,52	8,11
Jumlah	100,00								

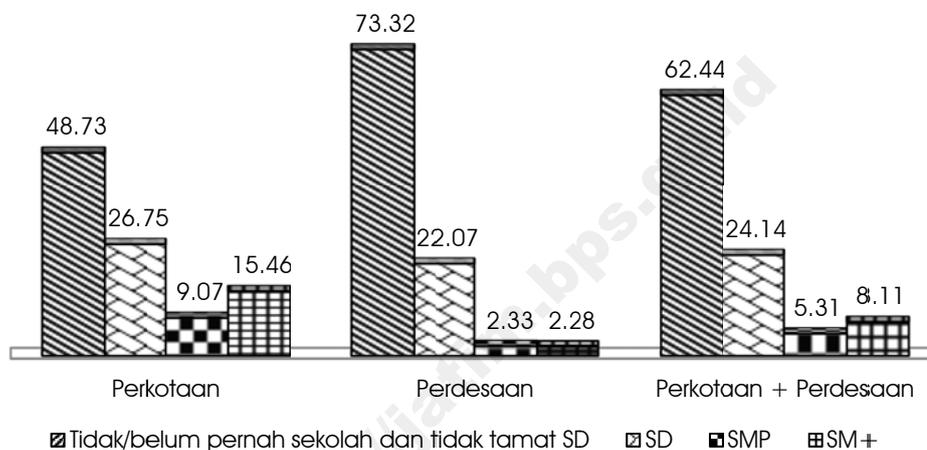
Sumber: Susenas, 2013 - 2015

Tabel 4.1 menggambarkan bahwa budaya patriarkhi masih kental di dunia pendidikan dalam keluarga di era paska kemerdekaan, dimana orang tua mengutamakan pendidikan anak laki-laki dibandingkan perempuan. Kesenjangan terjadi pada semua jenjang pendidikan secara signifikan. Pada tahun 2015 persentase penduduk lansia laki-laki yang tidak pernah sekolah hanya sebesar 19,93 persen, sedangkan untuk penduduk lansia perempuan melebihi dua kali lipatnya yaitu sebesar 43,52 persen. Sebaliknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, persentase penduduk lansia laki-laki lebih tinggi dibandingkan lansia perempuan. Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan penduduk lansia laki-laki lebih baik dari penduduk lansia perempuan. Hal ini merupakan fenomena menarik yang mengindikasikan terjadinya kesenjangan gender dalam akses memperoleh pelayanan pendidikan di masa lalu.

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 dan 2014, persentase penduduk lansia yang tidak/belum pernah sekolah relatif dan tidak tamat SD cenderung menurun, yaitu dari 66,06 persen pada tahun 2013 menjadi 64,26 persen pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menjadi 62,44 persen. Sedangkan proporsi lansia yang berpendidikan, baik itu tamat SD, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas atau lebih menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sebagai cerminan hasil dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan penduduknya.

Kondisi seperti penjelasan di atas berlaku pula di semua kabupaten/kota di Jawa Timur. Pada Tabel Lampiran 4.1.3. dapat dilihat bahwa persentase tertinggi penduduk lansia yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak tamat SD terdapat di Kabupaten Sampang (93,73 persen), Kabupaten Bondowoso (87,03 persen), dan Kabupaten Sumenep (86,82 persen). Sedangkan persentase tertinggi penduduk lansia yang tamat sekolah dasar (SD) atau lebih berturut-turut adalah: Kota Madiun (85,14 persen), Kota Malang (78,14 persen), dan Kota Surabaya (77,80 persen).

Gambar 4.1.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015



Sumber: Susenas, 2015

Pada Gambar 4.1 terlihat bahwa pendidikan penduduk lansia di daerah perkotaan cenderung lebih baik dari penduduk lansia yang tinggal di daerah perdesaan. Persentase penduduk lansia di daerah perkotaan yang menamatkan jenjang pendidikan SD cenderung lebih tinggi (26,75 persen) dibanding penduduk lansia di daerah perdesaan (22,07 persen). Sebaliknya, penduduk lansia yang tidak/belum pernah sekolah dan yang tidak tamat SD cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan (73,32 persen) dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan (48,73 persen). Meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di masa kemerdekaan, di daerah perkotaan pada umumnya ketersediaan fasilitas pendidikan masih cukup memadai dibanding daerah perdesaan. Akses masyarakat perkotaan dalam memperoleh pelayanan pendidikan masih lebih baik dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Hal ini diduga menjadi dasar adanya kesenjangan pendidikan yang ditamatkan antara penduduk lansia di daerah perkotaan dan perdesaan.

4.2. Kemampuan Membaca dan Menulis

Mencapai pendidikan dasar untuk semua merupakan tujuan kedua dari *Millennium Development Goals* (MDGs). Penilaian terhadap pencapaian tujuan kedua dari MDGs dapat dilihat dari empat indikator yaitu angka partisipasi sekolah (APS), angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan rasio murid laki-laki dan perempuan. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan dasar pengembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun masyarakat. Pada kelas awal jenjang pendidikan dasar atau Sekolah Dasar (SD) yang diajarkan pertama kali pada siswa adalah kemampuan dasar membaca dan menulis huruf latin serta berhitung sederhana. Dengan menguasai baca tulis huruf latin dan berhitung sederhana, diharapkan setiap orang dapat mempelajari keterampilan dan keahlian lainnya.

Penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis atau biasa disebut buta aksara merupakan indikator dasar yang bisa digunakan untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat. Angka buta aksara menunjukkan proporsi penduduk buta aksara terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Program Keaksaraan Fungsional (KF) bertujuan untuk penuntasan buta aksara. Prioritas program KF adalah penduduk buta aksara usia 15-44 tahun. Namun dalam kenyataan hampir 10 persen peserta KF berusia 60 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar dan kemajuan untuk membaca dan menulis lansia masih cukup besar.

Pada Tabel 4.2 disajikan persentase buta aksara penduduk 15 tahun ke atas dan penduduk lansia pada tahun 2015. Tingkat buta aksara penduduk 15 tahun ke atas sebesar 8,53 persen, yang sebagian besar merupakan penduduk lansia. Bila dibandingkan antara kelompok umur 15-59 tahun dengan penduduk lansia, angka buta aksara penduduk lansia relatif cukup tinggi yang mencapai dua digit yaitu sebesar 34,43 persen dari total keseluruhan penduduk lansia, sedangkan kelompok umur 15-59 tahun hanya sebesar 3,94 persen.

Angka buta aksara lansia yang cukup tinggi ini sejalan dengan tingkat pendidikan penduduk lansia yang pada umumnya masih sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi bangsa Indonesia pada masa 60 tahun yang lalu. Pada saat itu bangsa Indonesia baru melepaskan diri dari belenggu penjajahan sehingga pembangunan infrastruktur serta berbagai fasilitas termasuk fasilitas pendidikan pada masa itu dilakukan masih dalam skala yang sangat terbatas. Kondisi ini berbeda dengan pembangunan masa kini yang mempunyai fasilitas pendidikan lebih baik sehingga angka buta aksara penduduk usia muda jauh lebih kecil.

Keterbatasan berbagai fasilitas dalam bidang pendidikan di masa lalu cenderung lebih banyak dirasakan oleh penduduk lansia yang berada di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. Kondisi ini tercermin dari angka buta aksara penduduk lansia di daerah perdesaan

yang hampir dua kali lipat dibanding penduduk lansia yang tinggal di daerah perkotaan. Angka buta aksara penduduk lansia di daerah perdesaan mencapai sebesar 43,47 persen, sedangkan di daerah perkotaan hanya 23,04 persen. Pola tersebut berlaku pula untuk penduduk berumur 15 tahun ke atas yang angkanya banyak dipengaruhi oleh penduduk lansia. Penduduk 15 tahun ke atas di daerah perdesaan yang buta aksara mencapai 12,02 persen, sebaliknya di daerah perkotaan hanya 4,74 persen.

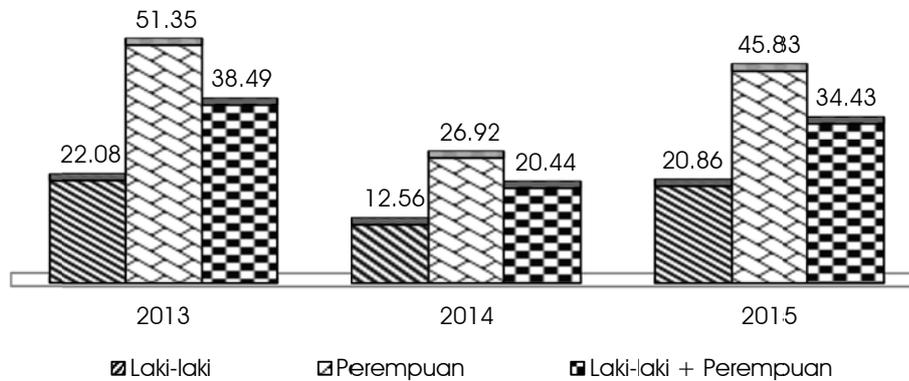
Tabel 4.2.
Persentase Penduduk 15-59 Tahun, Lansia, dan 15 Tahun ke Atas yang Buta Aksara Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2015

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Kelompok Umur		
	15-59	60+ (Lansia)	15+
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)			
Laki-laki (L)	0,98	12,04	2,42
Perempuan (P)	2,59	32,42	6,98
L + P	1,79	23,04	4,74
Perdesaan (D)			
Laki-laki (L)	3,92	27,96	7,54
Perempuan (P)	7,96	56,33	16,25
L + P	5,97	43,47	12,02
K + D			
Laki-laki (L)	2,48	20,86	5,06
Perempuan (P)	5,36	45,83	11,83
L + P	3,94	34,43	8,53

Sumber: Susenas, 2015

Gambar 4.2 berikut menyajikan angka buta aksara penduduk lansia menurut jenis kelamin pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi penurunan angka buta aksara lansia dari 38,49 persen pada tahun 2013 menjadi 20,44 persen pada tahun 2014, namun terjadi peningkatan lagi pada tahun 2014 menjadi 34,43 persen. Banyak faktor yang mempengaruhi meningkatnya kembali angka buta aksara di kalangan penduduk lansia. Seperti dijelaskan pada awal bab ini, kemampuan fisik dan non fisik seperti daya ingat penduduk lansia yang cenderung menurun membuat mereka yang semula telah lulus program KF namun tidak mengikuti program lanjutan dapat membuat mereka kembali kehilangan kemampuan membaca dan menulisnya.

Gambar 4.2.
Persentase Penduduk Lansia yang Buta Aksara Menurut Jenis Kelamin,
2013-2015



Sumber: Susenas, 2013-2015

Bila dilihat menurut jenis kelamin, terjadi kesenjangan yang cukup tinggi dalam hal kemampuan baca tulis antara penduduk lansia laki-laki dan perempuan. Keadaan tersebut sudah terjadi sejak lama yang salah satu alasan yang mempengaruhinya seperti penjelasan sebelumnya adalah karena adanya sistem budaya patriarki masyarakat Indonesia yang mungkin sampai saat ini cenderung lebih mengutamakan pendidikan bagi kaum laki-laki dibanding kaum perempuan. Pada Gambar 4.2. dapat dilihat bahwa persentase penduduk lansia perempuan yang buta aksara pada tahun 2015 adalah lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan penduduk lansia laki-laki (45,83 persen berbanding 20,86 persen). Hal ini sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya seperti pada tahun 2013 penduduk lansia perempuan yang buta aksara adalah 51,35 persen sedangkan penduduk lansia laki-laki yang buta aksara hanya 22,08 persen. Begitu pula pada tahun 2014 di mana penduduk lansia perempuan yang buta aksara adalah 26,92 persen sedangkan penduduk lansia laki-laki yang buta aksara hanya 12,56 persen.

Tabel Lampiran 4.2.3 menunjukkan bahwa persentase lansia yang buta aksara antar kabupaten/kota sangat bervariasi antara 7,34-76,96 persen. Angka buta aksara lansia tertinggi secara berturut-turut terjadi di Kabupaten Sampang (76,96 persen), Kabupaten Sumenep (63,89 persen), dan Kabupaten Bondowoso (58,31 persen). Sebaliknya, kabupaten/kota dengan persentase lansia yang buta aksara terendah secara berturut-turut terjadi di Kota Madiun (7,34 persen), Kabupaten Sidoarjo (8,63 persen), dan Kota Surabaya (8,73 persen).

Halaman ini sengaja dikosongkan...

<http://jatim.bps.go.id>

Kesehatan Penduduk Lansia

Ada sebuah pepatah “*Men sana incorpore sano*” yang berarti di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan merupakan bagian dari unsur kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan, yang dimaksud kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif sosial dan ekonomis. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Kualitas hidup yang baik akan didapat bila seseorang memiliki kesehatan yang prima, baik fisik, mental, spiritual dan sosial. Seseorang yang mempunyai badan sehat akan dapat melakukan kegiatan lebih baik dan optimal bila dibandingkan dengan kesehatan orang yang sedang terganggu kesehatannya. Oleh karena itu, kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan setiap manusia.

Tingkat/derajat kesehatan penduduk merupakan salah satu cermin dari tingginya kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa. Hal ini dikarenakan manusia merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, yang mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Oleh sebab itu, upaya untuk membangun kualitas SDM tetap menjadi perhatian penting dalam setiap program pembangunan pemerintah.

Dalam upaya membangun kualitas SDM yang andal, program pembangunan yang dijalankan pemerintah dalam bidang kesehatan mencakup semua usia, termasuk penduduk lansia. Aspek kesehatan bagi penduduk lansia sangat penting karena pada umumnya daya tahan tubuh mereka berkurang sejalan dengan bertambahnya umur. Penurunan daya tahan tubuh penduduk lansia hingga tingkat tertentu dapat mengakibatkan menjadi rentan atau mudah terserang berbagai penyakit. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya dari semua

pihak agar para penduduk lansia memiliki kesehatan yang prima dalam rangka melanjutkan aktivitas kehidupannya. Agar penduduk lansia selalu memiliki kesehatan yang prima salah satunya adalah dengan meningkatkan jenis dan jangkauan pelayanan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan penduduk lansia.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan penduduk lansia dituangkan dalam UU Lansia No. 13 Tahun 1998 Bab VI Pasal 14 Ayat (1) tentang pelayanan kesehatan yang dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Pada Ayat (2) disebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah berupa peningkatan: a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lansia; b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik; c. pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dan pada Ayat (3) disebutkan bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lansia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu penelitian mengenai pelayanan kesehatan penduduk lansia adalah penelitian pelayanan kesehatan penduduk lansia di rumah sakit. Penelitian menyimpulkan bahwa rumah sakit memiliki kecenderungan memberikan perlindungan kepada lansia dalam pemenuhan hak atas kesehatannya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala, seperti anggaran untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk lanjut usia masih menyatu dengan anggaran rumah sakit secara keseluruhan, kurangnya dukungan Pemerintah Daerah maupun DPRD (belum ada kebijakan yang dikeluarkan bagi perlindungan penduduk lansia di rumah sakit), belum adanya landasan yuridis (peraturan pemerintah), dan terbatasnya SDM staf pelayanan kesehatan penduduk lansia. Penelitian tersebut merekomendasikan perlunya peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan penduduk lansia dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan, dan perlunya anggaran khusus program penduduk lansia. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan khusus untuk penduduk lansia diantaranya adalah pos pelayanan terpadu (posyandu) lansia. Pelayanan kesehatan ini disediakan sebagai sarana pencegahan dan pengobatan agar penduduk lansia selalu terpantau kesehatannya. Posyandu lansia juga merupakan ajang komunikasi sesama penduduk lansia.

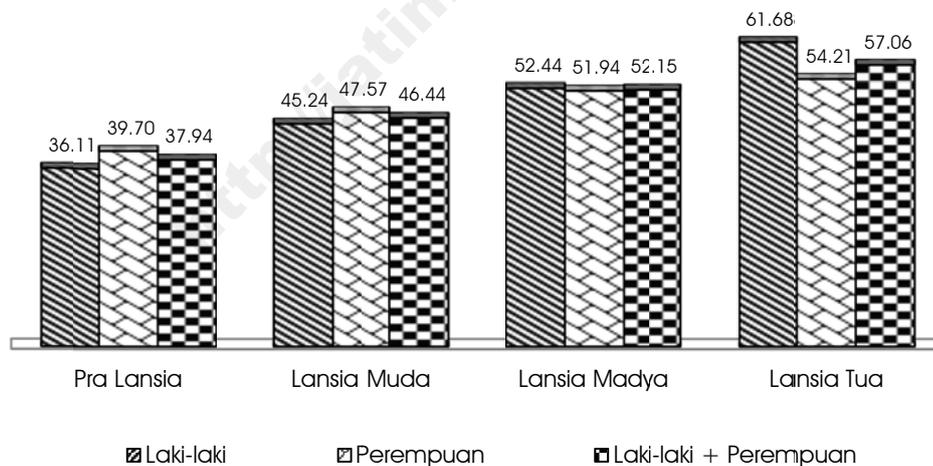
Berdasarkan ilmu kesehatan, semakin aktif seorang lansia maka akan semakin baik daya tahan fisik, pikiran, dan kebahagiaannya. Kondisi kesehatan penduduk lansia tidak hanya dipengaruhi pola kehidupan sekarang, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pola hidup semasa mudanya. Kondisi kesehatan seseorang pada saat sekarang ini merupakan hasil proses

akumulasi yang terjadi semenjak manusia dalam kandungan sampai sekarang. Secara umum dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai pola hidup sehat dari masa kecil, remaja, dewasa, hingga lansia, kondisi kesehatannya akan lebih baik dibandingkan dengan seorang lansia yang masa lalunya tidak berperilaku hidup sehat yang biasanya terlihat dari gangguan kesehatan yang dikeluarkannya.

5.1 Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut/kronis, kecelakaan, kriminalitas atau sebab lainnya. Keluhan kesehatan tidak selalu mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, namun terjadinya keluhan kesehatan dan jenis keluhan yang dialami oleh penduduk dapat menggambarkan tingkat/derajat kesehatan secara kasar.

Gambar 5.1.
Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kelompok Lansia dan Jenis Kelamin, 2015



Sumber: Susenas, 2015

Secara umum, persentase penduduk pra lansia dan lansia yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir dapat dilihat melalui Gambar 5.1. Semakin tinggi umur penduduk maka peluang untuk mengalami keluhan kesehatan semakin besar, sebagaimana terlihat pada kelompok umur 45-59 tahun (pra lansia) tercatat bahwa 37,94 persen pra lansia mempunyai keluhan kesehatan, kemudian pada kelompok umur 60-69 tahun (lansia muda) terdapat 46,44 persen lansia muda yang mempunyai keluhan kesehatan. Berikutnya pada

kelompok umur 70-79 tahun (lansia madya) terdapat 52,15 persen lansia madya yang mengeluhkan kesehatannya, bahkan pada kelompok umur 80 ke atas (lansia tua) yang tercatat mempunyai keluhan kesehatan sebanyak 57,06 persen. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh lansia di Jawa Timur memiliki keluhan tentang kesehatannya. Bila dilihat menurut jenis kelamin, penduduk perempuan pada kelompok pra lansia dan lansia muda relatif lebih banyak mengeluhkan kesehatannya dibandingkan dengan penduduk lansia laki-laki pada kelompok umur yang sama. Sedangkan pada kelompok lansia madya dan lansia tua, justru menunjukkan bahwa lansia laki-laki lebih sering mengeluhkan kesehatannya dibanding lansia perempuan.

Pada kelompok pra lansia tercatat sebanyak 39,70 persen penduduk pra lansia perempuan yang mengeluhkan kesehatannya, sedangkan penduduk pra lansia laki-laki hanya tercatat 36,11 persen. Begitu pula halnya pada kelompok lansia muda tercatat bahwa 47,57 persen penduduk lansia muda perempuan memiliki keluhan kesehatan dan penduduk lansia muda laki-laki hanya sebanyak 45,24 persen. Sedangkan pada kelompok lansia madya, proporsi penduduk lansia madya laki-laki yang mengeluhkan kesehatannya tercatat sedikit lebih banyak dibanding penduduk lansia madya perempuan yaitu berturut-turut sebanyak 52,44 persen dan 51,94 persen. Sedangkan perbedaan yang cukup tinggi antara laki-laki dan perempuan terlihat pada kelompok lansia tua (umur 80 tahun atau lebih), di mana 61,68 persen penduduk lansia tua laki-laki mempunyai keluhan kesehatan sementara penduduk lansia tua perempuan hanya sebanyak 54,21 persen.

Tiga kabupaten/kota dengan persentase tertinggi penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan berturut-turut adalah Kabupaten Sumenep (61,49 persen), Kabupaten Magetan (60,42 persen), dan Kabupaten Lumajang (59,75 persen). Kemudian kabupaten/kota dengan persentase terendah penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan yaitu Kabupaten Sampang (31,91 persen), Kabupaten Mojokerto (37,67 persen), dan Kabupaten Pamekasan (41,40 persen) seperti yang disajikan pada Lampiran Tabel 5.1.

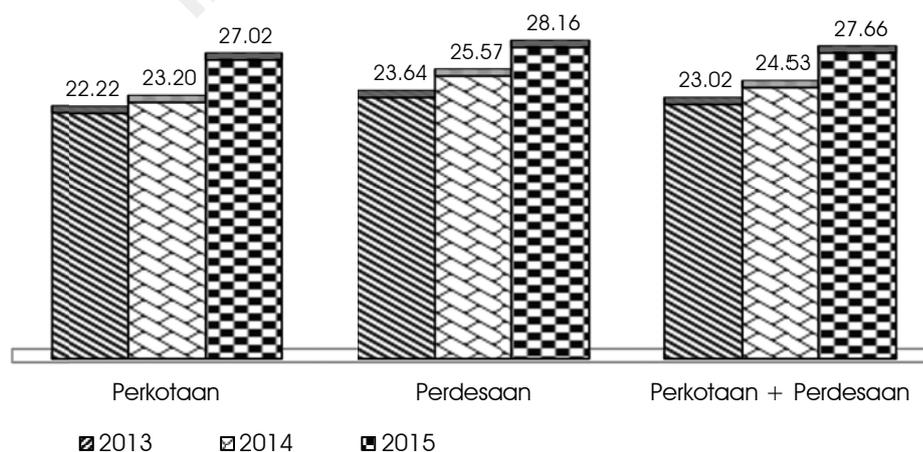
5.2. Angka Kesakitan

Seseorang dikatakan sakit apabila keluhan kesehatan yang dirasakan dapat mengganggu aktifitas sehari-harinya yaitu tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, dan kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasa. Kondisi ini sangat mungkin terjadi pada penduduk lansia yang disebabkan daya tahan tubuh yang menurun sehingga rentan terhadap penyakit. Angka kesakitan (*morbidity rates*) lansia adalah proporsi penduduk lansia yang

mengalami masalah kesehatan hingga mengganggu aktifitas kesehatan sehari-hari mereka selama satu bulan terakhir. Angka kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Angka kesakitan tergolong sebagai indikator kesehatan negatif yang mana mempunyai makna semakin tinggi angka kesakitan menunjukkan derajat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya, semakin rendah angka kesakitan menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik.

Angka kesakitan penduduk lansia tahun 2015 sebesar 27,66 persen, artinya bahwa dari setiap 100 orang lansia terdapat sekitar 27 atau 28 orang diantaranya mengalami sakit sehingga kegiatan sehari-harinya terganggu. Angka kesakitan penduduk lansia di perkotaan (27,02 persen) lebih rendah dibandingkan angka kesakitan penduduk lansia di perdesaan (28,16 persen). Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan penduduk lansia di perkotaan cenderung sedikit lebih baik dibandingkan derajat kesehatan penduduk lansia di perdesaan. Semenjak tahun 2013 bahkan beberapa tahun sebelumnya, derajat kesehatan penduduk lansia mengalami perbaikan (Gambar 5.2). Angka kesakitan penduduk lansia pada tahun 2013 sebesar 23,02 persen, sedikit meningkat pada tahun 2014 menjadi 24,53 persen, dan sedikit meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 27,66 persen. Peningkatan ini menunjukkan indikasi derajat kesehatan penduduk lansia selama 3 tahun terakhir terus membaik. Peningkatan derajat kesehatan penduduk lansia ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Gambar 5.2.
Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, 2013 - 2015



Sumber: Susenas, 2013-2015

Pada Lampiran Tabel 5.2. dapat dilihat bahwa angka kesakitan penduduk lansia bervariasi pada masing-masing provinsi dengan persentase berkisar antara 13,18 persen-43,91

persen. Angka kesakitan penduduk lansia tertinggi terdapat di Kabupaten Sampang (43,91 persen), Kabupaten Bondowoso (36,12 persen), dan Kabupaten Bangkalan (36,01 persen). Sebaliknya, angka kesakitan terendah terjadi di Kota Mojokerto (13,18 persen), Kota Madiun (18,84 persen), dan Kabupaten Bojonegoro (19,40 persen).

5.3. Lama Sakit

Daya tahan tubuh dalam menangkal suatu jenis penyakit berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Waktu yang diperlukan seseorang dalam rangka proses penyembuhan sakitnya juga bervariasi. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan daya tahan tubuhnya sangat lemah, begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa daya tahan tubuh dapat mencerminkan berapa lama seseorang menderita sakit. Lamanya seseorang menderita sakit juga dapat menunjukkan intensitas atau derajat sakit serta bobot penyakit yang diderita seseorang. Semakin lama menderita sakit menunjukkan bahwa sakit yang dideritanya cukup parah, dan sebaliknya.

Tabel 5.1.
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah, 2015

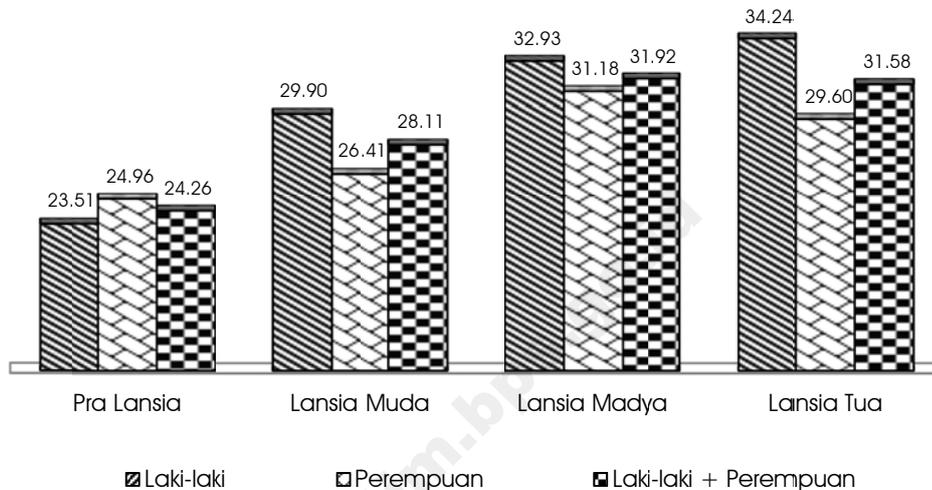
Lama Sakit (Hari)	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1-3	37,71	36,65	37,11
4-7	32,96	34,39	33,77
8-14	10,76	9,93	10,29
15-21	5,41	5,53	5,48
22-30	13,17	13,50	13,35
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas, 2015

Tabel 5.1 menyajikan persentase penduduk lansia yang menderita sakit menurut lamanya sakit dalam rentang waktu satu bulan. Tabel tersebut memberikan gambaran bahwa sebagian besar lansia mengalami sakit tidak lebih dari seminggu. Persentase penduduk lansia yang menderita sakit selama 1-3 hari sebesar 37,11 persen dan yang menderita sakit selama 4-7 hari sebesar 33,77 persen. Sisanya adalah mereka yang menderita sakit lebih dari seminggu (sekitar 8 sampai dengan 30 hari). Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun

daerah perdesaan. Persentase penduduk lansia perkotaan yang mengalami sakit selama 1-3 hari sebesar 37,71 persen dan yang sakit selama 4-7 hari sebesar 32,96 persen, sedangkan lansia perdesaan yang mengalami sakit selama 1-3 hari dan 4-7 hari masing-masing tercatat sebesar 36,65 persen dan 34,39 persen.

Gambar 5.3.
Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Gangguan Kesehatan Parah Selama Sebulan Terakhir Menurut Kelompok Lansia dan Jenis Kelamin, 2015



Sumber: Susenas, 2015

Berdasarkan tingkat keparahan gangguan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk lansia sebagaimana disajikan dalam Gambar 5.3, terlihat bahwa semakin tinggi umur lansia laki-laki kecenderungannya untuk mengalami gangguan kesehatan yang parah dibanding lansia perempuan juga semakin meningkat. Pada kelompok lansia muda, penduduk lansia laki-laki yang mengalami gangguan kesehatan parah sebanyak 29,90 persen, sedangkan lansia perempuan hanya sebanyak 23,51 persen. Kemudian pada kelompok lansia madya dan lansia tua proporsinya terus meningkat, berturut-turut sebanyak 32,93 persen dan 34,42 persen untuk lansia laki-laki serta 31,18 persen dan 29,60 persen untuk lansia perempuan.

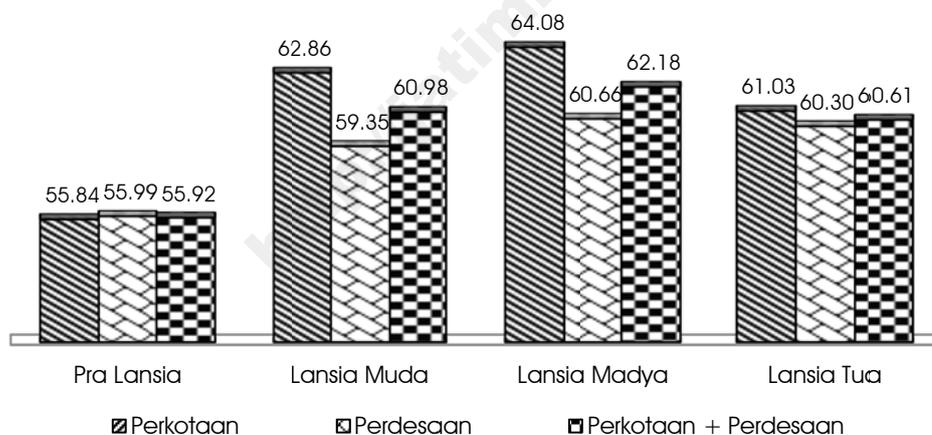
Pada Lampiran Tabel 5.3.3. dapat dilihat persentase lansia yang sakit menurut lama hari sakit dan kabupaten/kota. Pada kelompok lama sakit 1-3 hari, persentasenya berkisar antara 13,78-56,63 persen dan pada kelompok lama sakit 4-7 hari persentasenya berkisar antara 21,43-48,22 persen. Pada kelompok lama sakit lansia antara 1-3 hari, kabupaten/kota yang mempunyai persentase paling tinggi terdapat di Kota Surabaya (56,63 persen), Kabupaten Jember (51,92 persen), dan Kabupaten Gresik (44,74 persen). Sebaliknya, persentase terendah

terdapat di Kabupaten Kota Probolinggo (13,78 persen), Kabupaten Trenggalek (21,51 persen) dan Kabupaten Situbondo (28,11 persen). Pada kelompok lama sakit lansia antara 4-7 hari, kabupaten/kota yang memiliki persentase paling tinggi terdapat di Kabupaten Tuban (48,22 persen), Kota Probolinggo (48,00 persen) dan Kabupaten Probolinggo (43,14 persen). Sebaliknya, persentase terendah secara berturut-turut terdapat di Kota Madiun (21,43 persen), Kota Surabaya (23,05 persen) dan Kabupaten Malang (23,28 persen).

5.4. Cara Berobat

Tindakan seseorang untuk mencari berbagai cara pengobatan dalam upaya penyembuhan mencerminkan orang tersebut peduli akan kesehatannya. Cara pengobatan yang bisa dilakukan adalah dengan berobat jalan mendatangi pelayanan kesehatan, baik modern maupun tradisional/alternatif, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah pasien, maupun berobat sendiri.

Gambar 5.4.
Proporsi Penduduk Lansia yang Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015



Sumber: Susenas, 2015

Pada tahun 2015, sebagian besar lansia yang mengalami keluhan kesehatan memilih untuk berobat jalan dalam upaya mengatasi keluhan kesehatan mereka. Seperti pada Gambar 5.4 di atas, terlihat bahwa secara umum baik itu pada kelompok lansia muda, lansia madya, maupun lansia tua, telah lebih dari 60 persen melakukan berobat jalan. Namun demikian, terlihat bahwa proporsi lansia yang tinggal di perdesaan yang mengupayakan pengobatan dengan berobat jalan cenderung lebih sedikit dibanding para lansia yang tinggal di perkotaan. Hal ini dapat disebabkan karena fasilitas, sarana, dan prasarana kesehatan di perkotaan

cenderung lebih banyak pilihan dan lebih mudah untuk diakses oleh para lansia, sementara di perdesaan relatif terbatas.

Tabel 5.2.
Proporsi Penduduk Lansia yang Berobat Jalan
Menurut Tempat Berobat dan Tipe Daerah, 2015

Tempat Berobat	Penduduk Semua Umur		
	K	D	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit Pemerintah	7,38	3,44	5,32
Rumah Sakit Swasta	7,09	3,44	5,19
Praktek Dokter/Bidan	46,84	62,00	54,76
Klinik/Praktek Dokter Bersama	11,36	6,08	8,60
Puskesmas/Pustu	25,53	20,16	22,72
UKBM ¹	2,44	4,30	3,41
Praktek pengobatan tradisional/alternatif ²	1,50	1,88	1,70
Lainnya	2,13	3,17	2,67

Sumber : Susenas, 2015

Keterangan : ¹ Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan)

² Termasuk dukun bersalin

Seperti terlihat pada Tabel 5.2, secara umum baik itu di wilayah perkotaan maupun perdesaan, para lansia yang mengeluhkan kesehatannya cenderung akan berobat jalan ke praktek dokter/bidan atau puskesmas/pustu. Namun bagi lansia yang tinggal di daerah perkotaan terlihat memiliki alternatif tempat berobat yang lebih banyak seperti klinik/praktek dokter bersama dan rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta yang terlihat dari proporsi yang lebih besar dibanding mereka yang tinggal di perdesaan. Hal ini dapat dipahami mengingat penyelenggara rumah sakit maupun klinik cenderung akan menyediakan layanannya di tempat-tempat yang potensial baik dari sisi jumlah maupun dari sisi akses masyarakat ke tempat pengobatan tersebut. Sementara alternatif bagi lansia yang tinggal di perdesaan cenderung akan memilih UKBM, seperti puskesmas, polindes, dan sebagainya. Kondisi seperti ini tentunya perlu mendapat perhatian, apalagi jika dikaitkan kepada hak masyarakat khususnya lansia untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik lagi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasarana kesehatan maupun tenaga

medis yang disediakan oleh sebuah rumah sakit atau klinik tentunya memiliki kualitas yang jauh lebih baik dan lebih lengkap jika dibandingkan sarana dan prasarana yang mampu disediakan oleh fasilitas kesehatan sekelas puskesmas atau polindes.

Tabel 5.3.
Persentase Penduduk Lansia yang Tidak Berobat Jalan
Menurut Alasannya, 2015

Alasan Tidak Berobat Jalan	Kelompok Lansia				
	Pra Lansia	Lansia Muda	Lansia Madya	Lansia Tua	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)
Tidak punya biaya berobat	3,23	3,56	6,67	8,28	3,97
Tidak ada biaya transport	0,21	0,26	0,18	-	0,21
Tidak ada sarana transportasi	0,07	-	0,58	0,36	0,13
Waktu tunggu pelayanan lama	0,05	0,02	0,04	-	0,04
Mengobati sendiri	64,65	64,79	62,48	62,19	64,30
Tidak ada yang mendampingi	0,12	0,17	0,71	0,30	0,21
Merasa tidak perlu	28,88	27,46	24,96	24,78	27,87
Lainnya	2,79	3,74	4,38	4,08	3,27
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas, 2015

Berdasarkan informasi yang disajikan pada Gambar 5.3 sebelumnya, secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih ada sekitar hampir 40 persen lansia yang mengeluhkan kesehatannya namun tidak berobat jalan. Pada Tabel 5.3 di atas disajikan apa saja yang menjadikan alasan para lansia tersebut memilih untuk tidak berobat jalan. Dari Tabel 5.3 di atas terlihat bahwa 64,30 persen diantaranya menyatakan bahwa mereka tidak berobat jalan karena mereka memilih untuk mengobati keluhanannya tersebut secara mandiri atau mengobati sendiri. Selain itu, sebanyak 27,87 persen diantaranya menyatakan memang merasa tidak perlu untuk berobat jalan. Sedangkan mereka yang tidak berobat jalan dengan alasan tidak punya biaya berobat maupun tidak ada biaya transport tercatat sebanyak 4,18 persen. Mereka inilah yang semestinya menjadi prioritas utama dari pemerintah agar para lansia ini tetap memiliki akses menuju tempat pelayanan kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan mereka.

Kegiatan Ekonomi Penduduk Lansia

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan harus terampil dan berpengetahuan sesuai dengan perannya. Sebagai tujuan pembangunan, tenaga kerja harus menyadari bahwa semua ditujukan untuk meningkatkan derajat ketenagakerjaan di Indonesia secara luas. Peranan dan kedudukan tenaga kerja demikian mulianya, kalau seandainya manusia menyadari sepenuhnya tentang ketenagakerjaan tersebut.

Salah satu bagian dari penduduk adalah penduduk lansia. Penduduk lansia yang terlibat aktif dalam ketenagakerjaan merupakan penduduk lansia potensial yaitu penduduk lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Sehingga lansia potensial mampu mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Di sisi lain, secara normatif penduduk lansia merupakan kelompok penduduk yang seyogyanya tinggal menikmati masa tua tanpa harus bekerja. Kenyataannya masih banyak dijumpai lansia yang bekerja baik itu karena tuntutan hidup atau karena alasan lain.

Usaha pemberdayaan penduduk lansia merupakan salah satu usaha melatih kemandirian, baik dari aspek ekonomis, pemenuhan psikologi, sosial, budaya dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diarahkan agar lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lansia. Bagi penduduk lansia produktif, hak mendapatkan kesempatan kerja juga tercantum pada UU tersebut Bab III Pasal 5 Ayat (2)c. Selanjutnya pada Bab VI Pasal 15 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial untuk memberi peluang bagi pendayagunaan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya yang dilaksanakan pada sektor formal dan non

formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat.

Agar kebijakan ketenagakerjaan penduduk lansia dapat lebih terarah, maka pada bagian ini akan disajikan gambaran secara makro khusus mengenai kegiatan ekonomi penduduk lansia. Selain itu disajikan pula mengenai indikator ketenagakerjaan lansia yang mencakup partisipasi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), lapangan usaha, jumlah jam kerja dan besaran upah.

6.1 Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk dibedakan menjadi dua kelompok ketenagakerjaan, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk bukan usia kerja adalah penduduk yang berusia sampai dengan 15 tahun. Penduduk usia kerja ini juga dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk penganggur. Penganggur adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, atau mereka yang putus asa mencari pekerjaan dan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai atau melakukan aktivitas ekonomi baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (seperti pensiunan, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo/alasan yang lain).

Angkatan kerja lansia merupakan penduduk lansia yang bekerja dan mencari pekerjaan (penganggur). Penduduk lansia ini sering disebut penduduk lansia potensial. Mereka tergolong sebagai penduduk lansia yang produktif dan mandiri. Penduduk lansia yang potensial banyak ditemukan di negara berkembang dan negara-negara yang belum memiliki tunjangan sosial untuk hari tua. Mereka berusaha tetap bekerja dalam upaya memenuhi tuntutan hidup maupun mencukupi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Berdasarkan data hasil Sakernas Agustus 2015 pada Tabel 6.1, penduduk lansia di Jawa Timur masih banyak yang tergolong sebagai lansia produktif. Dari jumlah keseluruhan penduduk lansia, 51,33 persen diantaranya masih bekerja dan yang menganggur sebanyak 0,21 persen. Sedangkan sisanya yang melakukan kegiatan mengurus rumah tangga sebanyak 29,31 persen, dan yang melakukan kegiatan lainnya sebanyak 19,14 persen. Tingginya

partisipasi penduduk lansia yang bekerja antara lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, mengisi waktu luang, dan menjaga kesehatan badan melalui aktifitas rutin.

Tabel 6.1.
Persentase Penduduk Bukan Lansia dan Penduduk Lansia
Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenis Kegiatan Utama
Seminggu Terakhir, 2015

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Bekerja	Penganggur	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
A. Penduduk Bukan Lansia						
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	80,36	5,21	10,49	1,44	2,50	100,00
Perempuan (P)	51,36	3,25	10,30	33,84	1,25	100,00
L + P	65,77	4,22	10,40	17,74	1,87	100,00
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	84,48	3,39	7,90	1,09	3,13	100,00
Perempuan (P)	53,58	2,24	7,44	35,35	1,39	100,00
L + P	68,73	2,81	7,67	18,56	2,24	100,00
K + D						
Laki-laki (L)	82,34	4,33	9,25	1,27	2,81	100,00
Perempuan (P)	52,44	2,76	8,91	34,58	1,31	100,00
L + P	67,20	3,54	9,07	18,14	2,05	100,00
B. Penduduk Lansia						
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	58,62	0,46	-	15,49	25,44	100,00
Perempuan (P)	32,21	0,23	-	50,80	16,75	100,00
L + P	44,44	0,34	-	34,45	20,77	100,00
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	75,44	0,14	-	6,36	18,06	100,00
Perempuan (P)	42,58	0,05	-	39,98	17,38	100,00
L + P	57,49	0,09	-	24,73	17,69	100,00
K + D						
Laki-laki (L)	67,42	0,29	-	10,71	21,58	100,00
Perempuan (P)	37,73	0,14	-	45,04	17,09	100,00
L + P	51,33	0,21	-	29,31	19,14	100,00

Sumber: Sakernas, 2015

Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, proporsi lansia yang bekerja di daerah perdesaan (57,49 persen) lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan (44,44 persen). Hal ini terjadi karena umumnya penduduk lansia yang berada di daerah perdesaan mempunyai tingkat ekonomi yang lebih rendah dibandingkan lansia di perkotaan, sehingga mereka harus tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Selain itu, umumnya pekerjaan di perdesaan bersifat informal yang tidak memerlukan persyaratan khusus, sedangkan di perkotaan lebih banyak pekerjaan yang bersifat formal sehingga diperlukan

beberapa persyaratan yang umumnya tidak dapat dipenuhi oleh penduduk lansia, seperti faktor umur dan pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan jika dilihat menurut jenis kelamin, mayoritas penduduk lansia yang bekerja adalah lansia laki-laki (67,42 persen), sedangkan lansia perempuan lebih banyak yang mengurus rumah tangga (45,04 persen). Walaupun demikian, penduduk lansia perempuan yang bekerja tergolong cukup tinggi juga, yaitu mencapai 37,73 persen.

Pada Tabel 6.1 disajikan juga kegiatan yang dilakukan oleh penduduk bukan lansia (umur 15-59 tahun), di mana mayoritas penduduk pada kelompok ini yang melakukan kegiatan bekerja sebanyak 67,20 persen. Proporsi penduduk bukan lansia yang bekerja tercatat lebih besar proporsinya bila dibandingkan dengan penduduk lansia. Hal ini sangat wajar mengingat penduduk bukan lansia adalah golongan usia produktif. Pada usia tersebut sebagian besar mereka cenderung untuk bekerja karena lebih bertanggung jawab terhadap perekonomian rumah tangga ataupun sekedar membantu menambah penghasilan rumah tangganya.

Selain bekerja, Jenis kegiatan yang juga termasuk dalam angkatan kerja adalah penganggur. Persentase lansia yang menganggur tercatat sangat rendah yaitu hanya sekitar 0,21 persen. Rendahnya persentase lansia yang menganggur disebabkan karena para lansia hanya akan terjun ke pasar kerja jika peluang untuk memperoleh pekerjaan sangatlah besar mengingat banyak sekali keterbatasan baik fisik maupun non fisik bagi mereka untuk dapat aktif bekerja. Oleh karena itu, bagi lansia yang sudah lemah fisiknya cenderung hanya melakukan kegiatan lain yang termasuk ke dalam bukan angkatan kerja. Sedangkan pada kelompok penduduk bukan lansia, proporsi penduduk yang menganggur jauh lebih banyak, yaitu 3,54 persen dari keseluruhan angkatan kerja pada kelompok ini. Hal ini sebagai konsekuensi dari tingginya persaingan di antara mereka untuk memperoleh pekerjaan.

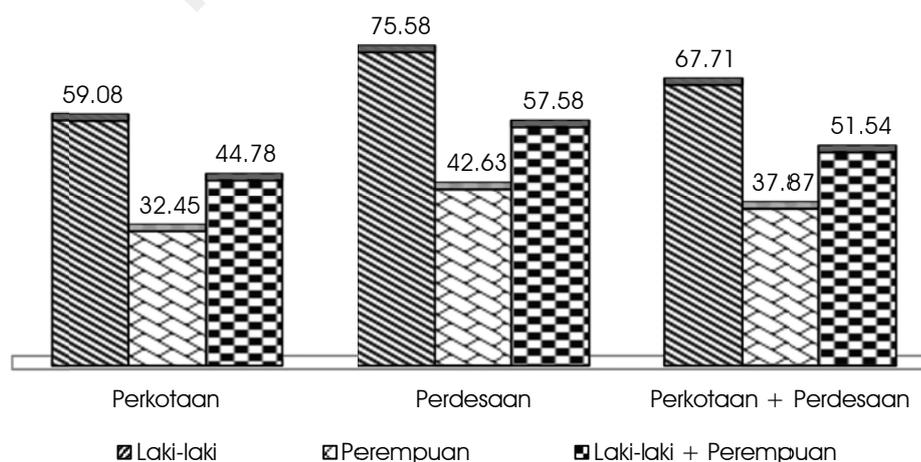
Disisi lain, Tabel 6.1 juga menampilkan gambaran mengenai kegiatan penduduk lansia yang bukan angkatan kerja yaitu mereka yang mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya. Dari kedua kegiatan tersebut, lansia yang melakukan kegiatan mengurus rumah tangga sedikit lebih tinggi persentasenya (29,31 persen) dibandingkan lansia yang melakukan kegiatan lainnya (19,14 persen). Kegiatan lainnya yang dimaksud dalam hal ini mencakup berbagai kegiatan selain kegiatan bekerja, mencari pekerjaan, dan mengurus rumah tangga. Kegiatan lainnya pada lansia mencakup antara lain kegiatan santai, rekreasi, olahraga, hiburan, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan yang antara lain berupa kegiatan pengajian atau kebaktian serta kegiatan kemasyarakatan. Sedangkan persentase penduduk bukan lansia yang melakukan kegiatan lainnya hanya sebesar 2,05 persen, meliputi kegiatan olahraga, kursus, hiburan dan sejenisnya termasuk kegiatan bersekolah. Proporsi penduduk lansia yang

melakukan kegiatan lainnya lebih besar daripada penduduk bukan lansia karena sebagian besar lansia masuk ke dalam kelompok penduduk non produktif. Secara fisik kondisi lansia juga sudah melemah sehingga banyak dari mereka yang melakukan kegiatan lainnya dibandingkan penduduk pada umumnya.

6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja. Pada kelompok lansia, TPAK merupakan proporsi penduduk lansia yang terlibat kegiatan ekonomi, yaitu proporsi lansia yang bekerja dan lansia yang mencari kerja terhadap penduduk lansia itu sendiri. Pada tahun 2015, penduduk lansia yang masih aktif di dalam kegiatan ekonomi relatif cukup besar. Hal ini tercermin dari TPAK penduduk lansia sebesar 51,54 persen, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.1. Tingginya TPAK penduduk lansia terutama terlihat di daerah perdesaan yaitu sebesar 57,58 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 44,78 persen. Bila ditinjau menurut jenis kelamin, TPAK penduduk lansia laki-laki hampir dua kali lebih tinggi dibanding TPAK penduduk lansia perempuan (67,71 persen berbanding 37,87 persen). Hal ini terjadi karena umumnya laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang harus bekerja sedang perempuan sebagai ibu rumah tangga yang biasanya mengurus rumah tangga.

Gambar 6.1.
TPAK Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2015



Sumber: Sakernas, 2015

TPAK penduduk lansia pada masing-masing kabupaten/kota bervariasi dengan persentase berkisar antara 33,55-67,88 persen, seperti yang ditunjukkan pada Lampiran Tabel 6.1. Tiga kabupaten/kota yang memiliki TPAK penduduk lansia tertinggi adalah Kabupaten Trenggalek (67,88 persen), Kabupaten Pacitan (67,70 persen) dan Kabupaten Sumenep (64,75 persen). Sementara itu, tiga kabupaten/kota yang memiliki TPAK penduduk lansia terendah adalah Kota Gresik (33,55 persen), Kota Madiun (34,25 persen) dan Kota Malang (35,90 persen).

6.3. Lapangan Usaha

Lapangan usaha menunjukkan bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha dimana seseorang bekerja. Lapangan usaha mencakup banyak sektor, namun ulasan pada bab ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu pertanian (*Agriculture*), industri (*Manufacturing*), dan jasa (*Service*). Kelompok lapangan usaha pertanian mencakup sektor pertanian, kelompok industri mencakup sektor pertambangan/penggalian, industri, listrik/gas/air, dan konstruksi, sedangkan kelompok jasa terdiri dari sektor perdagangan, transportasi/komunikasi, keuangan, jasa dan lainnya.

Tabel 6.2 menyajikan persentase pekerja penduduk 15 tahun ke atas dan pekerja lansia berdasarkan kelompok lapangan usaha. Dari tiga kelompok sektor yang ada, sebagian besar penduduk lansia bekerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 62,12 persen. Sementara itu, penduduk lansia yang bekerja di sektor jasa sebanyak 28,37 persen dan sebagian kecilnya bekerja di sektor industri (9,52 persen). Hal ini menggambarkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan bagi sebagian besar pekerja lansia untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Tingginya persentase penduduk lansia yang bekerja di sektor pertanian antara lain terkait dengan tingkat pendidikan penduduk lansia yang pada umumnya masih rendah. Lapangan pekerjaan sektor pertanian terbuka untuk semua kalangan dan tanpa prasyarat pendidikan. Sedangkan pada kelompok penduduk bukan lansia, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 6.2, pada umumnya penduduk bukan lansia di Jawa Timur (berumur 15-59 tahun) memiliki struktur yang sedikit berbeda dengan penduduk lansia di mana mereka cenderung bekerja di sektor jasa (42,59 persen), kemudian di sektor pertanian (33,10 persen), dan selebihnya bekerja di sektor industri (24,30 persen).

Pada Tabel 6.2 juga ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola struktur lapangan usaha penduduk lansia yang bertempat tinggal di daerah perkotaan dengan yang bertempat tinggal di perdesaan. Di daerah perkotaan, mayoritas lansia bekerja di sektor jasa sebesar 48,57 persen, sedangkan lansia yang bekerja di sektor pertanian dan industri masing-masing

sebesar 39,03 persen dan 12,40 persen. Sedangkan di daerah pedesaan 78,06 persen lansia bekerja pada sektor pertanian dan sisanya sebesar 14,42 persen bekerja pada sektor jasa dan 7,52 persen pada sektor industri. Terdapat perbedaan pola struktur lapangan usaha penduduk lansia dan penduduk bukan lansia khususnya yang bertempat tinggal di daerah perkotaan. Selain yang bekerja di sektor jasa, penduduk lansia yang bertempat tinggal di perkotaan cenderung melakukan pekerjaan yang terkait sektor pertanian (39,03 persen). Sedangkan pada kelompok bukan lansia, kecenderungannya lebih banyak yang bekerja di sektor industri (29,01 persen).

Tabel 6.2.
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas dan Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2015

Kelompok Lapangan Usaha	Penduduk Bukan Lansia			Penduduk Lansia		
	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K + D	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian (A)	13,80	52,72	33,10	39,03	78,06	62,12
Industri (M)	29,01	19,52	24,30	12,40	7,52	9,52
Jasa (S)	57,19	27,76	42,59	48,57	14,42	28,37
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas, 2015

Lampiran Tabel 6.2.3 menyajikan struktur pekerjaan penduduk lansia pada setiap kabupaten/kota. Pola struktur pekerjaan penduduk lansia di Kota Batu dan hampir keseluruhan daerah kabupaten kecuali Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kondisi yang serupa dengan pola Jawa Timur di mana sektor pertanian mendominasi lapangan usaha pekerja lansia (berkisar antara 46,45-85,92 persen). Sedangkan di Kabupaten Sidoarjo dan hampir seluruh wilayah kota selain Kota Batu, penduduk lansia yang masih aktif di pasar kerja cenderung bekerja di sektor jasa dibandingkan sektor pertanian, yaitu berkisar antara 52,62-84,68 persen.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar penduduk lansia terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dalam memasuki pasar kerja penduduk lansia kalah bersaing dengan penduduk yang lebih muda dan berpendidikan tinggi. Hal ini terjadi karena persentase penduduk lansia yang berpendidikan rendah relatif tinggi (Lihat Bab 4 tentang Pendidikan Penduduk Lansia). Oleh sebab itu, mayoritas lansia hanya

dapat bekerja pada sektor pekerjaan yang tidak menuntut pendidikan tinggi seperti pada sektor pertanian. Keadaan ini tercermin pada Tabel 6.3, yaitu pada kelompok penduduk lansia terlihat sangat didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan hanya tamat SD ke bawah. Tentunya hal tersebut akan berimplikasi pada pilihan pekerjaan yang cenderung tidak mensyaratkan pekerjaanya memiliki kualitas yang tinggi seperti sektor pertanian. Sedangkan pada kelompok bukan lansia, sangat terlihat jelas tentang bagaimana peran pendidikan sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan pekerjaan yang dapat dipilih oleh si tenaga kerja. Tabel 6.3 memberikan gambaran bahwa pada mereka yang berpendidikan rendah (cenderung akan memilih pekerjaan di sektor pertanian karena sektor ini tidak memberikan persyaratan khusus bagi siapa saja yang ingin masuk di dalamnya walaupun nilai tambahnya relatif kecil. Sedangkan pada kelompok yang berpendidikan tinggi terlihat lebih banyak memiliki pilihan untuk bekerja di sektor lain seperti jasa-jasa maupun pertanian.

Tabel 6.3.
Persentase Penduduk Bukan Lansia dan Penduduk Lansia yang Bekerja
Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan
dan Kelompok Lapangan Usaha, 2015

Kelompok Penduduk	SD ke Bawah	SMP	SLTA ke Atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Penduduk Bukan Lansia				
Pertanian (A)	71,27	18,58	10,15	100,00
Industri (M)	35,93	24,61	39,46	100,00
Jasa-jasa (S)	27,45	18,77	53,77	100,00
Jumlah	44,02	20,13	35,85	100,00
B. Penduduk Lansia				
Pertanian (A)	94,02	3,30	2,68	100,00
Industri (M)	85,55	6,38	8,06	100,00
Jasa-jasa (S)	74,03	10,96	15,01	100,00
Jumlah	87,54	5,76	6,69	100,00

Sumber: Sakernas, 2015

6.4. Status Pekerjaan

Jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan disebut sebagai status pekerjaan. Pada Tabel 6.4 disajikan persentase penduduk lansia yang bekerja menurut status pekerjaan. Secara umum dari keseluruhan jumlah penduduk lansia yang bekerja, sebagian besar lansia bekerja dengan status berusaha dibantu buruh yaitu sebesar 43,37 persen, selanjutnya disusul oleh penduduk lansia yang berusaha sendiri sebesar 21,99 persen dan yang bekerja dengan tidak

dibayar sebesar 13,82 persen. Sementara itu, penduduk lansia yang bekerja dengan status pekerjaan lainnya masing-masing sebagai pekerja bebas sebesar 12,24 persen, dan sebagai buruh/karyawan sebesar 8,57 persen.

Banyaknya penduduk lansia yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh terlihat jelas di daerah perdesaan. Dari total penduduk lansia di perdesaan yang bekerja, hampir separuhnya (48,84 persen) berusaha dibantu buruh. Pola ini juga berlaku pada penduduk lansia di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan lansia yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh sebesar 35,44 persen, diikuti yang berusaha sendiri sebesar 26,31 persen. Di daerah perkotaan lansia yang bekerja sebagai buruh/karyawan (14,86 persen) lebih besar dibandingkan di perdesaan (4,24 persen), sedangkan lansia yang bekerja sebagai pekerja tidak dibayar di daerah perdesaan (16,12 persen) lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (10,48 persen). Umumnya mereka adalah para lansia yang membantu pekerjaan suami/keluarganya di sektor pertanian atau pada usaha keluarga lainnya. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, persentase lansia yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh lebih didominasi oleh lansia laki-laki yaitu sebesar 55,13 persen. Pola yang sama terjadi baik di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan.

Tabel 6.4.
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan, 2015

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Buruh / Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	20,93	42,30	17,87	14,79	4,10	100,00
Perempuan (P)	34,74	24,69	10,13	9,97	20,48	100,00
L + P	26,31	35,44	14,86	12,91	10,48	100,00
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	15,01	64,21	4,74	12,50	3,54	100,00
Perempuan (P)	24,91	26,23	3,49	10,73	34,65	100,00
L + P	19,02	48,84	4,24	11,78	16,12	100,00
K + D						
Laki-laki (L)	17,47	55,13	10,19	13,45	3,77	100,00
Perempuan (P)	28,83	25,61	6,14	10,42	28,99	100,00
L + P	21,99	43,37	8,57	12,24	13,82	100,00

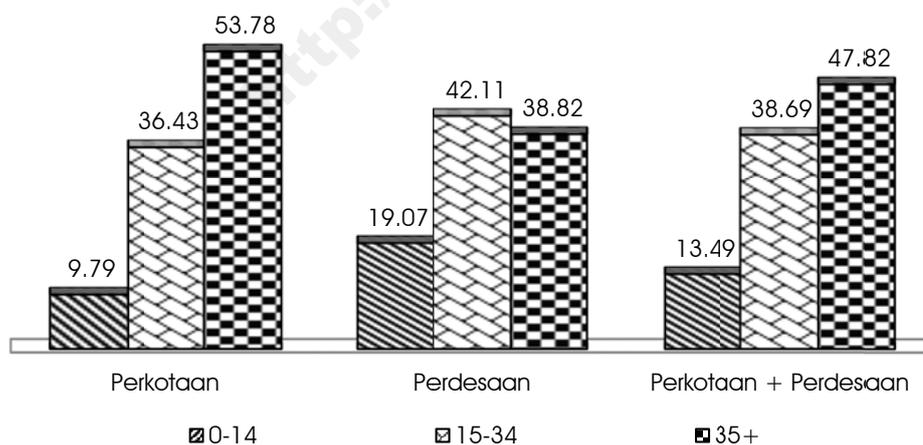
Sumber: Sakernas, 2015

Struktur penduduk lansia yang bekerja menurut status pekerjaan menurut kabupaten/kota menunjukkan pola dan struktur yang relatif sama dengan pola dan struktur di Jawa Timur, yaitu mayoritas penduduk lansia bekerja dengan status berusaha dibantu buruh seperti yang ditunjukkan pada Lampiran Tabel 6.4.3.

6.5. Jumlah Jam Kerja

Produktivitas seseorang dalam bekerja dapat dilihat melalui jumlah jam kerja yang ditekuninya. Seyogianya, penduduk lansia yang bekerja dapat bekerja dengan jam kerja hanya paruh waktu mengingat kondisi fisik yang mulai melemah. Namun pada kenyataannya masih banyak lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh atau jumlah jam kerja 35 jam ke atas selama seminggu terakhir. Gambar 6.2 menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk lansia yang bekerja, kurang dari separuhnya (47,82 persen) yang bekerja dengan jam kerja penuh atau jumlah jam kerja 35 jam ke atas selama seminggu terakhir. Sementara itu, penduduk lansia yang bekerja dengan jumlah jam kerja antara 15-34 jam seminggu sebesar 38,69 persen dan mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam seminggu hanya sebesar 13,49 persen.

Gambar 6.2.
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Tipe Daerah dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, 2015



Sumber: Sakernas, 2015

Persentase lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh di daerah perkotaan (53,78 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (38,82 persen). Sebaliknya, persentase lansia yang bekerja dengan jam kerja selama 0-14 jam dan 15-34 jam per minggu di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini sesuai dengan sektor

dominan di perdesaan adalah pertanian yang tidak mempunyai target waktu kerja per hari seperti sektor formal (jasa dan industri).

Bila dilihat menurut jenis kelamin, tingkat produktivitas pekerja lansia laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan lansia perempuan, hal ini tercermin dari lebih rendahnya proporsi lansia perempuan yang bekerja di atas jam kerja normal (lebih dari 35 jam). Tabel 6.5 menunjukkan bahwa , pekerja lansia laki-laki yang bekerja dengan jam kerja penuh mencapai 53,78 persen, sedangkan pekerja lansia perempuan persentasenya hanya sebesar 38,82 persen.

Sebaliknya, persentase penduduk lansia perempuan yang bekerja dengan jumlah jam kerja 0-14 jam dan 15-34 jam lebih tinggi dibandingkan penduduk lansia laki-laki. Persentase penduduk lansia perempuan yang bekerja dengan jumlah jam kerja 0-14 jam sebesar 19,07 persen dan jumlah jam kerja 15-34 jam sebesar 42,11 persen. Sementara itu, penduduk lansia laki-laki yang bekerja 0-14 jam sebesar 9,79 persen dan yang bekerja 15-34 jam sebesar 36,43 persen.

Tabel 6.5.
Persentase Penduduk Bukan Lansia dan Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin, 2015

Jumlah Jam Kerja	Penduduk Bukan Lansia			Penduduk Lansia		
	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14	4,18	11,89	7,22	9,79	19,07	13,49
15-34	18,67	31,44	23,71	36,43	42,11	38,69
35 +	77,16	56,67	69,06	53,78	38,82	47,82
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas, 2015

Halaman ini sengaja dikosongkan...

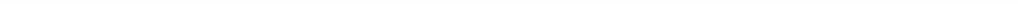
<http://jatim.bps.go.id>

Lampiran

<http://jatim.bps.go.id>



<http://jatim.bps.go.id>



Tabel 3.1.1.
Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia
Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, 2015

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur					Laki-laki
	45-54	55-59	60-69	70-79	80+	60+
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Pacitan	17,11	5,85	9,32	4,89	1,99	16,20
02. Ponorogo	14,90	7,02	9,24	4,48	1,53	15,25
03. Trenggalek	16,68	6,23	8,40	3,97	1,80	14,17
04. Tulungagung	13,24	5,78	7,93	3,92	1,37	13,22
05. Blitar	14,62	6,38	8,17	4,09	1,86	14,12
06. Kediri	13,69	5,16	7,16	3,70	0,72	11,59
07. Malang	13,72	5,63	6,95	3,11	1,14	11,20
08. Lumajang	15,36	6,20	7,88	2,59	1,25	11,72
09. Jember	14,04	4,45	7,57	3,10	0,79	11,46
10. Banyuwangi	12,64	5,82	8,33	3,68	0,77	12,77
11. Bondowoso	15,10	5,45	8,40	2,94	1,08	12,43
12. Situbondo	13,96	6,66	7,80	2,54	0,89	11,23
13. Probolinggo	13,43	5,65	6,74	2,64	0,57	9,96
14. Pasuruan	13,41	4,47	5,20	1,85	0,52	7,58
15. Sidoarjo	13,21	4,07	4,21	1,76	0,29	6,25
16. Mojokerto	14,15	4,56	6,18	2,53	0,55	9,26
17. Jombang	13,43	5,05	6,51	2,40	1,31	10,22
18. Nganjuk	14,64	5,34	7,81	3,50	1,01	12,32
19. Madiun	16,02	6,63	8,77	4,13	1,33	14,23
20. Magetan	14,90	7,79	9,60	4,61	1,76	15,97
21. Ngawi	15,25	7,31	8,84	3,71	1,42	13,98
22. Bojonegoro	15,42	6,23	7,23	3,47	0,87	11,57
23. Tuban	13,58	6,44	6,37	2,87	0,66	9,91
24. Lamongan	15,89	6,03	7,31	3,05	0,94	11,30
25. Gresik	12,67	4,80	4,97	1,82	0,54	7,33
26. Bangkalan	10,79	4,72	5,96	2,90	0,83	9,69
27. Sampang	11,39	4,15	5,29	1,76	0,91	7,97
28. Pamekasan	12,83	4,26	5,40	1,99	0,60	7,99
29. Sumenep	14,93	6,21	7,49	2,66	0,67	10,81
71. Kota Kediri	13,00	6,50	5,71	2,20	0,80	8,71
72. Kota Blitar	13,64	5,60	6,60	2,96	1,01	10,56
73. Kota Malang	12,20	5,03	5,72	1,95	0,91	8,57
74. Kota Probolinggo	14,66	4,29	5,59	2,22	0,27	8,08
75. Kota Pasuruan	12,37	4,98	4,88	1,97	0,24	7,08
76. Kota Mojokerto	13,00	5,95	5,42	2,34	0,41	8,17
77. Kota Madiun	15,60	5,25	7,14	3,30	0,59	11,03
78. Kota Surabaya	12,53	4,98	5,12	1,79	0,43	7,34
79. Kota Batu	13,71	5,62	6,11	2,89	0,95	9,95
Jawa Timur	13,83	5,44	6,82	2,88	0,90	10,60

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 3.1.2.
Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia
Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, 2015

Perempuan

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur					60+
	45-54	55-59	60-69	70-79	80+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Pacitan	15,99	6,26	9,58	6,74	2,42	18,74
02. Ponorogo	15,24	6,38	9,33	5,56	3,02	17,91
03. Trenggalek	16,14	5,39	8,26	4,90	2,21	15,37
04. Tulungagung	15,61	5,17	7,44	4,98	1,56	13,98
05. Blitar	15,60	6,18	8,09	4,66	2,47	15,21
06. Kediri	14,83	5,35	7,11	4,41	1,54	13,05
07. Malang	14,27	5,39	7,21	4,33	1,36	12,90
08. Lumajang	14,63	6,08	7,83	3,64	1,56	13,03
09. Jember	12,81	5,77	7,48	3,81	1,43	12,72
10. Banyuwangi	13,52	6,20	8,29	4,32	1,50	14,11
11. Bondowoso	16,13	4,78	9,19	4,71	1,41	15,30
12. Situbondo	15,61	5,86	8,23	3,80	1,50	13,54
13. Probolinggo	13,08	5,06	7,00	3,52	1,47	11,99
14. Pasuruan	13,40	4,31	5,70	3,06	0,62	9,37
15. Sidoarjo	13,71	3,43	4,39	2,24	0,69	7,33
16. Mojokerto	14,46	4,32	6,36	3,76	0,51	10,62
17. Jombang	14,35	4,34	6,87	3,94	1,37	12,19
18. Nganjuk	15,93	5,46	7,95	4,03	2,05	14,03
19. Madiun	16,02	6,69	8,74	5,65	2,09	16,49
20. Magetan	15,84	6,85	9,61	6,26	3,24	19,11
21. Ngawi	14,89	7,23	8,92	5,29	1,74	15,95
22. Bojonegoro	15,29	5,06	7,23	4,72	1,59	13,53
23. Tuban	14,22	4,73	6,80	4,24	1,49	12,54
24. Lamongan	15,56	5,91	7,49	4,57	1,51	13,57
25. Gresik	14,37	4,31	5,40	2,44	1,18	9,01
26. Bangkalan	12,62	4,83	6,73	4,04	1,16	11,93
27. Sampang	12,32	4,15	5,92	2,58	1,21	9,72
28. Pamekasan	14,30	3,67	5,80	3,02	1,25	10,07
29. Sumenep	14,58	5,32	8,28	3,86	1,30	13,43
71. Kota Kediri	15,80	5,15	6,11	3,26	1,20	10,57
72. Kota Blitar	16,16	5,41	6,73	3,79	1,70	12,21
73. Kota Malang	13,93	4,91	5,84	3,34	0,83	10,01
74. Kota Probolinggo	14,37	3,86	5,75	3,40	0,59	9,74
75. Kota Pasuruan	15,04	3,90	5,01	2,39	1,32	8,72
76. Kota Mojokerto	15,49	4,71	5,97	3,08	1,18	10,23
77. Kota Madiun	14,74	6,39	7,80	4,08	2,10	13,98
78. Kota Surabaya	13,69	4,24	4,95	2,16	0,80	7,92
79. Kota Batu	14,76	4,53	6,12	4,02	0,94	11,08
Jawa Timur	14,39	5,13	7,00	3,88	1,42	12,30

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 3.1.3.
Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia
Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, 2015

Laki-laki + Perempuan

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur					60+
	45-54	55-59	60-69	70-79	80+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Pacitan	16,54	6,06	9,45	5,84	2,21	17,50
02. Ponorogo	15,07	6,70	9,28	5,02	2,28	16,58
03. Trenggalek	16,41	5,80	8,33	4,44	2,01	14,77
04. Tulungagung	14,45	5,47	7,68	4,46	1,47	13,61
05. Blitar	15,11	6,28	8,13	4,37	2,17	14,67
06. Kediri	14,26	5,25	7,14	4,05	1,13	12,32
07. Malang	13,99	5,51	7,08	3,72	1,25	12,05
08. Lumajang	14,99	6,14	7,85	3,12	1,41	12,39
09. Jember	13,41	5,12	7,53	3,46	1,11	12,10
10. Banyuwangi	13,08	6,01	8,31	4,00	1,13	13,45
11. Bondowoso	15,63	5,11	8,80	3,85	1,25	13,90
12. Situbondo	14,81	6,25	8,02	3,19	1,20	12,41
13. Probolinggo	13,25	5,35	6,88	3,09	1,03	11,00
14. Pasuruan	13,40	4,39	5,45	2,46	0,57	8,48
15. Sidoarjo	13,45	3,75	4,30	2,00	0,49	6,79
16. Mojokerto	14,31	4,44	6,27	3,14	0,53	9,94
17. Jombang	13,89	4,69	6,69	3,18	1,34	11,21
18. Nganjuk	15,28	5,40	7,88	3,77	1,53	13,18
19. Madiun	16,02	6,66	8,76	4,90	1,72	15,38
20. Magetan	15,39	7,31	9,61	5,46	2,52	17,58
21. Ngawi	15,07	7,27	8,88	4,52	1,58	14,98
22. Bojonegoro	15,35	5,64	7,23	4,10	1,23	12,56
23. Tuban	13,90	5,58	6,59	3,56	1,08	11,24
24. Lamongan	15,72	5,97	7,40	3,83	1,23	12,47
25. Gresik	13,53	4,55	5,19	2,13	0,86	8,18
26. Bangkalan	11,75	4,78	6,36	3,50	1,00	10,86
27. Sampang	11,87	4,15	5,62	2,18	1,07	8,87
28. Pamekasan	13,59	3,96	5,61	2,52	0,94	9,06
29. Sumenep	14,75	5,75	7,90	3,29	1,00	12,18
71. Kota Kediri	14,40	5,82	5,91	2,73	1,00	9,64
72. Kota Blitar	14,91	5,50	6,66	3,38	1,36	11,40
73. Kota Malang	13,08	4,97	5,78	2,65	0,87	9,30
74. Kota Probolinggo	14,51	4,08	5,67	2,82	0,43	8,92
75. Kota Pasuruan	13,71	4,44	4,95	2,18	0,78	7,91
76. Kota Mojokerto	14,27	5,32	5,70	2,72	0,80	9,21
77. Kota Madiun	15,15	5,84	7,48	3,70	1,37	12,55
78. Kota Surabaya	13,12	4,60	5,03	1,98	0,62	7,63
79. Kota Batu	14,23	5,08	6,12	3,45	0,95	10,51
Jawa Timur	14,11	5,28	6,92	3,39	1,16	11,46

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 3.2.
Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2015

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pacitan	26,19	30,37	28,33
02. Ponorogo	24,15	29,09	26,59
03. Trenggalek	22,22	23,47	22,86
04. Tulungagung	21,05	22,17	21,63
05. Blitar	22,76	24,28	23,52
06. Kediri	18,10	20,89	19,47
07. Malang	17,44	20,48	18,93
08. Lumajang	18,20	20,31	19,28
09. Jember	17,93	20,08	19,02
10. Banyuwangi	20,30	22,42	21,37
11. Bondowoso	19,33	23,92	21,68
12. Situbondo	17,15	20,59	18,92
13. Probolinggo	15,44	18,52	17,02
14. Pasuruan	11,30	14,21	12,76
15. Sidoarjo	9,13	10,77	9,94
16. Mojokerto	14,20	16,19	15,20
17. Jombang	15,93	19,43	17,67
18. Nganjuk	19,69	22,22	20,97
19. Madiun	22,73	26,70	24,73
20. Magetan	25,80	31,46	28,68
21. Ngawi	22,30	25,20	23,79
22. Bojonegoro	17,44	20,67	19,06
23. Tuban	14,99	19,08	17,05
24. Lamongan	17,49	20,88	19,24
25. Gresik	11,12	13,47	12,32
26. Bangkalan	16,16	19,44	17,90
27. Sampang	13,02	15,54	14,33
28. Pamekasan	12,35	15,31	13,89
29. Sumenep	16,30	20,25	18,37
71. Kota Kediri	13,20	15,83	14,53
72. Kota Blitar	16,56	18,95	17,77
73. Kota Malang	12,27	14,52	13,40
74. Kota Probolinggo	12,42	15,23	13,83
75. Kota Pasuruan	11,03	13,31	12,19
76. Kota Mojokerto	12,39	15,81	14,11
77. Kota Madiun	16,64	21,46	19,11
78. Kota Surabaya	10,60	11,36	10,99
79. Kota Batu	15,34	17,25	16,28
Jawa Timur	16,35	19,02	17,70

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 3.3.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2015

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pacitan	16,20	18,74	17,50
02. Ponorogo	15,25	17,91	16,58
03. Trenggalek	14,17	15,37	14,77
04. Tulungagung	13,22	13,98	13,61
05. Blitar	14,12	15,21	14,67
06. Kediri	11,59	13,05	12,32
07. Malang	11,20	12,90	12,05
08. Lumajang	11,72	13,03	12,39
09. Jember	11,46	12,72	12,10
10. Banyuwangi	12,77	14,11	13,45
11. Bondowoso	12,43	15,30	13,90
12. Situbondo	11,23	13,54	12,41
13. Probolinggo	9,96	11,99	11,00
14. Pasuruan	7,58	9,37	8,48
15. Sidoarjo	6,25	7,33	6,79
16. Mojokerto	9,26	10,62	9,94
17. Jombang	10,22	12,19	11,21
18. Nganjuk	12,32	14,03	13,18
19. Madiun	14,23	16,49	15,38
20. Magetan	15,97	19,11	17,58
21. Ngawi	13,98	15,95	14,98
22. Bojonegoro	11,57	13,53	12,56
23. Tuban	9,91	12,54	11,24
24. Lamongan	11,30	13,57	12,47
25. Gresik	7,33	9,01	8,18
26. Bangkalan	9,69	11,93	10,86
27. Sampang	7,97	9,72	8,87
28. Pamekasan	7,99	10,07	9,06
29. Sumenep	10,81	13,43	12,18
71. Kota Kediri	8,71	10,57	9,64
72. Kota Blitar	10,56	12,21	11,40
73. Kota Malang	8,57	10,01	9,30
74. Kota Probolinggo	8,08	9,74	8,92
75. Kota Pasuruan	7,08	8,72	7,91
76. Kota Mojokerto	8,17	10,23	9,21
77. Kota Madiun	11,03	13,98	12,55
78. Kota Surabaya	7,34	7,92	7,63
79. Kota Batu	9,95	11,08	10,51
Jawa Timur	10,60	12,30	11,46

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 3.4.1.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan, 2015

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	0,35	85,09	1,21	13,34	100,00
02. Ponorogo	1,09	82,95	0,49	15,46	100,00
03. Trenggalek	0,55	89,89	1,11	8,45	100,00
04. Tulungagung	0,70	85,06	1,29	12,94	100,00
05. Blitar	0,80	80,84	2,01	16,35	100,00
06. Kediri	0,35	78,97	3,42	17,26	100,00
07. Malang	0,77	84,05	2,35	12,84	100,00
08. Lumajang	0,64	80,40	1,93	17,04	100,00
09. Jember	0,42	79,50	2,07	18,02	100,00
10. Banyuwangi	0,37	81,80	3,48	14,36	100,00
11. Bondowoso	-	88,01	-	11,99	100,00
12. Situbondo	-	79,99	0,55	19,46	100,00
13. Probolinggo	0,68	86,24	-	13,08	100,00
14. Pasuruan	1,30	79,73	0,42	18,55	100,00
15. Sidoarjo	-	83,25	-	16,75	100,00
16. Mojokerto	0,91	85,12	0,45	13,53	100,00
17. Jombang	0,56	81,94	0,95	16,55	100,00
18. Nganjuk	0,92	81,00	2,56	15,52	100,00
19. Madiun	0,52	82,96	1,51	15,00	100,00
20. Magetan	0,43	81,75	0,89	16,93	100,00
21. Ngawi	-	85,24	2,18	12,58	100,00
22. Bojonegoro	-	88,92	1,73	9,35	100,00
23. Tuban	-	84,87	0,82	14,31	100,00
24. Lamongan	1,07	87,14	-	11,79	100,00
25. Gresik	0,58	82,66	-	16,76	100,00
26. Bangkalan	1,22	82,83	0,42	15,53	100,00
27. Sampang	-	76,32	-	23,68	100,00
28. Pamekasan	-	86,50	1,59	11,91	100,00
29. Sumenep	-	86,52	0,55	12,93	100,00
71. Kota Kediri	0,56	79,77	-	19,67	100,00
72. Kota Blitar	-	75,64	-	24,36	100,00
73. Kota Malang	1,57	78,42	1,35	18,65	100,00
74. Kota Probolinggo	-	87,40	-	12,60	100,00
75. Kota Pasuruan	-	87,95	-	12,05	100,00
76. Kota Mojokerto	-	86,26	-	13,74	100,00
77. Kota Madiun	-	80,91	-	19,09	100,00
78. Kota Surabaya	0,85	72,53	-	26,62	100,00
79. Kota Batu	-	85,50	2,19	12,31	100,00
Jawa Timur	0,54	82,56	1,30	15,59	100,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 3.4.2.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan, 2015

					<i>Perempuan</i>
Kabupaten/Kota	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	2,11	41,17	4,73	51,99	100,00
02. Ponorogo	0,51	35,13	2,69	61,67	100,00
03. Trenggalek	-	42,65	5,48	51,87	100,00
04. Tulungagung	0,58	41,94	5,49	51,99	100,00
05. Blitar	1,37	36,24	4,12	58,26	100,00
06. Kediri	-	34,50	3,18	62,33	100,00
07. Malang	0,75	40,18	2,19	56,88	100,00
08. Lumajang	1,13	37,89	3,32	57,65	100,00
09. Jember	0,87	33,00	4,20	61,93	100,00
10. Banyuwangi	-	34,50	3,14	62,36	100,00
11. Bondowoso	-	31,33	2,45	66,21	100,00
12. Situbondo	0,61	29,13	3,26	67,00	100,00
13. Probolinggo	0,56	33,46	2,60	63,39	100,00
14. Pasuruan	-	30,87	3,32	65,81	100,00
15. Sidoarjo	0,36	36,75	4,88	58,01	100,00
16. Mojokerto	0,46	36,95	5,05	57,55	100,00
17. Jombang	0,50	33,15	5,32	61,03	100,00
18. Nganjuk	1,06	36,49	1,39	61,06	100,00
19. Madiun	0,44	32,29	2,17	65,10	100,00
20. Magetan	0,34	36,62	3,62	59,42	100,00
21. Ngawi	-	38,48	3,52	58,00	100,00
22. Bojonegoro	-	37,28	2,27	60,46	100,00
23. Tuban	0,72	32,76	1,75	64,76	100,00
24. Lamongan	-	33,96	2,56	63,47	100,00
25. Gresik	0,50	31,43	11,25	56,82	100,00
26. Bangkalan	4,68	38,99	2,02	54,30	100,00
27. Sampang	3,97	33,71	3,37	58,95	100,00
28. Pamekasan	1,64	35,49	2,39	60,48	100,00
29. Sumenep	3,36	35,81	5,16	55,67	100,00
71. Kota Kediri	0,58	37,74	5,17	56,51	100,00
72. Kota Blitar	4,22	31,24	4,30	60,23	100,00
73. Kota Malang	0,65	37,27	3,09	58,99	100,00
74. Kota Probolinggo	-	38,78	2,95	58,27	100,00
75. Kota Pasuruan	-	29,56	0,92	69,51	100,00
76. Kota Mojokerto	0,78	34,91	5,11	59,21	100,00
77. Kota Madiun	2,41	30,56	3,38	63,65	100,00
78. Kota Surabaya	1,17	37,13	0,43	61,27	100,00
79. Kota Batu	0,71	41,72	4,36	53,20	100,00
Jawa Timur	0,85	35,76	3,44	59,96	100,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 3.4.3.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan, 2015

Laki-laki + Perempuan

Kabupaten/Kota	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	1,32	61,02	3,14	34,52	100,00
02. Ponorogo	0,78	57,11	1,68	40,43	100,00
03. Trenggalek	0,26	65,15	3,40	31,19	100,00
04. Tulungagung	0,64	62,35	3,50	33,51	100,00
05. Blitar	1,10	57,75	3,10	38,05	100,00
06. Kediri	0,16	55,49	3,29	41,05	100,00
07. Malang	0,76	60,68	2,26	36,31	100,00
08. Lumajang	0,90	57,52	2,68	38,90	100,00
09. Jember	0,66	54,63	3,21	41,50	100,00
10. Banyuwangi	0,17	56,85	3,30	39,68	100,00
11. Bondowoso	-	56,00	1,39	42,62	100,00
12. Situbondo	0,34	51,56	2,06	46,04	100,00
13. Probolinggo	0,61	56,76	1,45	41,18	100,00
14. Pasuruan	0,58	52,48	2,04	44,90	100,00
15. Sidoarjo	0,20	58,25	2,62	38,93	100,00
16. Mojokerto	0,66	59,35	2,91	37,08	100,00
17. Jombang	0,53	55,27	3,34	40,86	100,00
18. Nganjuk	0,99	57,16	1,93	39,91	100,00
19. Madiun	0,48	55,42	1,87	42,23	100,00
20. Magetan	0,38	56,58	2,41	40,63	100,00
21. Ngawi	-	59,80	2,91	37,30	100,00
22. Bojonegoro	-	60,78	2,02	37,20	100,00
23. Tuban	0,41	55,43	1,35	42,81	100,00
24. Lamongan	0,47	57,36	1,44	40,73	100,00
25. Gresik	0,53	54,18	6,25	39,03	100,00
26. Bangkalan	3,21	57,63	1,34	37,81	100,00
27. Sampang	2,23	52,35	1,89	43,53	100,00
28. Pamekasan	0,93	57,36	2,04	39,66	100,00
29. Sumenep	1,94	57,25	3,21	37,60	100,00
71. Kota Kediri	0,57	56,65	2,85	39,93	100,00
72. Kota Blitar	2,28	51,64	2,33	43,75	100,00
73. Kota Malang	1,07	55,96	2,30	40,67	100,00
74. Kota Probolinggo	-	60,45	1,64	37,92	100,00
75. Kota Pasuruan	-	55,47	0,51	44,02	100,00
76. Kota Mojokerto	0,44	57,28	2,88	39,39	100,00
77. Kota Madiun	1,39	51,94	1,95	44,73	100,00
78. Kota Surabaya	1,02	53,94	0,23	44,82	100,00
79. Kota Batu	0,37	62,57	3,33	33,73	100,00
Jawa Timur	0,71	57,12	2,46	39,71	100,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 3.5.1.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi
dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT), 2015

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Kepala Rumah Tangga	Istri/Suami	Mertua/Orangtua	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	84,72	0,46	13,84	0,99	100,00
02. Ponorogo	92,90	-	6,16	0,94	100,00
03. Trenggalek	93,21	-	6,54	0,26	100,00
04. Tulungagung	95,89	-	4,11	-	100,00
05. Blitar	93,19	0,88	5,47	0,46	100,00
06. Kediri	92,85	-	4,15	3,00	100,00
07. Malang	91,49	0,33	5,37	2,81	100,00
08. Lumajang	88,88	0,63	8,32	2,17	100,00
09. Jember	88,75	0,42	9,90	0,92	100,00
10. Banyuwangi	93,96	1,36	3,76	0,92	100,00
11. Bondowoso	92,04	-	7,67	0,28	100,00
12. Situbondo	87,98	1,26	9,48	1,29	100,00
13. Probolinggo	83,42	-	15,91	0,68	100,00
14. Pasuruan	88,55	-	10,90	0,56	100,00
15. Sidoarjo	94,48	0,47	4,37	0,68	100,00
16. Mojokerto	91,83	-	6,66	1,51	100,00
17. Jombang	92,09	-	7,91	-	100,00
18. Nganjuk	93,43	1,07	3,89	1,61	100,00
19. Madiun	90,77	1,07	6,97	1,20	100,00
20. Magetan	91,18	0,40	7,41	1,00	100,00
21. Ngawi	90,20	1,07	7,90	0,83	100,00
22. Bojonegoro	90,06	0,34	8,95	0,65	100,00
23. Tuban	90,19	-	9,04	0,77	100,00
24. Lamongan	87,66	1,07	10,18	1,09	100,00
25. Gresik	88,49	-	10,94	0,58	100,00
26. Bangkalan	91,42	-	6,81	1,77	100,00
27. Sampang	85,60	-	14,40	-	100,00
28. Pamekasan	90,41	-	8,85	0,74	100,00
29. Sumenep	87,30	0,66	10,66	1,37	100,00
71. Kota Kediri	88,98	1,85	9,17	-	100,00
72. Kota Blitar	86,20	1,23	12,57	-	100,00
73. Kota Malang	87,67	0,82	9,05	2,46	100,00
74. Kota Probolinggo	87,75	0,99	10,19	1,07	100,00
75. Kota Pasuruan	94,01	-	5,99	-	100,00
76. Kota Mojokerto	82,61	1,25	14,31	1,83	100,00
77. Kota Madiun	91,90	3,40	4,00	0,70	100,00
78. Kota Surabaya	91,74	0,54	6,28	1,45	100,00
79. Kota Batu	84,78	0,80	13,09	1,33	100,00
Jawa Timur	90,67	0,47	7,72	1,14	100,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 3.5.2.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi
dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT), 2015

<i>Perempuan</i>					
Kabupaten/Kota	Kepala Rumah Tangga	Istri/Suami	Mertua/Orangtua	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	25,04	35,29	34,87	4,79	100,00
02. Ponorogo	33,19	32,15	33,68	0,99	100,00
03. Trenggalek	33,44	38,94	27,62	-	100,00
04. Tulungagung	43,97	39,31	15,78	0,94	100,00
05. Blitar	40,03	33,35	23,62	3,01	100,00
06. Kediri	42,12	32,97	21,83	3,08	100,00
07. Malang	30,37	36,74	29,73	3,16	100,00
08. Lumajang	28,42	33,50	33,62	4,46	100,00
09. Jember	32,12	31,84	30,77	5,27	100,00
10. Banyuwangi	38,59	31,45	27,78	2,19	100,00
11. Bondowoso	44,70	29,64	22,65	3,02	100,00
12. Situbondo	45,31	26,63	22,61	5,45	100,00
13. Probolinggo	25,85	27,55	41,72	4,87	100,00
14. Pasuruan	36,53	27,13	33,28	3,06	100,00
15. Sidoarjo	27,31	33,20	33,48	6,01	100,00
16. Mojokerto	33,41	33,06	31,19	2,34	100,00
17. Jombang	41,65	32,66	21,00	4,69	100,00
18. Nganjuk	39,14	35,48	22,98	2,40	100,00
19. Madiun	42,60	30,05	23,78	3,57	100,00
20. Magetan	33,45	34,06	30,56	1,94	100,00
21. Ngawi	43,22	36,17	19,70	0,91	100,00
22. Bojonegoro	25,82	31,66	39,01	3,51	100,00
23. Tuban	32,32	27,51	35,97	4,20	100,00
24. Lamongan	25,42	27,35	41,85	5,39	100,00
25. Gresik	29,16	28,77	40,71	1,36	100,00
26. Bangkalan	34,76	35,24	26,78	3,22	100,00
27. Sampang	37,88	29,27	27,45	5,40	100,00
28. Pamekasan	34,15	31,98	29,87	4,00	100,00
29. Sumenep	27,54	31,05	33,28	8,13	100,00
71. Kota Kediri	39,82	31,33	27,02	1,83	100,00
72. Kota Blitar	40,81	27,81	28,05	3,33	100,00
73. Kota Malang	38,39	32,77	25,14	3,71	100,00
74. Kota Probolinggo	22,10	35,63	36,67	5,60	100,00
75. Kota Pasuruan	36,02	28,72	31,43	3,83	100,00
76. Kota Mojokerto	33,80	30,02	30,06	6,12	100,00
77. Kota Madiun	44,99	26,24	25,76	3,00	100,00
78. Kota Surabaya	36,13	32,65	28,27	2,95	100,00
79. Kota Batu	23,00	37,68	34,90	4,42	100,00
Jawa Timur	34,59	32,37	29,51	3,52	100,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 3.5.3.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi
dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT), 2015

Laki-laki + Perempuan

Kabupaten/Kota	Kepala Rumah Tangga	Istri/Suami	Mertua/Orangtua	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	52,01	19,55	25,37	3,07	100,00
02. Ponorogo	60,64	17,37	21,03	0,96	100,00
03. Trenggalek	61,91	20,39	17,58	0,12	100,00
04. Tulungagung	68,54	20,70	10,26	0,50	100,00
05. Blitar	65,66	17,69	14,87	1,78	100,00
06. Kediri	66,06	17,41	13,49	3,04	100,00
07. Malang	58,93	19,73	18,35	3,00	100,00
08. Lumajang	56,34	18,32	21,94	3,40	100,00
09. Jember	58,47	17,22	21,06	3,25	100,00
10. Banyuwangi	64,75	17,23	16,43	1,59	100,00
11. Bondowoso	65,30	16,74	16,13	1,83	100,00
12. Situbondo	64,13	15,44	16,82	3,61	100,00
13. Probolinggo	51,26	15,39	30,33	3,02	100,00
14. Pasuruan	59,54	15,13	23,38	1,95	100,00
15. Sidoarjo	58,37	18,06	20,02	3,54	100,00
16. Mojokerto	60,57	17,69	19,79	1,96	100,00
17. Jombang	64,52	17,85	15,06	2,57	100,00
18. Nganjuk	64,36	19,50	14,12	2,03	100,00
19. Madiun	64,59	16,82	16,10	2,49	100,00
20. Magetan	58,98	19,18	20,32	1,53	100,00
21. Ngawi	64,64	20,17	14,32	0,87	100,00
22. Bojonegoro	55,05	17,41	25,33	2,21	100,00
23. Tuban	57,50	15,54	24,25	2,71	100,00
24. Lamongan	52,80	15,79	27,92	3,50	100,00
25. Gresik	55,51	15,99	27,48	1,01	100,00
26. Bangkalan	58,85	20,25	18,29	2,60	100,00
27. Sampang	58,75	16,47	21,74	3,04	100,00
28. Pamekasan	58,27	18,27	20,86	2,60	100,00
29. Sumenep	52,81	18,20	23,72	5,27	100,00
71. Kota Kediri	61,94	18,06	18,99	1,01	100,00
72. Kota Blitar	61,67	15,60	20,93	1,80	100,00
73. Kota Malang	60,77	18,25	17,83	3,14	100,00
74. Kota Probolinggo	51,36	20,19	24,87	3,58	100,00
75. Kota Pasuruan	61,75	15,98	20,14	2,13	100,00
76. Kota Mojokerto	55,07	17,48	23,20	4,25	100,00
77. Kota Madiun	64,91	16,54	16,52	2,02	100,00
78. Kota Surabaya	62,54	17,40	17,82	2,24	100,00
79. Kota Batu	52,42	20,12	24,52	2,95	100,00
Jawa Timur	60,19	17,81	19,57	2,43	100,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 4.1.1.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota
dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ Sedera -jat	SLTP/ Sedera -jat	SM/ Sedera -jat	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Pacitan	11,39	31,36	43,16	2,39	4,65	7,05	100,00
02. Ponorogo	22,87	35,28	33,14	5,00	3,23	0,48	100,00
03. Trenggalek	9,89	38,92	35,66	7,92	3,60	4,02	100,00
04. Tulungagung	6,41	30,90	47,79	6,98	6,10	1,81	100,00
05. Blitar	9,46	39,32	35,19	7,49	4,06	4,47	100,00
06. Kediri	15,81	35,42	30,95	11,07	5,86	0,90	100,00
07. Malang	11,22	42,48	33,45	5,77	5,40	1,69	100,00
08. Lumajang	36,71	27,30	27,67	2,92	4,39	1,00	100,00
09. Jember	33,07	29,76	23,63	3,56	7,12	2,86	100,00
10. Banyuwangi	16,61	44,15	26,80	4,43	3,82	4,20	100,00
11. Bondowoso	35,60	45,15	10,20	2,22	3,60	3,23	100,00
12. Situbondo	32,22	38,96	20,72	2,93	3,64	1,54	100,00
13. Probolinggo	32,41	36,65	26,12	1,77	1,86	1,19	100,00
14. Pasuruan	14,69	33,62	33,35	8,39	8,18	1,77	100,00
15. Sidoarjo	1,51	11,68	39,60	16,24	21,85	9,11	100,00
16. Mojokerto	8,84	44,93	26,96	9,14	9,52	0,62	100,00
17. Jombang	11,02	34,47	34,05	10,25	8,21	2,01	100,00
18. Nganjuk	9,35	35,13	37,72	10,82	4,33	2,65	100,00
19. Madiun	22,42	27,13	32,73	9,18	8,53	-	100,00
20. Magetan	5,47	30,47	49,69	6,02	6,58	1,77	100,00
21. Ngawi	23,49	34,11	31,53	7,63	1,39	1,87	100,00
22. Bojonegoro	19,05	22,05	42,76	5,77	5,91	4,46	100,00
23. Tuban	36,04	12,18	40,58	5,35	3,75	2,08	100,00
24. Lamongan	21,76	30,98	35,10	6,86	4,94	0,35	100,00
25. Gresik	10,10	32,88	38,77	6,04	6,16	6,04	100,00
26. Bangkalan	53,16	21,76	18,35	1,30	4,52	0,91	100,00
27. Sampang	73,58	17,79	3,98	0,79	1,47	2,39	100,00
28. Pamekasan	39,00	30,35	19,35	3,64	6,42	1,24	100,00
29. Sumenep	53,26	25,03	13,29	1,21	6,41	0,80	100,00
71. Kota Kediri	3,01	14,34	35,83	21,59	21,54	3,69	100,00
72. Kota Blitar	4,27	27,02	28,07	14,16	18,45	8,03	100,00
73. Kota Malang	3,42	6,72	30,53	16,30	27,26	15,77	100,00
74. Kota Probolinggo	6,99	21,08	36,07	14,21	16,84	4,82	100,00
75. Kota Pasuruan	10,56	27,54	31,94	4,82	13,08	12,05	100,00
76. Kota Mojokerto	1,16	13,86	43,69	15,76	18,06	7,48	100,00
77. Kota Madiun	-	6,69	12,56	22,60	37,14	21,01	100,00
78. Kota Surabaya	5,94	9,52	26,80	17,42	28,08	12,22	100,00
79. Kota Batu	3,79	44,03	29,44	8,48	12,40	1,86	100,00
Jawa Timur	19,93	30,58	31,11	7,20	7,76	3,43	100,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 4.1.2.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota
dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015

							<i>Perempuan</i>
Kabupaten/Kota	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ Sedera -jat	SLTP/ Sedera -jat	SM/ Sedera -jat	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Pacitan	40,57	32,60	22,45	1,74	-	2,64	100,00
02. Ponorogo	48,98	29,30	17,47	3,29	0,68	0,29	100,00
03. Trenggalek	28,99	37,75	26,33	3,40	0,86	2,67	100,00
04. Tulungagung	23,94	36,46	34,52	1,75	2,20	1,14	100,00
05. Blitar	31,41	38,46	24,57	2,26	2,60	0,72	100,00
06. Kediri	31,28	39,48	23,19	3,22	1,51	1,32	100,00
07. Malang	34,79	40,18	17,06	3,96	2,55	1,47	100,00
08. Lumajang	53,89	26,79	15,45	1,55	1,09	1,23	100,00
09. Jember	64,36	21,48	8,46	0,67	3,37	1,66	100,00
10. Banyuwangi	43,50	40,85	11,01	1,85	2,43	0,37	100,00
11. Bondowoso	62,42	29,45	6,79	0,40	0,25	0,69	100,00
12. Situbondo	65,74	21,71	10,16	0,50	0,69	1,21	100,00
13. Probolinggo	64,56	21,22	10,87	0,68	1,69	0,98	100,00
14. Pasuruan	42,37	34,18	16,83	4,01	1,22	1,38	100,00
15. Sidoarjo	13,16	25,05	34,47	11,95	14,59	0,78	100,00
16. Mojokerto	25,86	50,59	19,20	2,58	1,22	0,56	100,00
17. Jombang	27,53	38,70	24,36	5,24	3,62	0,54	100,00
18. Nganjuk	38,36	39,52	16,37	1,54	1,40	2,81	100,00
19. Madiun	50,28	22,80	21,66	3,21	1,46	0,59	100,00
20. Magetan	27,68	34,43	30,85	2,60	3,44	1,01	100,00
21. Ngawi	54,35	29,00	13,36	1,14	1,20	0,96	100,00
22. Bojonegoro	52,63	21,75	16,98	3,29	4,28	1,07	100,00
23. Tuban	56,00	19,98	20,64	1,39	1,87	0,12	100,00
24. Lamongan	50,15	30,15	15,04	0,89	2,71	1,06	100,00
25. Gresik	33,61	38,55	20,12	6,17	1,55	-	100,00
26. Bangkalan	73,73	11,93	12,07	1,48	0,79	-	100,00
27. Sampang	87,31	8,25	1,85	0,35	0,73	1,51	100,00
28. Pamekasan	64,48	13,86	16,92	0,96	3,15	0,63	100,00
29. Sumenep	83,42	9,30	4,34	1,03	1,91	-	100,00
71. Kota Kediri	13,87	25,50	29,02	16,12	12,70	2,79	100,00
72. Kota Blitar	12,90	32,37	18,49	14,01	17,89	4,34	100,00
73. Kota Malang	13,71	17,90	23,22	14,62	18,96	11,59	100,00
74. Kota Probolinggo	42,79	24,78	18,21	6,87	5,48	1,87	100,00
75. Kota Pasuruan	27,81	26,60	27,01	6,19	8,06	4,32	100,00
76. Kota Mojokerto	14,59	27,54	31,33	9,85	13,16	3,53	100,00
77. Kota Madiun	8,51	12,38	29,86	22,58	21,76	4,90	100,00
78. Kota Surabaya	13,24	15,05	26,85	15,39	21,30	8,17	100,00
79. Kota Batu	17,73	41,93	24,50	10,80	4,46	0,58	100,00
Jawa Timur	43,52	28,95	18,29	3,72	3,90	1,62	100,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 4.1.3.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota
dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015

Laki-laki + Perempuan

Kabupaten/Kota	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ Sedera -jat	SLTP/ Sedera -jat	SM/ Sedera -jat	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Pacitan	27,38	32,04	31,81	2,03	2,10	4,64	100,00
02. Ponorogo	36,98	32,05	24,67	4,07	1,85	0,38	100,00
03. Trenggalek	19,89	38,31	30,77	5,55	2,16	3,31	100,00
04. Tulungagung	15,64	33,83	40,80	4,23	4,05	1,46	100,00
05. Blitar	20,82	38,87	29,69	4,78	3,30	2,53	100,00
06. Kediri	23,98	37,56	26,86	6,92	3,57	1,12	100,00
07. Malang	23,77	41,25	24,72	4,80	3,88	1,57	100,00
08. Lumajang	45,96	27,03	21,09	2,18	2,61	1,12	100,00
09. Jember	49,80	25,33	15,52	2,01	5,12	2,22	100,00
10. Banyuwangi	30,79	42,40	18,47	3,07	3,08	2,18	100,00
11. Bondowoso	50,75	36,28	8,27	1,19	1,71	1,79	100,00
12. Situbondo	50,96	29,32	14,81	1,57	1,99	1,36	100,00
13. Probolinggo	50,37	28,03	17,60	1,16	1,76	1,07	100,00
14. Pasuruan	30,12	33,93	24,14	5,95	4,30	1,55	100,00
15. Sidoarjo	7,77	18,87	36,84	13,94	17,95	4,63	100,00
16. Mojokerto	17,95	47,96	22,80	5,63	5,08	0,59	100,00
17. Jombang	20,04	36,78	28,75	7,51	5,70	1,21	100,00
18. Nganjuk	24,89	37,48	26,29	5,85	2,76	2,74	100,00
19. Madiun	37,56	24,78	26,72	5,94	4,69	0,32	100,00
20. Magetan	17,86	32,68	39,18	4,11	4,83	1,35	100,00
21. Ngawi	40,28	31,33	21,64	4,09	1,28	1,37	100,00
22. Bojonegoro	37,35	21,89	28,71	4,42	5,02	2,61	100,00
23. Tuban	47,32	16,59	29,32	3,11	2,69	0,98	100,00
24. Lamongan	37,66	30,52	23,87	3,52	3,69	0,75	100,00
25. Gresik	23,17	36,03	28,41	6,11	3,59	2,68	100,00
26. Bangkalan	64,99	16,11	14,74	1,40	2,37	0,39	100,00
27. Sampang	81,31	12,42	2,78	0,54	1,06	1,89	100,00
28. Pamekasan	53,56	20,93	17,96	2,11	4,55	0,89	100,00
29. Sumenep	70,67	15,95	8,12	1,11	3,81	0,34	100,00
71. Kota Kediri	8,98	20,48	32,09	18,58	16,68	3,19	100,00
72. Kota Blitar	8,93	29,91	22,89	14,08	18,15	6,04	100,00
73. Kota Malang	9,03	12,82	26,54	15,38	22,73	13,49	100,00
74. Kota Probolinggo	26,83	23,13	26,17	10,14	10,54	3,19	100,00
75. Kota Pasuruan	20,16	27,02	29,20	5,59	10,29	7,75	100,00
76. Kota Mojokerto	8,74	21,58	36,72	12,42	15,29	5,25	100,00
77. Kota Madiun	4,89	9,97	22,52	22,59	28,29	11,74	100,00
78. Kota Surabaya	9,78	12,43	26,83	16,35	24,52	10,10	100,00
79. Kota Batu	11,09	42,93	26,85	9,70	8,24	1,19	100,00
Jawa Timur	32,75	29,69	24,14	5,31	5,66	2,45	100,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 4.2.1.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi
dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2015

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Dapat Membaca & Menulis			Tidak Dapat Membaca & Menulis	Jumlah
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	72,26	2,32	12,49	12,94	100,00
02. Ponorogo	35,83	0,51	34,49	29,17	100,00
03. Trenggalek	43,39	-	42,21	14,40	100,00
04. Tulungagung	48,02	1,01	44,98	5,99	100,00
05. Blitar	47,52	1,08	40,05	11,36	100,00
06. Kediri	47,77	0,34	34,47	17,42	100,00
07. Malang	45,94	0,49	36,60	16,97	100,00
08. Lumajang	38,01	2,02	26,09	33,89	100,00
09. Jember	40,71	7,00	23,56	28,73	100,00
10. Banyuwangi	42,37	0,93	37,28	19,42	100,00
11. Bondowoso	33,02	1,20	21,93	43,85	100,00
12. Situbondo	41,90	3,07	19,14	35,89	100,00
13. Probolinggo	41,84	5,46	16,33	36,37	100,00
14. Pasuruan	33,25	1,50	46,29	18,96	100,00
15. Sidoarjo	55,03	0,83	42,19	1,95	100,00
16. Mojokerto	45,46	0,37	40,71	13,46	100,00
17. Jombang	42,82	-	45,38	11,80	100,00
18. Nganjuk	53,86	-	35,07	11,07	100,00
19. Madiun	45,57	0,50	29,73	24,19	100,00
20. Magetan	66,31	-	25,17	8,52	100,00
21. Ngawi	49,75	-	20,87	29,39	100,00
22. Bojonegoro	51,34	0,56	25,41	22,69	100,00
23. Tuban	36,72	2,26	30,91	30,11	100,00
24. Lamongan	31,38	0,98	43,52	24,11	100,00
25. Gresik	44,40	1,85	44,09	9,66	100,00
26. Bangkalan	22,13	17,60	25,33	34,94	100,00
27. Sampang	13,62	2,88	18,09	65,41	100,00
28. Pamekasan	13,11	5,90	43,13	37,85	100,00
29. Sumenep	19,73	7,76	26,54	45,97	100,00
71. Kota Kediri	72,99	-	21,67	5,34	100,00
72. Kota Blitar	64,78	-	29,80	5,42	100,00
73. Kota Malang	46,02	-	49,90	4,08	100,00
74. Kota Probolinggo	63,01	-	26,44	10,56	100,00
75. Kota Pasuruan	57,56	-	33,86	8,58	100,00
76. Kota Mojokerto	71,13	-	26,75	2,12	100,00
77. Kota Madiun	58,61	-	40,21	1,18	100,00
78. Kota Surabaya	48,00	0,54	46,05	5,40	100,00
79. Kota Batu	57,50	1,18	32,86	8,46	100,00
Jawa Timur	43,47	2,02	33,66	20,86	100,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 4.2.2.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi
dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2015

Perempuan

Kabupaten/Kota	Dapat Membaca & Menulis			Tidak Dapat Membaca & Menulis	Jumlah
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	46,46	1,47	3,11	48,96	100,00
02. Ponorogo	23,92	0,77	19,63	55,68	100,00
03. Trenggalek	36,29	1,90	23,97	37,85	100,00
04. Tulungagung	44,35	0,69	27,62	27,34	100,00
05. Blitar	42,25	2,48	18,65	36,62	100,00
06. Kediri	38,21	3,50	23,13	35,16	100,00
07. Malang	39,44	0,79	17,23	42,55	100,00
08. Lumajang	27,45	6,88	12,12	53,55	100,00
09. Jember	24,24	5,33	9,70	60,73	100,00
10. Banyuwangi	29,89	2,59	15,37	52,15	100,00
11. Bondowoso	26,21	-	4,34	69,45	100,00
12. Situbondo	25,45	2,13	4,35	68,07	100,00
13. Probolinggo	21,36	4,38	5,03	69,23	100,00
14. Pasuruan	24,12	5,93	24,19	45,76	100,00
15. Sidoarjo	54,66	1,05	29,90	14,38	100,00
16. Mojokerto	43,95	2,09	26,22	27,74	100,00
17. Jombang	35,36	2,20	33,65	28,79	100,00
18. Nganjuk	43,81	1,23	13,04	41,92	100,00
19. Madiun	27,11	2,24	18,35	52,30	100,00
20. Magetan	54,81	0,37	9,59	35,22	100,00
21. Ngawi	30,40	0,35	11,16	58,09	100,00
22. Bojonegoro	29,14	2,83	12,98	55,04	100,00
23. Tuban	28,93	4,23	11,82	55,02	100,00
24. Lamongan	22,73	0,77	21,69	54,81	100,00
25. Gresik	38,39	1,76	25,35	34,49	100,00
26. Bangkalan	12,31	17,78	12,41	57,49	100,00
27. Sampang	3,86	3,07	7,13	85,94	100,00
28. Pamekasan	8,63	8,07	23,60	59,70	100,00
29. Sumenep	7,90	4,56	10,53	77,01	100,00
71. Kota Kediri	60,63	1,85	22,07	15,44	100,00
72. Kota Blitar	53,90	-	25,75	20,36	100,00
73. Kota Malang	52,53	2,98	30,85	13,64	100,00
74. Kota Probolinggo	38,00	0,72	11,25	50,02	100,00
75. Kota Pasuruan	48,36	5,15	19,35	27,14	100,00
76. Kota Mojokerto	54,46	-	28,35	17,19	100,00
77. Kota Madiun	66,35	-	21,76	11,89	100,00
78. Kota Surabaya	51,22	1,53	35,51	11,74	100,00
79. Kota Batu	58,36	0,79	20,56	20,28	100,00
Jawa Timur	33,40	2,92	17,84	45,83	100,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 4.2.3.
Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi
dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2015

Laki-laki + Perempuan

Kabupaten/Kota	Dapat Membaca & Menulis			Tidak Dapat Membaca & Menulis	Jumlah
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pacitan	58,12	1,86	7,35	32,68	100,00
02. Ponorogo	29,40	0,65	26,46	43,49	100,00
03. Trenggalek	39,67	1,00	32,66	26,68	100,00
04. Tulungagung	46,09	0,84	35,84	17,24	100,00
05. Blitar	44,79	1,81	28,97	24,43	100,00
06. Kediri	42,72	2,01	28,48	26,79	100,00
07. Malang	42,47	0,65	26,28	30,60	100,00
08. Lumajang	32,32	4,64	18,57	44,47	100,00
09. Jember	31,90	6,10	16,15	45,84	100,00
10. Banyuwangi	35,79	1,81	25,72	36,68	100,00
11. Bondowoso	29,18	0,52	11,99	58,31	100,00
12. Situbondo	32,70	2,54	10,88	53,88	100,00
13. Probolinggo	30,40	4,86	10,02	54,72	100,00
14. Pasuruan	28,16	3,97	33,96	33,91	100,00
15. Sidoarjo	54,83	0,95	35,59	8,63	100,00
16. Mojokerto	44,65	1,29	32,96	21,10	100,00
17. Jombang	38,74	1,20	38,97	21,09	100,00
18. Nganjuk	48,48	0,66	23,27	27,60	100,00
19. Madiun	35,54	1,45	23,55	39,47	100,00
20. Magetan	59,90	0,21	16,48	23,41	100,00
21. Ngawi	39,22	0,19	15,59	45,00	100,00
22. Bojonegoro	39,24	1,80	18,63	40,32	100,00
23. Tuban	32,32	3,37	20,13	44,18	100,00
24. Lamongan	26,54	0,86	31,30	41,31	100,00
25. Gresik	41,06	1,80	33,68	23,46	100,00
26. Bangkalan	16,49	17,70	17,90	47,90	100,00
27. Sampang	8,13	2,99	11,92	76,96	100,00
28. Pamekasan	10,55	7,14	31,97	50,33	100,00
29. Sumenep	12,90	5,91	17,30	63,89	100,00
71. Kota Kediri	66,20	1,02	21,89	10,89	100,00
72. Kota Blitar	58,90	-	27,61	13,49	100,00
73. Kota Malang	49,57	1,63	39,50	9,30	100,00
74. Kota Probolinggo	49,14	0,40	18,02	32,43	100,00
75. Kota Pasuruan	52,44	2,87	25,79	18,90	100,00
76. Kota Mojokerto	61,72	-	27,65	10,62	100,00
77. Kota Madiun	63,06	-	29,60	7,34	100,00
78. Kota Surabaya	49,69	1,06	40,52	8,73	100,00
79. Kota Batu	57,95	0,97	26,42	14,65	100,00
Jawa Timur	38,00	2,51	25,06	34,43	100,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 5.1.
Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2015

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pacitan	53,53	54,15	53,87
02. Ponorogo	51,52	50,46	50,95
03. Trenggalek	54,28	50,10	52,09
04. Tulungagung	56,89	48,29	52,36
05. Blitar	50,17	45,44	47,72
06. Kediri	51,46	46,16	48,66
07. Malang	56,11	58,36	57,31
08. Lumajang	59,57	59,90	59,75
09. Jember	55,51	51,84	53,55
10. Banyuwangi	50,11	54,09	52,21
11. Bondowoso	44,98	45,18	45,10
12. Situbondo	48,01	39,88	43,47
13. Probolinggo	64,90	55,39	59,59
14. Pasuruan	48,13	53,46	51,10
15. Sidoarjo	47,59	38,69	42,81
16. Mojokerto	34,19	40,70	37,67
17. Jombang	44,33	39,72	41,81
18. Nganjuk	48,65	54,05	51,54
19. Madiun	60,68	56,87	58,61
20. Magetan	60,32	60,51	60,42
21. Ngawi	51,61	49,47	50,44
22. Bojonegoro	53,77	61,15	57,79
23. Tuban	47,99	43,73	45,58
24. Lamongan	43,75	45,97	45,00
25. Gresik	58,35	43,83	50,28
26. Bangkalan	48,78	43,97	46,01
27. Sampang	28,80	34,32	31,91
28. Pamekasan	42,21	40,79	41,40
29. Sumenep	57,26	64,59	61,49
71. Kota Kediri	51,11	34,68	42,08
72. Kota Blitar	42,49	45,68	44,21
73. Kota Malang	49,52	46,56	47,91
74. Kota Probolinggo	51,99	53,20	52,66
75. Kota Pasuruan	40,76	55,73	49,09
76. Kota Mojokerto	60,06	40,95	49,27
77. Kota Madiun	46,85	50,70	49,06
78. Kota Surabaya	51,82	53,98	52,95
79. Kota Batu	43,43	57,16	50,62
Jawa Timur	51,41	50,29	50,80

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 5.2.
Angka Kesakitan Penduduk Lansia
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2015

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pacitan	27,33	27,88	27,63
02. Ponorogo	30,25	26,45	28,20
03. Trenggalek	28,69	30,70	29,74
04. Tulungagung	24,03	28,08	26,16
05. Blitar	26,97	24,59	25,74
06. Kediri	27,83	27,19	27,49
07. Malang	25,75	21,35	23,41
08. Lumajang	24,86	26,65	25,82
09. Jember	32,66	34,92	33,87
10. Banyuwangi	27,32	27,30	27,31
11. Bondowoso	38,54	34,25	36,12
12. Situbondo	30,35	33,17	31,93
13. Probolinggo	24,39	22,01	23,06
14. Pasuruan	32,56	27,62	29,81
15. Sidoarjo	29,82	25,92	27,72
16. Mojokerto	35,08	35,72	35,43
17. Jombang	34,11	33,01	33,51
18. Nganjuk	21,16	18,92	19,96
19. Madiun	24,19	22,90	23,48
20. Magetan	20,42	20,87	20,67
21. Ngawi	22,34	22,84	22,61
22. Bojonegoro	21,56	17,60	19,40
23. Tuban	28,54	36,85	33,23
24. Lamongan	26,33	29,08	27,87
25. Gresik	22,01	33,01	28,12
26. Bangkalan	35,37	36,49	36,01
27. Sampang	46,44	41,94	43,91
28. Pamekasan	34,42	35,64	35,12
29. Sumenep	24,03	21,73	22,70
71. Kota Kediri	23,57	30,62	27,45
72. Kota Blitar	24,43	26,38	25,48
73. Kota Malang	29,24	26,72	27,86
74. Kota Probolinggo	17,21	26,27	22,23
75. Kota Pasuruan	32,58	20,61	25,92
76. Kota Mojokerto	15,31	11,54	13,18
77. Kota Madiun	19,84	18,11	18,84
78. Kota Surabaya	23,52	25,09	24,35
79. Kota Batu	31,11	17,13	23,79
Jawa Timur	27,78	27,55	27,66

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 5.3.1.
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit
Menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Sakit, 2015

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Lamanya Sakit (Hari)					Jumlah
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Pacitan	34,67	31,85	17,67	11,71	4,10	100,00
02. Ponorogo	41,05	29,46	12,80	4,98	11,71	100,00
03. Trenggalek	25,27	30,60	18,72	12,79	12,62	100,00
04. Tulungagung	32,93	33,96	4,32	8,12	20,68	100,00
05. Blitar	39,13	38,90	9,75	4,36	7,86	100,00
06. Kediri	28,96	29,97	12,99	10,75	17,33	100,00
07. Malang	38,01	28,52	10,93	4,80	17,75	100,00
08. Lumajang	42,64	31,55	7,09	4,78	13,94	100,00
09. Jember	43,51	39,54	8,01	3,97	4,98	100,00
10. Banyuwangi	27,85	23,42	22,86	9,14	16,73	100,00
11. Bondowoso	40,73	34,94	12,64	3,55	8,13	100,00
12. Situbondo	32,88	49,69	6,05	3,78	7,60	100,00
13. Probolinggo	40,31	36,80	8,74	3,00	11,15	100,00
14. Pasuruan	38,37	33,42	13,61	2,11	12,49	100,00
15. Sidoarjo	47,89	21,10	14,27	5,70	11,03	100,00
16. Mojokerto	39,65	35,91	6,88	4,50	13,07	100,00
17. Jombang	23,15	30,63	11,58	11,41	23,23	100,00
18. Nganjuk	26,76	34,44	13,91	5,78	19,12	100,00
19. Madiun	29,35	39,20	6,82	4,93	19,69	100,00
20. Magetan	35,10	37,85	7,45	-	19,59	100,00
21. Ngawi	29,65	42,87	11,14	-	16,35	100,00
22. Bojonegoro	27,10	36,50	9,44	11,81	15,15	100,00
23. Tuban	36,85	47,75	3,25	4,55	7,60	100,00
24. Lamongan	39,71	29,72	6,23	2,08	22,27	100,00
25. Gresik	49,36	34,05	7,10	4,95	4,54	100,00
26. Bangkalan	44,51	29,39	7,36	5,88	12,86	100,00
27. Sampang	30,04	33,13	3,81	6,96	26,06	100,00
28. Pamekasan	34,77	35,42	1,95	17,01	10,85	100,00
29. Sumenep	41,04	23,37	13,48	5,70	16,42	100,00
71. Kota Kediri	39,86	36,08	-	5,70	18,36	100,00
72. Kota Blitar	57,09	32,41	6,87	-	3,63	100,00
73. Kota Malang	37,72	34,32	10,22	5,45	12,30	100,00
74. Kota Probolinggo	12,78	48,63	-	-	38,59	100,00
75. Kota Pasuruan	26,90	54,43	6,70	-	11,97	100,00
76. Kota Mojokerto	38,13	22,57	9,21	8,17	21,92	100,00
77. Kota Madiun	31,04	21,63	13,95	-	33,37	100,00
78. Kota Surabaya	47,11	27,02	20,17	-	5,71	100,00
79. Kota Batu	38,25	24,20	14,15	1,57	21,82	100,00
Jawa Timur	36,68	33,14	10,78	5,75	13,65	100,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 5.3.2.
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit
Menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Sakit, 2015

Kabupaten/Kota	Lamanya Sakit (Hari)					Jumlah
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Pacitan	33,52	38,42	15,25	1,47	11,33	100,00
02. Ponorogo	41,23	33,46	6,29	6,88	12,15	100,00
03. Trenggalek	18,31	41,29	17,42	7,92	15,05	100,00
04. Tulungagung	35,69	36,13	8,93	9,13	10,11	100,00
05. Blitar	32,80	39,94	4,68	6,37	16,21	100,00
06. Kediri	32,46	23,11	17,69	4,34	22,39	100,00
07. Malang	21,20	17,74	10,73	14,80	35,54	100,00
08. Lumajang	34,72	39,93	9,64	6,46	9,25	100,00
09. Jember	58,76	22,41	7,77	4,70	6,35	100,00
10. Banyuwangi	33,38	42,06	11,96	3,66	8,94	100,00
11. Bondowoso	33,14	44,72	6,98	5,22	9,94	100,00
12. Situbondo	24,67	37,95	22,26	4,29	10,83	100,00
13. Probolinggo	34,97	48,69	9,19	2,66	4,49	100,00
14. Pasuruan	42,30	40,39	3,40	4,73	9,17	100,00
15. Sidoarjo	40,60	37,37	12,88	1,51	7,64	100,00
16. Mojokerto	43,99	26,35	9,21	-	20,44	100,00
17. Jombang	35,24	39,07	3,55	6,40	15,75	100,00
18. Nganjuk	29,76	28,22	15,85	5,14	21,03	100,00
19. Madiun	39,96	34,51	5,44	2,41	17,69	100,00
20. Magetan	33,86	37,90	10,92	-	17,32	100,00
21. Ngawi	27,93	27,01	13,53	3,91	27,62	100,00
22. Bojonegoro	44,51	32,47	13,34	9,69	-	100,00
23. Tuban	34,04	48,49	5,58	4,53	7,36	100,00
24. Lamongan	27,59	49,37	2,69	3,69	16,66	100,00
25. Gresik	42,28	32,86	13,30	1,72	9,84	100,00
26. Bangkalan	39,20	41,93	6,44	4,47	7,96	100,00
27. Sampang	34,54	27,73	13,68	12,24	11,80	100,00
28. Pamekasan	31,78	39,77	8,83	3,28	16,33	100,00
29. Sumenep	35,89	39,36	13,39	3,46	7,91	100,00
71. Kota Kediri	42,94	29,90	9,10	1,63	16,44	100,00
72. Kota Blitar	14,66	48,73	4,07	-	32,54	100,00
73. Kota Malang	41,46	26,44	8,66	4,82	18,62	100,00
74. Kota Probolinggo	14,31	47,68	33,47	-	4,55	100,00
75. Kota Pasuruan	34,54	28,02	28,13	-	9,30	100,00
76. Kota Mojokerto	42,63	36,39	7,30	-	13,68	100,00
77. Kota Madiun	54,81	21,26	9,71	-	14,22	100,00
78. Kota Surabaya	64,71	19,69	6,10	7,12	2,38	100,00
79. Kota Batu	40,92	28,64	13,61	-	16,83	100,00
Jawa Timur	37,47	34,31	9,87	5,25	13,10	100,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 5.3.3.
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit
Menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Sakit, 2015

Laki-laki + Perempuan

Kabupaten/Kota	Lamanya Sakit (Hari)					Jumlah
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Pacitan	34,04	35,49	16,33	6,05	8,10	100,00
02. Ponorogo	41,14	31,48	9,50	5,94	11,93	100,00
03. Trenggalek	21,51	36,38	18,02	10,16	13,93	100,00
04. Tulungagung	34,49	35,19	6,92	8,69	14,71	100,00
05. Blitar	36,00	39,41	7,24	5,35	11,99	100,00
06. Kediri	30,79	26,39	15,44	7,40	19,97	100,00
07. Malang	29,84	23,28	10,83	9,66	26,39	100,00
08. Lumajang	38,24	36,21	8,51	5,71	11,33	100,00
09. Jember	51,92	30,09	7,88	4,37	5,74	100,00
10. Banyuwangi	30,77	33,25	17,11	6,25	12,62	100,00
11. Bondowoso	36,67	40,18	9,61	4,44	9,10	100,00
12. Situbondo	28,11	42,87	15,47	4,08	9,48	100,00
13. Probolinggo	37,46	43,14	8,98	2,81	7,60	100,00
14. Pasuruan	40,40	37,02	8,34	3,47	10,78	100,00
15. Sidoarjo	44,23	29,27	13,57	3,60	9,33	100,00
16. Mojokerto	41,99	30,75	8,14	2,07	17,04	100,00
17. Jombang	29,66	35,18	7,25	8,71	19,20	100,00
18. Nganjuk	28,28	31,28	14,89	5,45	20,09	100,00
19. Madiun	34,97	36,71	6,09	3,59	18,63	100,00
20. Magetan	34,40	37,88	9,41	-	18,32	100,00
21. Ngawi	28,71	34,15	12,45	2,15	22,54	100,00
22. Bojonegoro	35,71	34,50	11,37	10,76	7,66	100,00
23. Tuban	35,09	48,22	4,71	4,54	7,45	100,00
24. Lamongan	32,63	41,20	4,16	3,02	18,99	100,00
25. Gresik	44,74	33,27	11,14	2,85	8,00	100,00
26. Bangkalan	41,42	36,69	6,83	5,06	10,01	100,00
27. Sampang	32,46	30,23	9,12	9,80	18,40	100,00
28. Pamekasan	33,04	37,94	5,94	9,05	14,03	100,00
29. Sumenep	38,19	32,20	13,43	4,46	11,72	100,00
71. Kota Kediri	41,75	32,29	5,58	3,20	17,18	100,00
72. Kota Blitar	33,36	41,54	5,30	-	19,80	100,00
73. Kota Malang	39,68	30,19	9,40	5,12	15,60	100,00
74. Kota Probolinggo	13,78	48,00	21,92	-	16,30	100,00
75. Kota Pasuruan	30,28	42,75	16,18	-	10,79	100,00
76. Kota Mojokerto	40,35	29,40	8,27	4,13	17,85	100,00
77. Kota Madiun	44,18	21,43	11,61	-	22,78	100,00
78. Kota Surabaya	56,63	23,05	12,55	3,85	3,91	100,00
79. Kota Batu	39,26	25,87	13,95	0,98	19,94	100,00
Jawa Timur	37,11	33,77	10,29	5,48	13,35	100,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 5.4.
Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2015

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pacitan	65,23	64,69	64,94
02. Ponorogo	70,37	64,93	67,40
03. Trenggalek	61,20	70,54	66,30
04. Tulungagung	49,36	57,78	54,18
05. Blitar	68,61	61,52	64,78
06. Kediri	51,78	62,92	57,95
07. Malang	62,16	58,77	60,40
08. Lumajang	49,78	48,04	48,85
09. Jember	52,72	53,42	53,11
10. Banyuwangi	65,13	67,19	66,17
11. Bondowoso	66,56	61,37	63,63
12. Situbondo	69,02	58,15	62,56
13. Probolinggo	61,63	51,57	55,42
14. Pasuruan	63,40	62,65	63,00
15. Sidoarjo	72,91	74,88	74,04
16. Mojokerto	67,70	62,72	65,17
17. Jombang	64,94	67,82	66,57
18. Nganjuk	56,41	65,49	61,02
19. Madiun	70,31	59,77	64,34
20. Magetan	63,71	60,55	61,95
21. Ngawi	62,81	54,50	58,20
22. Bojonegoro	61,10	48,53	54,80
23. Tuban	61,13	59,56	60,21
24. Lamongan	70,66	67,07	68,69
25. Gresik	66,09	74,29	71,24
26. Bangkalan	54,30	45,81	49,24
27. Sampang	68,38	68,91	68,67
28. Pamekasan	57,34	48,90	52,47
29. Sumenep	46,96	50,73	48,96
71. Kota Kediri	51,96	62,21	58,32
72. Kota Blitar	53,11	65,44	59,60
73. Kota Malang	46,57	54,00	50,73
74. Kota Probolinggo	68,21	72,40	70,50
75. Kota Pasuruan	70,65	60,56	65,77
76. Kota Mojokerto	54,37	65,39	61,61
77. Kota Madiun	54,73	54,41	54,55
78. Kota Surabaya	65,62	65,96	65,80
79. Kota Batu	61,97	65,14	63,41
Jawa Timur	61,78	60,93	61,31

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 5.5.1.
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan
Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2015

Laki-laki

Kabupaten / Kota	Tidak Punya Biaya Berobat	Tidak Ada Biaya Transport	Tidak Ada Sarana Transportasi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama	Tidak Ada yang Mendampingi	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Pacitan	2,62	-	-	-	5,17	92,20	23,36
02. Ponorogo	9,24	-	-	-	-	90,76	22,86
03. Trenggalek	5,77	-	-	-	2,22	92,01	30,98
04. Tulungagung	1,64	-	-	-	1,56	96,81	29,48
05. Blitar	6,85	-	2,65	-	-	90,50	28,22
06. Kediri	8,40	-	-	-	-	91,60	27,88
07. Malang	3,91	-	-	-	-	96,09	39,99
08. Lumajang	-	-	-	-	1,17	98,83	29,81
09. Jember	3,66	-	-	-	-	96,34	32,30
10. Banyuwangi	2,99	-	3,21	-	-	93,80	31,35
11. Bondowoso	3,72	-	-	-	-	96,28	17,66
12. Situbondo	-	-	-	-	-	100,00	23,05
13. Probolinggo	6,62	-	-	-	-	93,38	36,20
14. Pasuruan	11,37	3,31	-	-	-	85,32	20,67
15. Sidoarjo	-	-	-	-	-	100,00	18,06
16. Mojokerto	-	2,30	-	-	-	97,70	22,18
17. Jombang	2,73	-	-	-	-	97,27	13,15
18. Nganjuk	1,27	-	-	-	-	98,73	23,94
19. Madiun	13,12	-	-	-	-	86,88	43,76
20. Magetan	4,77	-	-	-	2,38	92,85	43,63
21. Ngawi	5,79	-	-	-	-	94,21	46,10
22. Bojonegoro	-	-	-	-	-	100,00	27,26
23. Tuban	5,96	-	-	-	-	94,04	37,45
24. Lamongan	-	-	-	-	-	100,00	24,32
25. Gresik	-	-	-	-	-	100,00	33,87
26. Bangkalan	15,83	-	-	-	2,43	81,74	10,64
27. Sampang	5,04	-	4,43	-	-	90,52	22,22
28. Pamekasan	7,31	-	-	-	-	92,69	22,26
29. Sumenep	2,03	-	-	-	-	97,97	25,80
71. Kota Kediri	5,75	-	-	-	-	94,25	14,49
72. Kota Blitar	-	-	-	-	-	100,00	16,10
73. Kota Malang	-	-	-	-	2,78	97,22	33,10
74. Kota Probolinggo	7,06	-	-	-	-	92,94	31,92
75. Kota Pasuruan	-	-	-	-	-	100,00	36,51
76. Kota Mojokerto	-	-	-	-	-	100,00	33,01
77. Kota Madiun	2,23	-	-	4,50	-	93,26	7,09
78. Kota Surabaya	-	-	-	-	-	100,00	23,42
79. Kota Batu	4,92	-	-	-	-	95,08	38,19
Jawa Timur	4,02	0,16	0,33	0,03	0,43	95,03	28,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 5.5.2.
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan
Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2015

Perempuan

Kabupaten / Kota	Tidak Punya Biaya Berobat	Tidak Ada Biaya Transport	Tidak Ada Sarana Transportasi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama	Tidak Ada yang Mendampingi	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Pacitan	4,76	-	-	-	2,68	92,56	12,66
02. Ponorogo	2,19	-	-	-	-	97,81	26,82
03. Trenggalek	6,18	-	-	-	-	93,82	18,25
04. Tulungagung	4,93	-	-	-	-	95,07	18,43
05. Blitar	-	-	-	-	-	100,00	44,44
06. Kediri	2,95	-	-	-	-	97,05	12,80
07. Malang	1,66	-	-	-	-	98,34	21,44
08. Lumajang	3,09	-	-	-	-	96,91	28,64
09. Jember	18,26	-	-	-	-	81,74	12,75
10. Banyuwangi	4,77	-	-	-	-	95,23	20,27
11. Bondowoso	15,99	-	-	-	-	84,01	11,91
12. Situbondo	11,39	-	-	-	4,99	83,62	17,06
13. Probolinggo	11,39	-	-	-	-	88,61	30,45
14. Pasuruan	10,38	6,86	-	-	-	82,75	32,70
15. Sidoarjo	-	-	-	-	-	100,00	20,64
16. Mojokerto	-	-	-	-	-	100,00	42,15
17. Jombang	6,07	-	-	-	-	93,93	27,11
18. Nganjuk	-	-	-	-	-	100,00	25,06
19. Madiun	8,31	-	-	-	3,74	87,95	53,14
20. Magetan	5,52	-	2,53	-	-	91,95	14,93
21. Ngawi	9,49	-	-	-	-	90,51	35,85
22. Bojonegoro	2,28	-	-	-	-	97,72	21,76
23. Tuban	6,16	-	-	-	-	93,84	55,54
24. Lamongan	-	-	-	-	-	100,00	25,61
25. Gresik	6,91	-	-	-	-	93,09	19,72
26. Bangkalan	8,20	-	-	-	-	91,80	22,78
27. Sampang	15,33	-	3,80	-	-	80,88	6,55
28. Pamekasan	11,68	1,51	-	-	-	86,81	20,77
29. Sumenep	2,92	-	-	-	-	97,08	33,33
71. Kota Kediri	-	-	-	-	-	100,00	19,05
72. Kota Blitar	-	-	-	-	4,71	95,29	25,08
73. Kota Malang	-	-	-	-	-	100,00	42,13
74. Kota Probolinggo	13,06	-	-	-	-	86,94	19,97
75. Kota Pasuruan	-	-	-	-	6,02	93,98	31,99
76. Kota Mojokerto	-	-	-	-	-	100,00	11,09
77. Kota Madiun	-	-	-	3,56	-	96,44	8,88
78. Kota Surabaya	-	-	-	-	-	100,00	16,50
79. Kota Batu	-	-	-	-	-	100,00	50,97
Jawa Timur	5,93	0,23	0,13	0,02	0,29	93,41	25,07

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 5.5.3.
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan
Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2015

Laki-laki + Perempuan

Kabupaten / Kota	Tidak Punya Biaya Berobat	Tidak Ada Biaya Transport	Tidak Ada Sarana Transportasi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama	Tidak Ada yang Mendampingi	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Pacitan	3,79	-	-	-	3,81	92,40	17,49
02. Ponorogo	5,10	-	-	-	-	94,90	25,18
03. Trenggalek	5,97	-	-	-	1,16	92,87	24,91
04. Tulungagung	3,37	-	-	-	0,74	95,89	23,66
05. Blitar	2,81	-	1,08	-	-	96,11	37,80
06. Kediri	5,74	-	-	-	-	94,26	20,52
07. Malang	2,69	-	-	-	-	97,31	29,96
08. Lumajang	1,68	-	-	-	0,53	97,78	29,17
09. Jember	11,70	-	-	-	-	88,30	21,53
10. Banyuwangi	3,86	-	1,63	-	-	94,51	25,90
11. Bondowoso	11,07	-	-	-	-	88,93	14,22
12. Situbondo	7,57	-	-	-	3,32	89,11	19,07
13. Probolinggo	9,82	-	-	-	-	90,18	32,35
14. Pasuruan	10,84	5,21	-	-	-	83,94	27,11
15. Sidoarjo	-	-	-	-	-	100,00	19,50
16. Mojokerto	-	1,05	-	-	-	98,95	33,06
17. Jombang	4,55	-	-	-	-	95,45	20,76
18. Nganjuk	0,70	-	-	-	-	99,30	24,44
19. Madiun	10,04	-	-	-	2,39	87,56	49,75
20. Magetan	5,20	-	1,46	-	1,01	92,33	27,07
21. Ngawi	8,03	-	-	-	-	91,97	39,91
22. Bojonegoro	1,30	-	-	-	-	98,70	24,12
23. Tuban	6,08	-	-	-	-	93,92	48,19
24. Lamongan	-	-	-	-	-	100,00	25,07
25. Gresik	3,88	-	-	-	-	96,12	25,93
26. Bangkalan	10,97	-	-	-	0,88	88,15	18,37
27. Sampang	10,58	-	4,09	-	-	85,33	13,78
28. Pamekasan	10,02	0,94	-	-	-	89,04	21,34
29. Sumenep	2,49	-	-	-	-	97,51	29,66
71. Kota Kediri	2,52	-	-	-	-	97,48	17,05
72. Kota Blitar	-	-	-	-	2,12	97,88	20,14
73. Kota Malang	-	-	-	-	1,33	98,67	37,82
74. Kota Probolinggo	10,14	-	-	-	-	89,86	25,79
75. Kota Pasuruan	-	-	-	-	3,36	96,64	33,99
76. Kota Mojokerto	-	-	-	-	-	100,00	20,03
77. Kota Madiun	0,98	-	-	3,98	-	95,04	8,09
78. Kota Surabaya	-	-	-	-	-	100,00	19,88
79. Kota Batu	2,79	-	-	-	-	97,21	43,73
Jawa Timur	5,08	0,20	0,22	0,02	0,35	94,13	26,37

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 5.6.1.
Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit
Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan, 2015

Laki-laki

Kabupaten/Kota	RS Peme- rintah	RS Swasta	Praktek Dokter	Puskes- mas	Praktek Nakes	Praktek Batra	Dukun Bersalin	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Pacitan	6,74	2,04	48,50	7,71	33,30	3,06	1,51	1,45
02. Ponorogo	0,57	7,38	53,45	2,94	26,71	15,06	1,93	1,31
03. Trenggalek	6,65	1,59	56,23	17,09	24,03	2,08	1,84	-
04. Tulungagung	19,61	5,94	38,25	8,20	28,07	1,63	0,40	5,91
05. Blitar	8,78	4,33	64,19	5,31	18,67	0,73	6,92	4,31
06. Kediri	10,07	7,40	45,25	15,17	23,06	1,61	1,43	2,43
07. Malang	2,96	11,25	49,23	6,68	22,29	4,47	0,91	3,81
08. Lumajang	7,58	3,17	65,91	1,75	15,76	-	1,36	6,23
09. Jember	4,55	7,41	63,33	8,79	10,82	-	2,67	6,40
10. Banyuwangi	2,40	11,18	67,21	9,70	15,46	-	1,77	-
11. Bondowoso	2,28	2,01	73,59	5,32	20,43	0,66	-	-
12. Situbondo	9,69	5,09	45,45	-	36,49	-	3,29	-
13. Probolinggo	9,62	2,12	80,17	2,58	6,68	-	-	-
14. Pasuruan	3,32	5,97	42,73	11,93	27,02	2,58	11,97	6,29
15. Sidoarjo	29,74	4,17	29,56	13,76	23,47	-	1,70	1,98
16. Mojokerto	13,12	8,49	63,56	2,56	18,24	3,54	1,57	1,57
17. Jombang	9,90	4,72	48,27	10,97	32,39	2,02	1,49	4,39
18. Nganjuk	8,02	8,12	59,01	2,44	18,23	2,96	1,28	3,53
19. Madiun	10,21	3,41	63,05	5,63	16,94	2,12	-	3,42
20. Magetan	6,02	5,10	60,01	12,69	14,43	1,41	6,24	2,15
21. Ngawi	4,84	5,65	65,08	3,31	15,53	4,95	-	4,42
22. Bojonegoro	6,44	4,64	61,97	4,58	14,90	1,50	-	5,97
23. Tuban	10,13	4,49	65,88	3,28	25,99	6,15	6,93	3,47
24. Lamongan	11,11	12,81	54,94	9,68	15,35	2,11	-	0,89
25. Gresik	9,17	7,10	52,77	12,53	15,76	6,62	-	-
26. Bangkalan	7,61	-	55,35	1,93	35,94	1,01	-	-
27. Sampang	16,14	-	63,59	-	21,42	-	8,90	-
28. Pamekasan	12,30	-	54,92	3,33	21,54	5,13	3,85	1,57
29. Sumenep	3,21	3,88	50,49	4,54	38,07	2,50	-	2,99
71. Kota Kediri	25,21	-	22,14	17,44	35,21	-	-	-
72. Kota Blitar	28,25	-	33,30	16,38	33,93	3,91	-	4,72
73. Kota Malang	28,39	3,92	27,55	15,86	34,81	-	3,33	-
74. Kota Probolinggo	1,99	-	42,77	16,07	42,26	-	14,74	6,37
75. Kota Pasuruan	4,78	7,51	46,46	-	38,78	-	5,18	2,53
76. Kota Mojokerto	39,76	3,61	8,86	16,48	33,90	6,51	-	-
77. Kota Madiun	18,70	1,27	40,67	13,61	27,94	-	3,98	-
78. Kota Surabaya	22,71	22,24	23,30	13,65	23,47	-	-	-
79. Kota Batu	10,17	11,29	47,24	7,35	16,29	3,80	2,74	1,89
Jawa Timur	9,76	6,77	53,59	7,69	21,92	2,35	2,35	2,54

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 5.6.2.
Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit
Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan, 2015

<i>Perempuan</i>								
Kabupaten/Kota	RS Peme-rintah	RS Swasta	Praktek Dokter	Puskes-mas	Praktek Nakes	Praktek Batra	Dukun Bersalin	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Pacitan	7,55	1,23	46,00	5,14	33,69	5,78	2,99	4,61
02. Ponorogo	5,46	2,35	51,88	2,26	24,05	10,55	5,91	3,22
03. Trenggalek	3,73	1,64	56,55	11,00	18,74	2,79	2,92	5,37
04. Tulungagung	9,12	11,40	40,74	1,74	27,74	13,38	1,06	2,66
05. Blitar	8,08	5,45	69,55	5,01	17,10	0,89	1,01	6,92
06. Kediri	3,74	13,65	51,73	3,78	19,73	5,55	4,22	3,68
07. Malang	6,70	6,43	40,87	15,96	20,27	5,45	3,01	4,92
08. Lumajang	8,67	-	61,06	6,93	15,45	-	2,27	7,25
09. Jember	5,53	4,10	72,92	4,64	12,31	1,55	2,98	1,98
10. Banyuwangi	0,97	3,90	67,03	10,57	23,43	-	6,20	-
11. Bondowoso	-	1,54	76,71	5,89	11,16	2,80	2,00	1,90
12. Situbondo	1,77	1,43	41,87	8,08	31,22	3,26	10,36	2,00
13. Probolinggo	6,43	1,15	68,44	3,79	14,61	1,48	7,58	1,75
14. Pasuruan	4,49	-	59,63	1,84	24,12	7,12	1,27	6,88
15. Sidoarjo	14,99	14,97	36,27	10,42	29,06	-	-	1,46
16. Mojokerto	3,88	6,59	60,29	1,05	26,84	5,26	2,58	-
17. Jombang	5,28	7,84	40,05	4,82	26,62	6,80	2,65	9,35
18. Nganjuk	3,38	-	65,35	5,97	29,28	1,20	-	-
19. Madiun	6,45	5,46	43,22	12,64	27,02	5,91	-	2,08
20. Magetan	6,91	5,08	58,89	9,69	18,13	4,99	6,27	1,12
21. Ngawi	1,24	-	70,35	2,92	15,43	8,14	1,92	-
22. Bojonegoro	3,65	10,52	64,14	2,16	16,32	2,66	-	4,88
23. Tuban	8,94	2,98	66,76	2,40	19,34	3,11	3,09	1,63
24. Lamongan	8,46	11,09	50,59	9,27	14,15	6,78	3,08	-
25. Gresik	11,90	9,91	46,24	10,71	26,16	2,51	1,94	1,58
26. Bangkalan	1,45	2,66	86,31	1,17	10,35	1,78	1,20	-
27. Sampang	3,29	0,89	87,66	1,09	12,22	0,72	0,77	-
28. Pamekasan	6,14	-	40,89	6,66	25,79	20,32	-	4,26
29. Sumenep	1,81	8,22	64,36	12,98	6,99	3,87	1,76	-
71. Kota Kediri	10,61	1,91	25,46	13,69	47,56	8,43	-	-
72. Kota Blitar	10,76	2,85	44,47	-	44,10	-	6,93	3,45
73. Kota Malang	14,49	8,76	34,94	22,27	28,06	-	2,89	-
74. Kota Probolinggo	2,25	3,55	33,50	13,10	47,58	-	-	-
75. Kota Pasuruan	10,27	6,50	22,15	5,66	61,96	3,24	-	-
76. Kota Mojokerto	2,17	12,84	20,45	9,09	48,97	2,83	3,65	-
77. Kota Madiun	14,26	5,37	21,66	15,84	42,08	-	-	2,47
78. Kota Surabaya	28,00	9,40	16,20	11,53	35,85	-	-	2,69
79. Kota Batu	7,93	11,86	53,49	5,98	16,98	-	3,75	-
Jawa Timur	7,09	5,77	54,23	7,08	22,34	4,01	2,60	2,69

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 5.6.3.
Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit
Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan, 2015

Laki-laki + Perempuan

Kabupaten/Kota	RS Peme- rintah	RS Swasta	Praktek Dokter	Puskes- mas	Praktek Nakes	Praktek Batra	Dukun Bersalin	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Pacitan	7,18	1,60	47,14	6,31	33,52	4,53	2,32	3,17
02. Ponorogo	3,14	4,74	52,62	2,58	25,31	12,69	4,02	2,31
03. Trenggalek	4,96	1,62	56,42	13,56	20,96	2,49	2,47	3,12
04. Tulungagung	13,21	9,27	39,77	4,26	27,87	8,80	0,81	3,93
05. Blitar	8,42	4,91	66,94	5,15	17,87	0,81	3,89	5,65
06. Kediri	6,26	11,16	49,15	8,32	21,06	3,98	3,10	3,18
07. Malang	4,85	8,81	45,00	11,38	21,27	4,97	1,97	4,37
08. Lumajang	8,15	1,50	63,35	4,48	15,60	-	1,84	6,77
09. Jember	5,10	5,56	68,68	6,47	11,65	0,86	2,85	3,94
10. Banyuwangi	1,67	7,43	67,12	10,15	19,56	-	4,05	-
11. Bondowoso	1,04	1,76	75,29	5,63	15,38	1,82	1,09	1,04
12. Situbondo	5,31	3,06	43,47	4,46	33,58	1,80	7,19	1,11
13. Probolinggo	7,79	1,57	73,44	3,27	11,23	0,85	4,35	1,00
14. Pasuruan	3,94	2,82	51,65	6,61	25,49	4,97	6,32	6,60
15. Sidoarjo	21,15	10,46	33,47	11,81	26,72	-	0,71	1,67
16. Mojokerto	8,59	7,56	61,96	1,82	22,45	4,38	2,07	0,80
17. Jombang	7,23	6,52	43,52	7,42	29,06	4,78	2,16	7,25
18. Nganjuk	5,49	3,69	62,47	4,37	24,25	2,00	0,58	1,61
19. Madiun	8,24	4,49	52,62	9,32	22,24	4,11	-	2,72
20. Magetan	6,50	5,09	59,40	11,06	16,45	3,35	6,25	1,59
21. Ngawi	2,97	2,71	67,82	3,11	15,48	6,61	1,00	2,13
22. Bojonegoro	5,20	7,25	62,93	3,51	15,53	2,01	-	5,48
23. Tuban	9,44	3,62	66,39	2,77	22,15	4,39	4,71	2,40
24. Lamongan	9,69	11,89	52,60	9,46	14,70	4,62	1,66	0,41
25. Gresik	10,96	8,94	48,50	11,34	22,57	3,93	1,27	1,04
26. Bangkalan	4,19	1,48	72,53	1,51	21,73	1,43	0,66	-
27. Sampang	9,14	0,49	76,70	0,60	16,41	0,39	4,47	-
28. Pamekasan	8,99	-	47,37	5,12	23,83	13,31	1,78	3,02
29. Sumenep	2,44	6,27	58,12	9,18	20,98	3,25	0,97	1,35
71. Kota Kediri	15,55	1,26	24,33	14,96	43,38	5,58	-	-
72. Kota Blitar	18,14	1,64	39,75	6,91	39,80	1,65	4,01	3,98
73. Kota Malang	20,11	6,80	31,95	19,68	30,79	-	3,07	-
74. Kota Probolinggo	2,14	2,00	37,55	14,40	45,26	-	6,45	2,78
75. Kota Pasuruan	7,23	7,06	35,63	2,52	49,11	1,44	2,87	1,40
76. Kota Mojokerto	13,55	10,04	16,94	11,33	44,41	3,94	2,55	-
77. Kota Madiun	16,23	3,55	30,11	14,85	35,79	-	1,77	1,37
78. Kota Surabaya	25,43	15,63	19,64	12,56	29,85	-	-	1,38
79. Kota Batu	9,13	11,56	50,16	6,71	16,61	2,02	3,21	1,01
Jawa Timur	8,30	6,23	53,94	7,36	22,15	3,26	2,49	2,62

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 6.1.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Lansia
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2015

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pacitan	78,25	58,91	67,70
02. Ponorogo	76,61	48,53	61,48
03. Trenggalek	79,73	57,02	67,88
04. Tulungagung	72,02	38,67	54,52
05. Blitar	67,55	37,55	52,07
06. Kediri	61,51	39,66	50,01
07. Malang	61,87	33,62	46,87
08. Lumajang	78,52	39,04	57,34
09. Jember	69,10	36,17	51,55
10. Banyuwangi	75,40	45,33	59,59
11. Bondowoso	82,27	47,03	62,42
12. Situbondo	85,10	47,66	64,23
13. Probolinggo	74,57	39,75	55,18
14. Pasuruan	71,86	27,66	47,28
15. Sidoarjo	52,80	24,90	37,85
16. Mojokerto	69,03	42,32	54,78
17. Jombang	64,24	31,78	46,56
18. Nganjuk	71,12	28,53	48,39
19. Madiun	67,55	32,54	48,58
20. Magetan	66,77	40,81	52,33
21. Ngawi	66,13	34,72	49,10
22. Bojonegoro	65,88	40,72	52,22
23. Tuban	74,78	37,07	53,55
24. Lamongan	71,81	39,54	53,79
25. Gresik	53,38	17,59	33,55
26. Bangkalan	74,59	42,34	56,06
27. Sampang	65,90	37,98	50,30
28. Pamekasan	73,18	41,07	54,86
29. Sumenep	77,83	55,09	64,75
71. Kota Kediri	50,66	24,80	36,48
72. Kota Blitar	53,66	44,00	48,46
73. Kota Malang	43,75	29,31	35,90
74. Kota Probolinggo	43,00	31,47	36,63
75. Kota Pasuruan	52,31	30,89	40,43
76. Kota Mojokerto	52,64	26,95	38,19
77. Kota Madiun	44,75	26,44	34,25
78. Kota Surabaya	48,00	27,46	37,25
79. Kota Batu	68,09	30,26	48,32
Jawa Timur	67,71	37,87	51,54

Sumber: Sakernas, Agustus 2015.

Tabel 6.2.1.
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja
Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2015

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Pertanian	Industri ¹	Jasa-jasa ²	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Pacitan	77,42	14,13	8,44	100,00
02. Ponorogo	81,27	7,33	11,40	100,00
03. Trenggalek	77,76	10,88	11,36	100,00
04. Tulungagung	56,30	12,23	31,47	100,00
05. Blitar	77,63	10,23	12,14	100,00
06. Kediri	68,12	4,90	26,98	100,00
07. Malang	67,03	16,58	16,38	100,00
08. Lumajang	74,81	6,00	19,19	100,00
09. Jember	76,29	5,77	17,95	100,00
10. Banyuwangi	65,63	7,88	26,48	100,00
11. Bondowoso	78,34	12,82	8,84	100,00
12. Situbondo	70,61	5,87	23,52	100,00
13. Probolinggo	81,32	5,52	13,17	100,00
14. Pasuruan	62,59	13,81	23,60	100,00
15. Sidoarjo	36,22	15,82	47,96	100,00
16. Mojokerto	57,23	20,59	22,18	100,00
17. Jombang	50,28	12,47	37,25	100,00
18. Nganjuk	77,86	6,84	15,30	100,00
19. Madiun	76,39	8,74	14,87	100,00
20. Magetan	76,45	8,43	15,13	100,00
21. Ngawi	80,36	8,00	11,65	100,00
22. Bojonegoro	75,72	4,95	19,33	100,00
23. Tuban	79,84	7,32	12,84	100,00
24. Lamongan	71,34	7,45	21,21	100,00
25. Gresik	55,25	21,34	23,41	100,00
26. Bangkalan	86,04	8,80	5,16	100,00
27. Sampang	82,43	8,15	9,42	100,00
28. Pamekasan	72,78	11,20	16,02	100,00
29. Sumenep	72,71	11,96	15,33	100,00
71. Kota Kediri	15,08	16,32	68,60	100,00
72. Kota Blitar	33,09	16,65	50,27	100,00
73. Kota Malang	7,98	28,25	63,77	100,00
74. Kota Probolinggo	32,38	18,27	49,35	100,00
75. Kota Pasuruan	17,52	20,43	62,04	100,00
76. Kota Mojokerto	3,19	24,85	71,96	100,00
77. Kota Madiun	14,05	18,43	67,52	100,00
78. Kota Surabaya	1,94	20,39	77,67	100,00
79. Kota Batu	58,63	12,10	29,27	100,00
Jawa Timur	67,18	10,62	22,20	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2015.

Keterangan: ¹ Termasuk sektor Industri, Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas, Air Minum, dan Kontruksi.

² Termasuk sektor Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi, Keuangan, Jasa-jasa, lainnya.

Tabel 6.2.2.
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja
Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2015

<i>Perempuan</i>				
Kabupaten/Kota	Pertanian	Industri ¹	Jasa-jasa ²	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Pacitan	71,50	17,49	11,01	100,00
02. Ponorogo	68,02	2,80	29,18	100,00
03. Trenggalek	61,04	14,17	24,79	100,00
04. Tulungagung	53,72	12,40	33,88	100,00
05. Blitar	49,26	13,76	36,98	100,00
06. Kediri	46,88	1,11	52,01	100,00
07. Malang	43,97	10,81	45,21	100,00
08. Lumajang	65,83	1,37	32,80	100,00
09. Jember	67,97	9,52	22,51	100,00
10. Banyuwangi	53,37	7,35	39,29	100,00
11. Bondowoso	68,28	6,69	25,02	100,00
12. Situbondo	63,70	1,52	34,77	100,00
13. Probolinggo	57,84	1,27	40,89	100,00
14. Pasuruan	49,25	15,39	35,37	100,00
15. Sidoarjo	31,56	7,25	61,19	100,00
16. Mojokerto	43,62	5,91	50,47	100,00
17. Jombang	39,77	11,91	48,32	100,00
18. Nganjuk	59,32	2,15	38,54	100,00
19. Madiun	56,95	1,46	41,59	100,00
20. Magetan	52,77	5,40	41,83	100,00
21. Ngawi	54,89	5,22	39,89	100,00
22. Bojonegoro	60,51	6,91	32,58	100,00
23. Tuban	54,20	10,24	35,57	100,00
24. Lamongan	68,23	8,62	23,15	100,00
25. Gresik	47,74	8,22	44,03	100,00
26. Bangkalan	85,76	1,04	13,20	100,00
27. Sampang	61,27	6,84	31,89	100,00
28. Pamekasan	68,28	12,79	18,94	100,00
29. Sumenep	71,49	12,15	16,36	100,00
71. Kota Kediri	-	8,58	91,42	100,00
72. Kota Blitar	17,08	10,14	72,78	100,00
73. Kota Malang	5,54	11,28	83,19	100,00
74. Kota Probolinggo	16,13	-	83,87	100,00
75. Kota Pasuruan	-	21,99	78,01	100,00
76. Kota Mojokerto	-	4,38	95,62	100,00
77. Kota Madiun	-	15,17	84,83	100,00
78. Kota Surabaya	-	4,64	95,36	100,00
79. Kota Batu	41,22	-	58,78	100,00
Jawa Timur	54,47	7,84	37,69	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2015.

Keterangan: ¹ Termasuk sektor Industri, Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas, Air Minum, dan Kontruksi.
² Termasuk sektor Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi, Keuangan, Jasa-jasa, lainnya.

Tabel 6.2.3.
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja
Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2015

Laki-laki + Perempuan

Kabupaten/Kota	Pertanian	Industri ¹	Jasa-jasa ²	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Pacitan	74,61	15,73	9,66	100,00
02. Ponorogo	75,64	5,41	18,96	100,00
03. Trenggalek	70,43	12,32	17,25	100,00
04. Tulungagung	55,33	12,29	32,38	100,00
05. Blitar	67,08	11,55	21,38	100,00
06. Kediri	59,32	3,33	37,35	100,00
07. Malang	58,18	14,37	27,46	100,00
08. Lumajang	71,57	4,33	24,10	100,00
09. Jember	73,18	7,17	19,66	100,00
10. Banyuwangi	60,77	7,67	31,55	100,00
11. Bondowoso	74,07	10,22	15,71	100,00
12. Situbondo	67,75	4,07	28,17	100,00
13. Probolinggo	71,90	3,81	24,29	100,00
14. Pasuruan	58,25	14,32	27,43	100,00
15. Sidoarjo	34,57	12,80	52,62	100,00
16. Mojokerto	51,55	14,47	33,98	100,00
17. Jombang	46,45	12,26	41,29	100,00
18. Nganjuk	72,02	5,36	22,61	100,00
19. Madiun	69,37	6,11	24,52	100,00
20. Magetan	66,18	7,11	26,70	100,00
21. Ngawi	70,59	6,93	22,48	100,00
22. Bojonegoro	69,28	5,78	24,94	100,00
23. Tuban	69,84	8,46	21,70	100,00
24. Lamongan	70,06	7,93	22,01	100,00
25. Gresik	53,07	17,53	29,40	100,00
26. Bangkalan	85,92	5,43	8,65	100,00
27. Sampang	73,51	7,59	18,90	100,00
28. Pamekasan	70,86	11,88	17,26	100,00
29. Sumenep	72,11	12,06	15,84	100,00
71. Kota Kediri	9,46	13,43	77,11	100,00
72. Kota Blitar	25,37	13,51	61,12	100,00
73. Kota Malang	6,88	20,61	72,51	100,00
74. Kota Probolinggo	24,66	9,59	65,75	100,00
75. Kota Pasuruan	10,10	21,10	68,81	100,00
76. Kota Mojokerto	1,94	16,86	81,19	100,00
77. Kota Madiun	7,75	16,96	75,29	100,00
78. Kota Surabaya	1,17	14,15	84,68	100,00
79. Kota Batu	52,93	8,14	38,93	100,00
Jawa Timur	62,12	9,52	28,37	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2015.

Keterangan: ¹ Termasuk sektor Industri, Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas, Air Minum, dan Kontruksi.

² Termasuk sektor Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi, Keuangan, Jasa-jasa, lainnya.

Tabel 6.3.1.
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja
Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015

Laki-laki

Kabupaten/Kota	SD ke Bawah	SLTP	SLTA		Diploma	Universitas	Jumlah
			Umum	Kejuruan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Pacitan	79,57	9,00	3,41	5,58	1,23	1,20	100,00
02. Ponorogo	93,77	0,66	-	1,86	1,49	2,21	100,00
03. Trenggalek	91,35	7,46	-	-	1,18	-	100,00
04. Tulungagung	80,63	5,65	5,11	4,10	-	4,51	100,00
05. Blitar	77,30	10,05	4,70	3,10	4,86	-	100,00
06. Kediri	79,53	8,25	8,00	1,11	2,05	1,07	100,00
07. Malang	82,87	6,81	3,57	3,27	-	3,48	100,00
08. Lumajang	88,36	8,10	2,24	-	1,29	-	100,00
09. Jember	92,19	3,01	0,81	2,16	0,95	0,89	100,00
10. Banyuwangi	91,66	2,96	0,73	1,41	0,82	2,42	100,00
11. Bondowoso	84,50	8,47	3,59	0,39	2,36	0,69	100,00
12. Situbondo	86,98	3,15	3,81	6,06	-	-	100,00
13. Probolinggo	92,43	4,70	2,87	-	-	-	100,00
14. Pasuruan	86,97	6,35	3,90	-	-	2,78	100,00
15. Sidoarjo	62,42	12,70	13,43	8,18	-	3,27	100,00
16. Mojokerto	88,42	7,94	-	-	-	3,64	100,00
17. Jombang	74,36	16,04	5,82	0,83	-	2,94	100,00
18. Nganjuk	85,26	9,55	2,96	2,23	-	-	100,00
19. Madiun	83,62	7,98	2,67	3,46	1,13	1,14	100,00
20. Magetan	79,78	14,43	4,08	1,71	-	-	100,00
21. Ngawi	89,37	5,96	-	2,31	1,15	1,21	100,00
22. Bojonegoro	86,01	5,33	4,63	0,25	-	3,78	100,00
23. Tuban	92,73	3,42	0,42	1,69	1,73	-	100,00
24. Lamongan	93,00	2,69	3,05	0,59	0,66	-	100,00
25. Gresik	77,87	14,94	7,19	-	-	-	100,00
26. Bangkalan	94,36	2,57	3,07	-	-	-	100,00
27. Sampang	95,92	2,78	-	-	-	1,30	100,00
28. Pamekasan	90,07	3,72	2,97	0,94	2,30	-	100,00
29. Sumenep	95,18	2,90	1,12	0,80	-	-	100,00
71. Kota Kediri	63,66	5,54	15,29	10,27	-	5,23	100,00
72. Kota Blitar	46,33	22,15	12,92	8,27	3,17	7,16	100,00
73. Kota Malang	58,77	13,62	6,97	8,60	2,69	9,34	100,00
74. Kota Probolinggo	94,16	-	5,84	-	-	-	100,00
75. Kota Pasuruan	45,95	27,63	14,86	3,08	3,85	4,64	100,00
76. Kota Mojokerto	53,48	18,94	10,50	14,39	-	2,68	100,00
77. Kota Madiun	48,42	29,44	11,71	10,43	-	-	100,00
78. Kota Surabaya	49,12	19,16	10,51	10,36	5,79	5,07	100,00
79. Kota Batu	72,17	15,01	4,60	3,27	-	4,96	100,00
Jawa Timur	84,20	7,19	3,58	2,32	1,04	1,67	100,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 6.3.2.
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja
Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015

Kabupaten/Kota	SD ke Bawah	SLTP	SLTA		Diploma	Universitas	Jumlah
			Umum	Kejuruan			
			(1)	(2)			
01. Pacitan	94,62	3,40	-	-	-	1,98	100,00
02. Ponorogo	95,31	0,58	0,64	0,88	-	2,59	100,00
03. Trenggalek	98,98	1,02	-	-	-	-	100,00
04. Tulungagung	94,67	1,68	-	3,65	-	-	100,00
05. Blitar	89,61	9,00	-	-	1,40	-	100,00
06. Kediri	90,08	4,23	2,84	1,56	-	1,29	100,00
07. Malang	95,60	-	3,07	1,32	-	-	100,00
08. Lumajang	97,45	2,55	-	-	-	-	100,00
09. Jember	97,21	2,79	-	-	-	-	100,00
10. Banyuwangi	96,73	1,44	-	-	-	1,83	100,00
11. Bondowoso	96,99	-	3,01	-	-	-	100,00
12. Situbondo	97,18	2,82	-	-	-	-	100,00
13. Probolinggo	98,86	-	-	-	-	1,14	100,00
14. Pasuruan	93,99	1,69	2,66	-	-	1,66	100,00
15. Sidoarjo	71,30	4,67	13,86	-	-	10,17	100,00
16. Mojokerto	98,55	1,45	-	-	-	-	100,00
17. Jombang	85,18	12,27	2,54	-	-	-	100,00
18. Nganjuk	92,13	6,20	-	1,67	-	-	100,00
19. Madiun	92,78	4,79	-	-	2,43	-	100,00
20. Magetan	92,87	2,78	0,93	3,42	-	-	100,00
21. Ngawi	89,43	7,96	1,33	-	-	1,28	100,00
22. Bojonegoro	92,85	0,98	3,12	2,06	-	1,00	100,00
23. Tuban	94,05	4,58	-	-	1,37	-	100,00
24. Lamongan	97,85	1,11	-	-	-	1,04	100,00
25. Gresik	86,38	8,93	4,68	-	-	-	100,00
26. Bangkalan	98,84	-	1,16	-	-	-	100,00
27. Sampang	98,07	1,93	-	-	-	-	100,00
28. Pamekasan	100,00	-	-	-	-	-	100,00
29. Sumenep	100,00	-	-	-	-	-	100,00
71. Kota Kediri	86,42	4,76	8,82	-	-	-	100,00
72. Kota Blitar	70,30	20,46	3,81	5,42	-	-	100,00
73. Kota Malang	46,35	12,99	10,26	10,93	6,31	13,16	100,00
74. Kota Probolinggo	96,40	-	-	3,60	-	-	100,00
75. Kota Pasuruan	87,38	8,81	3,81	-	-	-	100,00
76. Kota Mojokerto	64,13	23,65	5,35	-	-	6,87	100,00
77. Kota Madiun	63,22	14,69	9,65	8,70	3,74	-	100,00
78. Kota Surabaya	64,45	20,24	8,44	-	-	6,87	100,00
79. Kota Batu	85,58	7,08	2,72	-	4,62	-	100,00
Jawa Timur	92,60	3,60	1,66	0,73	0,26	1,16	100,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 6.3.3.
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja
Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015

Laki-laki + Perempuan

Kabupaten/Kota	SD ke Bawah	SLTP	SLTA		Diploma	Universitas	Jumlah
			Umum	Kejuruan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Pacitan	86,72	6,34	1,79	2,93	0,65	1,57	100,00
02. Ponorogo	94,42	0,63	0,27	1,45	0,86	2,37	100,00
03. Trenggalek	94,69	4,64	-	-	0,66	-	100,00
04. Tulungagung	85,90	4,16	3,19	3,93	-	2,82	100,00
05. Blitar	81,88	9,66	2,95	1,95	3,57	-	100,00
06. Kediri	83,90	6,58	5,86	1,29	1,20	1,16	100,00
07. Malang	87,76	4,19	3,38	2,52	-	2,14	100,00
08. Lumajang	91,64	6,10	1,43	-	0,82	-	100,00
09. Jember	94,07	2,93	0,51	1,35	0,59	0,56	100,00
10. Banyuwangi	93,67	2,36	0,44	0,85	0,50	2,18	100,00
11. Bondowoso	89,80	4,87	3,34	0,22	1,36	0,40	100,00
12. Situbondo	91,20	3,01	2,23	3,55	-	-	100,00
13. Probolinggo	95,01	2,82	1,72	-	-	0,46	100,00
14. Pasuruan	89,25	4,84	3,50	-	-	2,41	100,00
15. Sidoarjo	65,55	9,87	13,58	5,30	-	5,70	100,00
16. Mojokerto	92,64	5,23	-	-	-	2,12	100,00
17. Jombang	78,31	14,67	4,63	0,53	-	1,87	100,00
18. Nganjuk	87,42	8,50	2,03	2,06	-	-	100,00
19. Madiun	86,93	6,83	1,71	2,21	1,60	0,73	100,00
20. Magetan	85,45	9,38	2,71	2,45	-	-	100,00
21. Ngawi	89,40	6,72	0,51	1,42	0,71	1,24	100,00
22. Bojonegoro	88,90	3,49	3,99	1,02	-	2,60	100,00
23. Tuban	93,24	3,87	0,26	1,03	1,59	-	100,00
24. Lamongan	94,99	2,04	1,80	0,34	0,39	0,43	100,00
25. Gresik	80,34	13,20	6,46	-	-	-	100,00
26. Bangkalan	96,30	1,45	2,24	-	-	-	100,00
27. Sampang	96,83	2,42	-	-	-	0,75	100,00
28. Pamekasan	94,31	2,13	1,70	0,54	1,32	-	100,00
29. Sumenep	97,54	1,48	0,57	0,41	-	-	100,00
71. Kota Kediri	72,15	5,25	12,88	6,44	-	3,28	100,00
72. Kota Blitar	57,89	21,34	8,53	6,90	1,64	3,71	100,00
73. Kota Malang	53,18	13,34	8,45	9,65	4,32	11,06	100,00
74. Kota Probolinggo	95,22	-	3,07	1,71	-	-	100,00
75. Kota Pasuruan	63,51	19,66	10,18	1,77	2,22	2,67	100,00
76. Kota Mojokerto	57,64	20,78	8,49	8,78	-	4,32	100,00
77. Kota Madiun	55,06	22,82	10,79	9,65	1,68	-	100,00
78. Kota Surabaya	55,20	19,59	9,69	6,25	3,49	5,78	100,00
79. Kota Batu	76,56	12,41	3,98	2,20	1,51	3,33	100,00
Jawa Timur	87,54	5,76	2,81	1,69	0,73	1,47	100,00

Sumber: Susenas, 2015.

Tabel 6.4.1.
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja
Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2015

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Berusaha Sendiri	Berusaha dengan Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Pacitan	9,80	74,42	7,15	3,38	5,25	100,00
02. Ponorogo	16,53	69,88	2,97	6,14	4,49	100,00
03. Trenggalek	10,69	71,54	4,80	2,78	10,18	100,00
04. Tulungagung	17,32	50,04	16,86	11,79	3,99	100,00
05. Blitar	24,54	55,95	5,40	9,23	4,88	100,00
06. Kediri	29,61	35,32	10,92	18,11	6,04	100,00
07. Malang	20,47	40,49	6,75	29,91	2,38	100,00
08. Lumajang	19,43	49,22	9,14	22,21	-	100,00
09. Jember	16,21	51,31	10,98	20,61	0,88	100,00
10. Banyuwangi	18,56	46,21	16,91	15,31	3,02	100,00
11. Bondowoso	11,97	58,30	4,53	22,23	2,96	100,00
12. Situbondo	17,77	42,65	14,16	19,91	5,51	100,00
13. Probolinggo	17,54	62,13	3,80	13,75	2,77	100,00
14. Pasuruan	17,13	39,88	12,06	29,71	1,23	100,00
15. Sidoarjo	16,44	52,60	24,96	6,00	-	100,00
16. Mojokerto	19,06	51,81	7,01	13,52	8,59	100,00
17. Jombang	35,59	40,85	8,38	13,31	1,87	100,00
18. Nganjuk	15,26	65,77	4,57	13,24	1,17	100,00
19. Madiun	18,51	55,19	10,96	11,67	3,68	100,00
20. Magetan	21,93	55,57	1,75	13,09	7,67	100,00
21. Ngawi	13,62	59,02	3,62	19,58	4,16	100,00
22. Bojonegoro	10,60	77,95	5,09	3,13	3,22	100,00
23. Tuban	10,66	77,49	4,06	5,30	2,49	100,00
24. Lamongan	12,01	69,91	8,57	4,97	4,54	100,00
25. Gresik	9,46	47,22	12,95	23,83	6,53	100,00
26. Bangkalan	6,30	83,74	3,71	5,01	1,24	100,00
27. Sampang	10,78	78,02	6,26	2,65	2,30	100,00
28. Pamekasan	13,51	73,88	6,01	6,60	-	100,00
29. Sumenep	13,06	71,88	5,83	3,90	5,33	100,00
71. Kota Kediri	28,00	21,16	18,06	17,40	15,39	100,00
72. Kota Blitar	36,39	32,43	15,78	9,54	5,86	100,00
73. Kota Malang	26,60	22,33	24,74	10,56	15,77	100,00
74. Kota Probolinggo	21,03	31,45	38,05	9,47	-	100,00
75. Kota Pasuruan	42,41	30,02	24,83	2,75	-	100,00
76. Kota Mojokerto	23,57	35,12	28,04	-	13,26	100,00
77. Kota Madiun	42,91	28,69	2,49	9,27	16,64	100,00
78. Kota Surabaya	18,95	29,07	43,13	4,09	4,77	100,00
79. Kota Batu	20,05	29,99	23,80	21,69	4,47	100,00
Jawa Timur	17,47	55,13	10,19	13,45	3,77	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2015.

Tabel 6.4.2.
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja
Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2015

<i>Perempuan</i>						
Kabupaten/Kota	Berusaha Sendiri	Berusaha dengan Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Pacitan	15,82	23,28	-	3,36	57,53	100,00
02. Ponorogo	35,25	20,29	-	2,58	41,88	100,00
03. Trenggalek	27,59	32,33	3,92	3,14	33,02	100,00
04. Tulungagung	24,39	32,62	6,65	5,08	31,26	100,00
05. Blitar	35,69	28,02	8,63	5,30	22,35	100,00
06. Kediri	34,66	39,37	6,37	6,68	12,92	100,00
07. Malang	31,25	32,84	11,59	7,69	16,63	100,00
08. Lumajang	22,13	10,53	8,06	32,74	26,54	100,00
09. Jember	28,28	20,60	11,52	23,87	15,72	100,00
10. Banyuwangi	23,76	28,54	10,06	15,55	22,08	100,00
11. Bondowoso	26,84	12,46	4,65	30,70	25,35	100,00
12. Situbondo	40,95	21,45	-	16,14	21,46	100,00
13. Probolinggo	40,63	26,45	1,14	2,22	29,56	100,00
14. Pasuruan	18,22	36,13	10,70	24,95	9,99	100,00
15. Sidoarjo	23,97	28,97	15,93	8,30	22,83	100,00
16. Mojokerto	22,39	37,49	1,45	19,13	19,54	100,00
17. Jombang	40,65	27,09	2,73	22,65	6,88	100,00
18. Nganjuk	24,11	29,14	3,85	11,65	31,25	100,00
19. Madiun	21,34	24,93	7,44	25,09	21,21	100,00
20. Magetan	30,62	18,73	3,26	4,77	42,61	100,00
21. Ngawi	33,51	18,14	1,39	21,58	25,38	100,00
22. Bojonegoro	17,88	24,31	4,13	5,39	48,29	100,00
23. Tuban	30,19	28,24	5,22	6,41	29,94	100,00
24. Lamongan	22,28	27,41	3,57	-	46,74	100,00
25. Gresik	33,98	26,36	3,31	15,14	21,22	100,00
26. Bangkalan	25,70	8,08	1,04	-	65,18	100,00
27. Sampang	24,49	30,70	3,07	1,22	40,52	100,00
28. Pamekasan	21,61	18,46	-	5,10	54,83	100,00
29. Sumenep	18,20	31,54	-	3,15	47,11	100,00
71. Kota Kediri	39,65	24,89	12,88	5,27	17,31	100,00
72. Kota Blitar	34,71	31,93	10,14	8,20	15,01	100,00
73. Kota Malang	37,72	32,56	13,90	-	15,82	100,00
74. Kota Probolinggo	49,07	17,76	13,16	11,53	8,48	100,00
75. Kota Pasuruan	58,48	25,95	5,38	5,38	4,82	100,00
76. Kota Mojokerto	40,00	8,81	19,03	-	32,16	100,00
77. Kota Madiun	60,49	19,47	10,69	-	9,35	100,00
78. Kota Surabaya	51,20	13,73	22,31	2,07	10,69	100,00
79. Kota Batu	33,22	19,72	11,61	9,92	25,53	100,00
Jawa Timur	28,83	25,61	6,14	10,42	28,99	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2015.

Tabel 6.4.3.
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja
Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2015

Laki-laki + Perempuan

Kabupaten/Kota	Berusaha Sendiri	Berusaha dengan Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Pacitan	12,66	50,14	3,76	3,37	30,08	100,00
02. Ponorogo	24,49	48,80	1,71	4,63	20,38	100,00
03. Trenggalek	18,10	54,35	4,42	2,94	20,19	100,00
04. Tulungagung	19,98	43,50	13,03	9,27	14,23	100,00
05. Blitar	28,69	45,56	6,61	7,77	11,38	100,00
06. Kediri	31,71	37,00	9,03	13,37	8,89	100,00
07. Malang	24,61	37,55	8,61	21,38	7,85	100,00
08. Lumajang	20,40	35,25	8,75	26,01	9,58	100,00
09. Jember	20,72	39,83	11,18	21,83	6,43	100,00
10. Banyuwangi	20,62	39,21	14,20	15,41	10,57	100,00
11. Bondowoso	18,28	38,84	4,58	25,83	12,47	100,00
12. Situbondo	27,36	33,88	8,30	18,35	12,11	100,00
13. Probolinggo	26,80	47,82	2,74	9,13	13,52	100,00
14. Pasuruan	17,49	38,66	11,61	28,16	4,08	100,00
15. Sidoarjo	19,09	44,27	21,78	6,81	8,05	100,00
16. Mojokerto	20,45	45,84	4,69	15,86	13,16	100,00
17. Jombang	37,44	35,83	6,32	16,71	3,70	100,00
18. Nganjuk	18,04	54,24	4,34	12,74	10,64	100,00
19. Madiun	19,53	44,25	9,69	16,52	10,01	100,00
20. Magetan	25,70	39,60	2,40	9,48	22,82	100,00
21. Ngawi	21,25	43,34	2,76	20,35	12,30	100,00
22. Bojonegoro	13,68	55,23	4,68	4,09	22,31	100,00
23. Tuban	18,27	58,29	4,52	5,73	13,19	100,00
24. Lamongan	16,23	52,47	6,52	2,93	21,86	100,00
25. Gresik	16,58	41,16	10,15	21,31	10,80	100,00
26. Bangkalan	14,72	50,92	2,55	2,83	28,98	100,00
27. Sampang	16,56	58,05	4,91	2,05	18,43	100,00
28. Pamekasan	16,97	50,22	3,44	5,96	23,41	100,00
29. Sumenep	15,58	52,13	2,97	3,53	25,79	100,00
71. Kota Kediri	32,34	22,55	16,13	12,88	16,11	100,00
72. Kota Blitar	35,58	32,19	13,06	8,90	10,27	100,00
73. Kota Malang	31,60	26,93	19,86	5,81	15,79	100,00
74. Kota Probolinggo	34,35	24,95	26,23	10,45	4,03	100,00
75. Kota Pasuruan	49,22	28,30	16,58	3,86	2,04	100,00
76. Kota Mojokerto	29,98	24,86	24,53	-	20,64	100,00
77. Kota Madiun	50,80	24,55	6,17	5,11	13,37	100,00
78. Kota Surabaya	31,72	22,99	34,88	3,29	7,11	100,00
79. Kota Batu	24,36	26,63	19,81	17,84	11,36	100,00
Jawa Timur	21,99	43,37	8,57	12,24	13,82	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2015.

Tabel 6.5.1.
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota
dan Jumlah Jam Kerja Keseluruhan Selama Seminggu Terakhir, 2015

Laki-laki

Kabupaten/Kota	0-14	15-34	35+	Total
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
01. Pacitan	6,24	23,17	70,59	100,00
02. Ponorogo	12,86	39,65	47,48	100,00
03. Trenggalek	9,63	40,93	49,44	100,00
04. Tulungagung	6,51	33,72	59,77	100,00
05. Blitar	32,43	31,03	36,54	100,00
06. Kediri	6,95	38,89	54,16	100,00
07. Malang	10,37	26,42	63,20	100,00
08. Lumajang	11,01	32,31	56,68	100,00
09. Jember	8,31	35,75	55,94	100,00
10. Banyuwangi	9,99	36,45	53,56	100,00
11. Bondowoso	2,17	45,00	52,83	100,00
12. Situbondo	9,08	36,31	54,60	100,00
13. Probolinggo	7,54	41,20	51,26	100,00
14. Pasuruan	5,90	32,42	61,68	100,00
15. Sidoarjo	2,87	21,96	75,18	100,00
16. Mojokerto	10,36	39,75	49,89	100,00
17. Jombang	10,91	33,10	56,00	100,00
18. Nganjuk	6,33	41,69	51,98	100,00
19. Madiun	11,35	55,63	33,02	100,00
20. Magetan	13,55	22,50	63,96	100,00
21. Ngawi	10,06	38,76	51,18	100,00
22. Bojonegoro	10,42	37,29	52,29	100,00
23. Tuban	7,75	35,70	56,55	100,00
24. Lamongan	8,93	49,18	41,89	100,00
25. Gresik	3,75	46,55	49,70	100,00
26. Bangkalan	13,48	54,27	32,26	100,00
27. Sampang	12,50	49,15	38,36	100,00
28. Pamekasan	29,16	47,54	23,30	100,00
29. Sumenep	2,79	59,45	37,76	100,00
71. Kota Kediri	11,30	20,37	68,33	100,00
72. Kota Blitar	24,94	32,30	42,76	100,00
73. Kota Malang	4,22	25,65	70,12	100,00
74. Kota Probolinggo	7,09	24,54	68,37	100,00
75. Kota Pasuruan	10,44	15,98	73,58	100,00
76. Kota Mojokerto	9,33	13,92	76,74	100,00
77. Kota Madiun	12,97	18,64	68,39	100,00
78. Kota Surabaya	4,08	12,05	83,87	100,00
79. Kota Batu	6,06	24,70	69,23	100,00
Jawa Timur	9,79	36,43	53,78	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2015.

Tabel 6.5.2.
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota
dan Jumlah Jam Kerja Keseluruhan Selama Seminggu Terakhir, 2015

<i>Perempuan</i>				
Kabupaten/Kota	0-14	15-34	35+	Total
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
01. Pacitan	18,97	46,15	34,88	100,00
02. Ponorogo	22,41	43,66	33,93	100,00
03. Trenggalek	27,69	51,22	21,09	100,00
04. Tulungagung	10,31	53,96	35,72	100,00
05. Blitar	33,35	35,38	31,27	100,00
06. Kediri	24,88	41,52	33,60	100,00
07. Malang	8,82	41,78	49,40	100,00
08. Lumajang	13,29	45,93	40,78	100,00
09. Jember	22,62	35,90	41,48	100,00
10. Banyuwangi	29,27	35,75	34,98	100,00
11. Bondowoso	23,99	39,00	37,02	100,00
12. Situbondo	15,34	43,52	41,13	100,00
13. Probolinggo	20,89	52,33	26,78	100,00
14. Pasuruan	5,50	35,40	59,10	100,00
15. Sidoarjo	-	40,38	59,62	100,00
16. Mojokerto	26,37	27,30	46,33	100,00
17. Jombang	14,10	36,31	49,59	100,00
18. Nganjuk	23,10	36,99	39,91	100,00
19. Madiun	19,54	40,14	40,33	100,00
20. Magetan	9,77	46,26	43,96	100,00
21. Ngawi	10,37	47,78	41,85	100,00
22. Bojonegoro	21,30	46,56	32,14	100,00
23. Tuban	14,62	42,14	43,24	100,00
24. Lamongan	25,74	49,11	25,15	100,00
25. Gresik	14,81	58,38	26,82	100,00
26. Bangkalan	20,94	65,76	13,31	100,00
27. Sampang	40,16	28,55	31,29	100,00
28. Pamekasan	44,37	33,49	22,15	100,00
29. Sumenep	11,47	67,17	21,36	100,00
71. Kota Kediri	5,40	25,16	69,44	100,00
72. Kota Blitar	28,88	33,16	37,96	100,00
73. Kota Malang	15,17	15,26	69,57	100,00
74. Kota Probolinggo	18,04	28,10	53,87	100,00
75. Kota Pasuruan	15,42	26,29	58,29	100,00
76. Kota Mojokerto	8,51	23,28	68,21	100,00
77. Kota Madiun	9,38	17,57	73,05	100,00
78. Kota Surabaya	2,10	19,98	77,92	100,00
79. Kota Batu	9,95	17,80	72,25	100,00
Jawa Timur	19,07	42,11	38,82	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2015.

Tabel 6.5.3.
Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota
dan Jumlah Jam Kerja Keseluruhan Selama Seminggu Terakhir, 2015

Laki-laki + Perempuan

Kabupaten/Kota	0-14	15-34	35+	Total
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
01. Pacitan	12,28	34,08	53,63	100,00
02. Ponorogo	16,92	41,36	41,72	100,00
03. Trenggalek	17,54	45,44	37,01	100,00
04. Tulungagung	7,94	41,32	50,74	100,00
05. Blitar	32,78	32,65	34,58	100,00
06. Kediri	14,38	39,98	45,64	100,00
07. Malang	9,78	32,32	57,90	100,00
08. Lumajang	11,83	37,23	50,94	100,00
09. Jember	13,66	35,81	50,53	100,00
10. Banyuwangi	17,63	36,17	46,20	100,00
11. Bondowoso	11,43	42,45	46,12	100,00
12. Situbondo	11,67	39,29	49,03	100,00
13. Probolinggo	12,89	45,66	41,44	100,00
14. Pasuruan	5,77	33,39	60,84	100,00
15. Sidoarjo	1,86	28,45	69,69	100,00
16. Mojokerto	17,04	34,56	48,40	100,00
17. Jombang	12,07	34,27	53,66	100,00
18. Nganjuk	11,60	40,21	48,18	100,00
19. Madiun	14,31	50,03	35,66	100,00
20. Magetan	11,91	32,80	55,29	100,00
21. Ngawi	10,18	42,22	47,60	100,00
22. Bojonegoro	15,03	41,21	43,76	100,00
23. Tuban	10,43	38,21	51,36	100,00
24. Lamongan	15,83	49,15	35,02	100,00
25. Gresik	6,96	49,99	43,05	100,00
26. Bangkalan	16,71	59,25	24,04	100,00
27. Sampang	24,17	40,46	35,37	100,00
28. Pamekasan	35,65	41,54	22,80	100,00
29. Sumenep	7,04	63,23	29,73	100,00
71. Kota Kediri	9,10	22,16	68,74	100,00
72. Kota Blitar	26,84	32,72	40,44	100,00
73. Kota Malang	9,15	20,98	69,87	100,00
74. Kota Probolinggo	12,29	26,23	61,48	100,00
75. Kota Pasuruan	12,55	20,35	67,10	100,00
76. Kota Mojokerto	9,01	17,58	73,41	100,00
77. Kota Madiun	11,36	18,16	70,48	100,00
78. Kota Surabaya	3,29	15,19	81,51	100,00
79. Kota Batu	7,34	22,44	70,22	100,00
Jawa Timur	13,49	38,69	47,82	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2015.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44, Surabaya - 60292

Telp. 031 - 8439343 Fax. 031 - 8494007

Homepage: <http://www.jatim.bps.go.id> E-mail: bps3500@bps.go.id

